

PROF. MR. KOENTJORO POERBOPRANOTO

Karya dan Pengabdianya



Oleh :
Nyak Wali AT.

Direktorat
Budayaan

98

364/1988

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KESEKOLAHAN DAN NILAI TRADISIONAL
YANG BERKAITAN DENGAN KEMENTERIAN KESEKOLAHAN
JAKARTA
1988

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

PROF.MR. KOENTJORO POERBOPRANOTO
Karya dan Pengabdiannya

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL

Oleh :
Nyak Wali AT.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985

PERPUSTAKAAN
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

Nomor Induk : 369 1480
Tanggal terima : 3-11-00
Tanggal cetak : 3-11-00
Asal dari : IPSN
Jumlah buku : 4
No. le : 4

**Gambar Kulit
MS Karta**

**Penyunting
Sutrisno Kutoyo
Djoko Soekiman**

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antar para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil I Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat menambahkan sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juli 1985

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang antara lain mengerjakan penulisan biografi tokoh.

Pengertian "tokoh" dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23/1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga.

Dasar pemikiran penulisan biografi tokoh ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, melainkan juga mengejar kepuasan bathiniah, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional di bidang budaya yang bertujuan

kolonial membuat keputusan yang telah mempengaruhi jalannya sejarah bangsa kita.

Dengan tersusunnya sejarah istana-istana kepresidenan ini, diharapkan masyarakat luas dan para pelajar dapat memperoleh gambaran tentang fungsi gedung-gedung tersebut sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia.

Dalam kerangka tujuan yang lebih luas, sejarah istana kepresidenan sebagai pusat pengetahuan mengenai proses kejadian sejarah bangsa diharapkan dapat memberikan dorongan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda.

Jakarta, Desember 1985

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYA- AN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
Bab I Asal-usul dan Riwayat Pendidikan	6
Bab II Kegiatan Selama Masa Pelajar dan Maha- siswa	23
2.1 Aktif dalam Perhimpunan Kesenian dan Organisasi Pelajar dan Pemuda	23
2.2 Aktif dalam Organisasi Mahasiswa dan Pemuda	38
Bab III Kegiatan Sosial Politik dalam Masyarakat ..	48
3.1 Dalam Bidang Sosial Politik	48
3.2 Dalam Bidang Kemasyarakatan	56
Bab IV Pengabdian Sebagai Pegawai Negeri	61
4.1 Dalam Bidang non-Edukatif	61
4.2 Dalam Lingkungan Edukatif	68

Bab V	Giat dalam Bidang Paguyuban Sosrokartanan dan Penelitian Hari Jadi Kota Surabaya	73
5.1	Anggota dan Ketua Paguyuban Sosrokartanan	73
5.2	Anggota dan Ketua Tim Peneliti Hari Jadi Kota Surabaya	83
Bab VI	Karya dan Pemikiran	95
	PENUTUP	104
	DAFTAR CATATAN	106
	DAFTAR SUMBER	112
	LAMPIRAN	119

PENDAHULUAN

Biografi Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto ini disusun dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan proyek ini antara lain mengumpulkan informasi mengenai kehidupan dan kegiatan tokoh dari berbagai bidang yang dipandang penting dan memegang peranan dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia.

Kehadiran seorang tokoh mengundang banyak masalah dan tantangan. Masalah dan tantangan akhirnya melahirkan jawaban, baik bersifat individu maupun kelompok masyarakat. Bila jawaban lahir dari seseorang, pertanda ada kehadiran seorang tokoh pejuang.

Kehadiran profil Koentjoro ke dunia ini dituntut untuk memberi jawaban. Ia menimba ilmu dan jawaban dalam bidang hukum, sosial ekonomi, politik dan bidang-bidang lainnya, sebagai jawaban terhadap tantangan. Hal di atas telah dialami oleh Koentjoro.

Siapa Koentjoro itu? Ia adalah salah seorang profil dari beberapa tokoh ilmuwan yang ikut terlibat dalam pembelaan bangsa dan negara Indonesia dari cekraman penjajah.

Berkat ketekunan, keuletan serta keyakinan pada diri sendiri, Koentjoro sempat berpredikat *Meester in de rechten* (*Mr*) tahun 1933 dalam usia 27 tahun. Spesialisasinya adalah Hukum Tata Negara, Tata Pemerintahan dan Ekonomi. Walaupun *meester in de rechten* itu diperolehnya di dalam negeri, tetapi mutunya tidak kalah dengan luar negeri. Buktinya dua kali ia dikirim ke luar negeri dengan mendapat sukses besar, yaitu sebagai atase kebudayaan di Paris (1955 – 1958) dan Bonn dengan tugas tambahan sebagai pengawas kemahasiswaan seluruh Eropa Barat (1965 – 1968).

Pada tahun 1933 ia mulai terjun ke dunia politik. Ia menjadi anggota Budi Utomo yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi partai politik yakni Parindra. Pada tahun 1935 – 1936 ia dipilih menjadi anggota *Stadsgemeenteraad* (seperti DPRD) Batavia (DKI Jakarta sekarang) mewakili Parindra. Pada tahun 1936 ia menjadi anggota Partindo (Partai Indonesia) kelanjutan dari PNI (Partai Nasional Indonesia).

Pada tahun 1936 – 1941, atas pencalonan Fraksi Nasional ia diangkat menjadi anggota Sekretariat *Volksraad* (Dewan Perwakilan Rakyat) di Jakarta dan menarik diri dari keanggotaan *Stadsgemeenteraad*. Di samping giat di bidang politik besar juga perhatiannya di bidang olahraga. Ia mendirikan Ikatan Sport Indonesia (ISI), yakni organisasi pelopor dari Pekan Olah Raga Nasional (PON) bersama dengan Soetardjo Kartohadi-koesoemo dan Moh. Husni Thamrin pada tahun 1938 – 1941.

Pada tahun 1945 ia diangkat menjadi ketua Komite Nasional Indonesia daerah Kotapraja Semarang, hingga ditangkap oleh tentara Jepang selama pertempuran lima hari di Semarang. Dalam bidang kebudayaan bersama teman-temannya, yang salah satu di antaranya Mr. Wongsonegoro, ia mendirikan

dan memimpin organisasi Kongres Kebudayaan Indonesia. Kongres yang pertama dilaksanakan di Magelang pada tahun 1947. Kongres yang kedua di Jakarta pada tahun 1950 dan kongres berikutnya di Bandung pada tahun 1952.

Mr. Koentjoro Poerbopranoto adalah pejabat sementara Sekretaris Badan Pekerja Komisi Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta dari tahun 1945 – 1948, kemudian mendapat panggilan kembali ke Jakarta pada tahun 1949. Selain jabatan tersebut ia juga duduk sebagai anggota seksi pendidikan dalam Panitia Persiapan Nasional yang diketuai oleh Soewirjo.

Pada tahun 1950 – 1955 ia menjabat wakil Ketua II Pengurus Besar Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri. Ketuanya ialah Sudiro. Mr. Koentjoro Poerbopranoto bersama Dr. Soehardjo duduk dalam Sekretariat Panitia Bersama RIS-RI untuk menyusun Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI yang diketuai oleh Prof.Mr.Dr. Soepomo tahun 1950. Pada tahun 1953 – 1955 Mr. Kontjoro Poerbopranoto ditunjuk sebagai Ketua Panitia Interdepartemnal untuk menyusun Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum yang pertama. Bersama pula dengan Prof.Mr.Dr. Soepomo ia duduk dalam redaksi majalah Hukum.

Pada tahun 1955 – 1958 Mr. Koentjoro Poerbopranoto bertugas sebagai Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris merangkap sebagi Penghubung Pemerintah RI dengan UNESCO. Di samping melaksanakan tugas negara, Mr. Koentjoro Poerbopranoto juga memperdalam ilmunya dan mendapatkan sertifikat dari *College European des Science Sociales et Economiques, Universite de Paris*.

Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia, tanggal 9 Nopember 1961 Nomor : 463/M/61, Mr. Koentjoro Poerbopranoto diangkat sebagai Guru Besar dalam mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada tahun 1962 saat diadakan Seminar Hukum Nasional

yang pertama di Jakarta, Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto selain menjadi penyanggah juga sebagai pemrasaran. Pada Seminar Hukum Nasional kedua tahun 1968 di Semarang, Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, dipilih sebagai anggota Panitia Perumus Seksi Hukum Tatanegara.

Kegiatan yang ditangani oleh Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto bukan di bidang ilmu dan politik saja, tetapi juga di bidang spiritual. Pada tahun 1960 - 1965 ia duduk sebagai pengurus Pusat Badan Kongres Kebathinan Indonesia (BKKI) yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro, dan pada tahun 1970 ia sebagai anggota Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK) Pusat.

Pada tahun 1970 itu juga oleh Koordinator Perguruan Tinggi Jawa Timur, Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto ditunjuk menjadi anggota Tim Pancasila Koperti. Selain itu ia juga diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Dewan Kesenian Kotamadya Surabaya dan duduk dalam *Executive Board* Lembaga Indonesia-Amerika Cabang Surabaya dari tahun 1969 - 1972.

Prof.Mr. Kontjoro Poerbopranoto sebagai penganut agama Islam yang tekun serta taat juga melibatkan diri dalam kegiatan Paguyuban Sosrokartanan Surabaya dan aktif sebagai anggota dan ketua.

Dalam mencari Hari Jadi Kota Surabaya Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto melibatkan diri pula sebagai anggota dan ketua Tim Peneliti Hari Jadi Kota Surabaya dan sebagai penasihat tim penyusun buku Hari Jadi Kota Surabaya.

Dalam bidang pendidikan Pro.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, menjadi pembina dan pengajar mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan, Pancasila dan Filsafat Pancasila. Tugas tersebut dilaksanakan hingga wafat pada 20 Maret 1978.

Jauh sebelum Prof.Mr. Koentjoro wafat, atau tepatnya pada tanggal 18 Juli 1977 (Selasa Kliwon, 2 ruwah Jimawal 1909) beliau pernah dianugerahi "gelar" dan "nama" dari

Kanjeng Ratu Susuhunan Paku Buwono XII. Nama dan gelar yang diperoleh beliau ialah Prof.Mr. Kanjeng Raden Hario (KRH) Koentjoro Poerbokoesoemo. Gelar KRH lebih tinggi kedudukannya dari KRT (Kanjeng Raden Tumenggung). Bukti kebenaran ini jelas kelihatan tertulis pada batu nisan di Pasarean Mataraman Hastana Yosoroto Surakarta yang tertulis : "Prof.Mr. KRH. Koentjoro Poerbokoesoemo" atau lihat pengangkatan Angka : 253B. CAP ASMO dari Keraton Paku Buwono XII bersama ini dilampirkan.

Jakarta, Nopember 1984

Penulis

BAB I ASAL USUL DAN RIWAYAT PENDIDIKAN

Koentjoro Poerbopranoto adalah anak sulung Bapak R. Mangunpranoto yang menjabat mantri kehewan di Ponorogo pada akhir abad ke-19. Koentjoro bersaudara empat orang terdiri atas dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Keempat bersaudara itu ialah :

1. R. Koentjoro Poerbopranoto (almarhum), terakhir sempat mencapai gelar *meester* dan Profesor, sehingga namanya menjadi Pro.Mr. Koentjoro Poerbopranoto. Kemudian ia mendapat gelar dari Kanjeng Ratu Susuhunan Paku Buwono XII dengan gelar Kanjeng Raden Hario (KRH). Jadi lengkapnya dengan nama K R H. Prof.Mr. Koentjoro Poerbokoesoemo.
2. R.A. Kunarti (almarhum), janda R. Wahyopranoto (almarhum). R. Wahyopranoto sebelum meninggal adalah pensiunan pegawai P.T.T (Pos Telepon dan Telegrap). Sedangkan R.A. Kunarti semasa hidup bekerja pada perusahaan swasta.
3. R.A. Koemarni (sekarang di Madiun), pensiunan pegawai Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Suaminya R. Sumardjo (almarhum) juga pensiunan pegawai Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

4. R. Sarwoko Sarwopranoto (sekarang di Bandung), pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum. Terakhir jabatannya adalah Kepala Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Propinsi Irian Jaya. Sifat dan tingkah laku Sarwoko Sarwopranoto, yang sekarang aktif dalam organisasi Gerakan Jantung Sehat di Bandung.¹

Baik Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto maupun isterinya B.R.A. Koos Soeprapti Ario Mataram berasal dari satu keturunan, yaitu dari K.S. Susuhunan Prabu Browijoyo V (Sri Kartowijoyo, Mojopahit 1447 - 1454).²

Setelah keturunan yang keduabelas (K.S. Amangkurat IV) :

1. Yang pertama diturunkan pada K.S. Hamangkubowono I (Yogyakarta), kemudian pada keturunan ke empat mempunyai seorang putri menikah dengan R. Prawiro Dipuro atau Prawiro Loyo I, Wedana Prajuri di Madiun). R. Prawiro Dipuro atau Prawiro Loyo I mempunyai putra yang bernama R. Ng. Prawiro Loyo II, Wedana Kanigoro dan mempunyai cucu putri menikah dengan R. Atmangulomo (Penghulu Naib Maospati), yaitu ayah dari R. Mangunpranoto (ayah kandung Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto). Prawiro Dipuro atau Prawiro Loyo I juga mempunyai seorang putra yang bernama R. Djoyodiwiryo dan salah seorang cucu yang bernama R. Sumodiworyo (Patih Ponorogo) ayah dari R. Ngt. Mangunpranoto (Samsiah), yaitu ibu kandung Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto.
2. Yang kedua diturunkan kepada K.S. Pakubuwono (Kartoesuro) yang kemudian diturunkan kepada K.S. Pakubuwono (Surakarta). K.S. Pakubuwono (Surakarta) pada keturunan kelima digantikan oleh K.S. Pakubuwono X, yang mempunyai seorang putri yang bernama G.K. Ratu Alit (Imogiri) menikah dengan K.P.H. Airo Mataram III (Imo-

giri). Hasil pernikahan tersebut melahirkan salah seorang putri yang bernama B.R.A. Koos Soeprapti Ario Mataram (isteri Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto).

Sebagaimana kita ketahui dalam Perjanjian Ganti tahun 1755 Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Dalam perjanjian itu ditetapkan :

1. Sunan Pakubuwono memerintah wilayah Surakarta dan tetap beribukota di Surakarta.
2. Mangkubumi memerintah wilayah Yogyakarta dengan ibu kotanya Yogyakarta, dan bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

Sementara itu Mas Said tidak mendapat bagian. Mas Said juga terkenal sebagai Pangeran Sember Nyawa, masih terus melanjutkan pemberontakan.³

Oleh sebab itu dalam perjanjian di Salatiga pada tahun 1757, daerah sunan Suradarta dibagi sebagian untuk Mas Said, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sunan Pakubuwono I tetap di Surakarta.
2. Mangkunegaran diberikan kepada Mas Said. Mas Said memakai gelar Mangkunegoro I.

Jadi Koentjoro Poerbopranoto begitu juga ayah dan ibu kandungnya berasal dari Pakubuwono I dan Sultan Hamengku Buwono I. Kalau kita lihat pula pada silsilah kedua keluarga ini sebelum Perjanjian Ganti dan Perjanjian Salatiga jelas Koentjoro dan B.R.A Koos Soeprapti berasal usul sama walaupun sudah begitu jauh dalam silsilah.

Sewaktu Koentjoro berumur 21 tahun pada tahun 1927 sewaktu Koentjoro lulus dari *Rechtschool*, R. Ngt. Mangunpranoto mengatakan tidak akan berhenti berpuasa sebelum anak-anaknya menjadi orang yang terpandang dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. R.Ngt. Mangunpranoto tidak pernah mau difoto, dan kalau kebetulan difoto dengan diam-diam tidak pernah jadi. Ini sudah seringkali dilakukan oleh keluarganya.

R.Ngt. Mangunpranoto tidak pernah absen berpuasa sampai dengan meninggalnya tahun 1942.

Perilaku berpuasa dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu menurun kepada Koentjoro. Bedanya hanya dalam berpuasa Koentjoro melaksanakan puasa Senen Kemis dan pada hari pasarannya saja, jadi setiap minggu ia berpuasa tiga hari. Hal ini dilakukan sampai ia meninggal tahun 1978. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, Koentjoro selalu bertirakat, dan meditasi. Dalam mendisiplinkan diri ia mendapat bimbingan dari ayahnya R. Mangunpranoto. Ayahnya sungguh luar biasa dalam hal menjalankan disiplin.

R. Mangunpranoto dan R.Ngt. Mangunpranoto setelah wafat dimakamkan di pemakaman keluarga besar R. Atmogulomo (ayah R. Mangunpranoto atau kakek dari Koentjoro), di belakang Mesjid Maospati kurang lebih 10 kilometer dari Madiun jurusan ke Solo.

Mr. Koentjoro Poerbopranoto mempersunting putri Kraton Pakubuwono Surakarta, yaitu Raden Ajeng (B.R.A) Koos Soeprapti Ario Mataram, cucu *kinasih* Pakubuwono X.

Dalam menentukan jodohnya Mr. Koentjoro Poerbopranoto masih terikat dengan adat istiadat dan tidak bisa mencari sendiri tetapi masih dicarikan oleh orang lain. Pemilihan jodoh Koentjoro Poerbopranoto masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Mr. Koentjoro Poerbopranoto sendiri tidak pernah kenal dengan B.R.A Soeprapti Ario Mataram, tetapi diperkenalkan oleh almarhum Prof.Dr.Mr. Supomo. Mr. Koentjoro kenal baik dengan Prof.Dr.Mr. Supomo yang sama-sama bergabung dalam kesenian karawitan. Kelanjutannya hal ini adalah pilihan orang tuanya masing-masing.⁵

B.R.A. Koos Soeprapti putri almarhum Kanjeng Pangeran Ario Mataram dan ibunya almarhum Goesti Kanjeng Ratu Alit dan cucu *kinasih* Kanjeng Susuhunan Pakubuwono X.⁶

Koentjoro dilahirkan pada tanggal 19 Desember 1906 di

Ponorogo (Jawa Timur). Masyarakat kota kelahiran Koentjoro termasuk patuh dan taat pada agama Islam. Sekitar Ponorogo banyak kita temui pesantren di antaranya yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu Pesantren Modern Gontor. Gontor merupakan *alma mater* kiyai-kiyai dan ulama-ulama modern terkemuka masa kini. Kebanyakan alumninya mempunyai kedudukan di Departemen Agama, Lembaga-lembaga Tertinggi Negara (MPR), dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara (DPR, DPA, MA) yang ada di negara Republik Indonesia.

Lingkungan Ponorogo telah menempa manusia-manusia yang memegang prinsip hidup dalam masyarakat dan negara seperti Dra. S.K. Trimurti, H.O.S. Tjokroaminoto, Dr. Sutomo, Dr. Saleh (ayah kandung dari Ny. Poppy Sutan Syahrir), Ny. Mangunsarkoro, Prof. Mr. Sunario, Prof. Mr. Koentjoro Poerbo-pranoto, dan lain-lain. Kebanyakan mereka berbicara bernada tinggi, kadangkala diikuti oleh emosi yang tinggi pula. Tetapi di adanya terselubung hati yang lembut.⁷⁾

Hobby atau kegemaran Koentjoro sewaktu masih kecil hingga dewasa dapat diungkapkan kembali dari foto-foto yang ada pada keluarganya. Menurut yang diceritakan oleh saudaranya Koentjoro sejak kecilnya hingga dewasa gemar memancing. Sewaktu kecil ia memancing ditemani oleh pembantu orang tuanya yang sudah lanjut usianya yang menurut saudaranya sering dipanggil kakek saja tanpa menyebut nama sesungguhnya. Kegemaran memancing ini masih dilaksanakan sampai ia menjadi mahasiswa. Kiranya di balik rekreasi memancing ini diam-diam tersembunyi latihan konsentrasi.

Selain kegemaran memancing, sejak kecil ia juga gemar melihat wayang orang dan wayang kulit. Kegemaran melihat wayang orang dan wayang kulit terlihat hingga beberapa saat sebelum Koentjoro meninggal. Sekitar tahun 1975 ketika Sarwoko Sarwopranoto adik kandungnya bekerja sebagai ahli teknik jalan raya di dekat Kota Surabaya, apabila ada petunjuk an wayang kulit yang dalangnya termasyhur, Sarwoko selalu

mendapat interlokal dari Koentjoro untuk melihat wayang kulit ini bersama dengannya, sebagai kelanjutan masa kecilnya.

Manakala Koentjoro melihat wayang ia tidak mengenal waktu, hingga pulang terlampau malam walaupun esok harinya harus sekolah. Dalam saat-saat yang demikian itu maka ayahnya Koentjoro memberikan peringatan keras. Dasar Koentjoro sejak kecil telah tampak kedisiplinannya, esok harinya Koentjoro sebelum jam pelajaran sudah berada di sekolah. Kegemaran melihat wayang tidak mengganggu pelajarannya, karena waktu belajar sore hari dialihkan waktunya pada siang hari.

Koentjoro juga senang menggambar tokoh-tokoh wayang. Sewaktu ia meneruskan pelajarannya ke Batavia sangat banyak ia meninggalkan gambar tokoh wayang. Kegemaran menggambar ini masih terlihat dalam corat-coret baik dalam kertas maupun di papan yang tergantung di kamar kerjanya sampai beberapa saat sebelum meninggalnya. Entah secara kebetulan, atau Prof. Mr. Koentjoro telah mendapatkan wangsit dari Tuhan Yang Maha Esa beberapa hari sebelum beliau meninggal maka terdapat gambar corat-coret tokoh-tokoh punakawan dari perwayangan (Semar, Gareng dan Petruk). Corat-coret itu berbunyi "Hanoman akan menghadap tanggal 20 Maret". Seperti yang dikatakan di atas entah ini secara kebetulan atau Wangsit Illahi, pada tanggal tersebutlah Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kepergian almarhum dirasakan oleh keluarganya, khusus isterinya sebagai sesuatu yang tidak dapat diobati, namun setelah sadar kepergian almarhum adalah keputusan Illahi menyerahlah mereka.⁸

Semasa menjadi pelajar di *Rechtsschool* Koentjoro gemar main wayang orang, dan sesuai dengan kerampingan tubuhnya ia menjadi Arjuna. Soal kegemaran seni tari ini ia mewarisi dari ayahnya yang gemar menari wayang maupun tari gambyong. Ayahnya sesuai dengan bentuk tubuhnya maka selalu memegang peranan tokoh-tokoh wayang seperti Werkudara, Gatutkaca dan tokoh yang kekar badannya.

Dalam seni bela diri Koentjoro sangat pandai pencak silat gaya Minangkabau dan *Yuyitsu*. Bila ia pulang dalam libur-libur sekolah adik-adiknya dan saudara-saudaranya yang lain selalu diajarinya kunci-kunci seni bela diri *Yuyitsu*.

Dalam bidang Olahraga yang digemari Koentjoro banyak sekali, di antaranya tenis. Koentjoro mulai bermain tenis sejak mulai di *Rechtsschool* hingga sekitar tahun 1940. Mengenai sepakbola ia hanya gemar melihat pertandingan saja. Setelah usia lanjut Koentjoro sangat senang melaksanakan jalan-jalan di waktu pagi.

Semenjak *Rechtsschool* pemuda Koentjoro berkecimpung dalam dunia kepanduan, dari zaman *Jong Java Pandvidenrij (J.J.P)* sehingga menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia (K B I). Kecuali sebagai pendiri J J P., pemuda Koentjoro menjadi Pedoman Besar (P B) Kepanduan Bangsa Indonesia.

Sifat dan kepribadian Koentjoro sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangannya. Dari kecil sifatnya pendiam tapi berpikir, jujur, sederhana, kebabakan, sabar, disiplin, teliti. Pemuda Koentjoro bukan orang yang lekas puas dengan apa yang telah dicapainya, tetapi sebaliknya menyala-nyalanya semangatnya untuk lebih maju terutama dalam menambah ilmu pengetahuan. Koentjoro semenjak kecilnya sampai akhir hayatnya adalah seorang yang jujur dan sederhana dalam segala-galanya.

Sebuah ilustrasi dalam hal tersebut dapat kita ambil contoh sebagai berikut. Dua orang mahasiswa jurusan Hukum adalah famili dekatnya, dan mengikuti kuliah sebagai mahasiswa di bawah asuhan Mr. Koentjoro. Kedua mahasiswa tersebut juga indekost pada keluarga Mr. Koentjoro. Dalam hati kecil kedua mahasiswa tersebut, mereka mengharapkan bahwa mereka akan lulus begitu saja setiap ujian. Namun nyatanya tidak demikian. Mereka dihadapi sama dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mereka hanya lulus bila memenuhi syarat-syaratnya.

Dalam hidup berdisiplin, sebagai seorang ahli hukum Mr.

Koentjoro sering menciptakan peraturan yang harus ditaati, dan Mr. Koentjoro taat pada peraturan yang berlaku. Sekelumit contoh tentang kedisiplinan Mr. Koentjoro, bahwa Koentjoro sejak menjadi murid ELS, maupun sebagai mahasiswa, sebagai pegawai maupun sebagai pimpinan, selalu merupakan orang pertama yang datang, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam memerangi hawa nafsunya sejak kecil ia dilatih prihatin dan berpuasa Senen-Kemis serta hari wetonnya, di luar wajib puasa dalam bulan Puasa atau Ramadhan.

Koentjoro sejak kecil dan sampai akhir hayatnya hormat dan sujud kepada kedua orang tuanya. Hal ini dapat diungkapkan ketika ia memilih hiasan pada salah satu karya tulisannya dalam halaman pertama dalam bukunya yang berjudul *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, penerbitan Universitas Airlangga Surabaya, 1960 (cetakan ke 1). Dalam mencetuskan rasa hormat dan terima kasihnya kepada kedua orang tuanya, ia menuliskan MINANGKA SESEMBAHAN DUMATENG BAPAK TUWIN IBU SWARGI INGKANG SUMARE ING BUMI MAOSPATI, yang dapat diterjemahkan KAMI PERSEMBAHKAN KEPADA AYAH DAN IBU YANG BERSEMAYAM DI MAKAM MAOSPATI.

Sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, tiap awal pekerjaan yang ditangani Koentjoro, selalu didahului dengan memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa serta perlindungannya. Komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan Koentjoro setiap saat.

Sifat dan kepribadian Koentjoro yang diuraikan di atas, adalah berkat asuhan kedua orang tuanya yang juga mewarisi sifat-sifat kedua orang tua itu pula.

Mr. Koentjoro sebagai ayah yang baik dan harmonis, tetapi tegas bila diperlukan. Di balik keseriusan dalam sifat pribadinya, ia dapat *rilex* bergaul dengan siapa pun. Dalam pergaulan dengan keluarganya, ia selalu menunjukkan sifat-sifat keayahan

yang harus ditiru oleh putra-putrinya. Di dalam pergaulan yang santai tersebut Koentjoro dapat pula menunjukkan sifat humornya sehingga bergaul dengan Koentjoro selalu membawa suasana yang gembira, sungguhpun demikian ia dapat bertindak tegas bilamana diperlukan.

Koentjoro Poerbopranoto si pendiam yang selalu berpikir serta berprinsip dalam hidup, sangat disayangi dan dicintai oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana seorang anak ia dilindungi, dimanja dan dikasih.

Sebelum kita melanjutkan pembicaraan riwayat pendidikan Koentjoro, terlebih dahulu kita melihat latar belakang pertumbuhan dan perkembangan sekolah-sekolah di Indonesia pada zaman kolonial.

Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia pada zaman penjajahan, dibuat bodoh oleh sistem pendidikan kolonial Belanda. Kebodohan, ketidak mampuan, kemiskinan moril dan materil, kepincangan dalam dunia pendidikan, adalah sebahagian dari tantangan zaman.

Tingkat sekolah selalu dibeda-bedakan antara golongan pribumi dan non-pribumi. Golongan pribumi dibedakan lagi, yaitu kelompok priyayi dan rakyat biasa.

Tingkat sekolah sebagai wadah pendidikan dibeda-bedakan pula. Anak rakyat biasa disediakan sekolah *Ongko Loro* atau Sekolah Kelas Dua, Sekolah Desa 3 tahun. Itu pun tempatnya sangat terbatas dan tidak mungkin kita temui di tingkat desa atau kecamatan seperti sekarang. Paling-paling kita jumpai pada tingkat *Onder Afdeling* atau *Afdeling*, yaitu tingkat kabupaten dan keresidenan. Tiga, empat kecamatan seperti sekarang kira-kira satu *Onder Afdeling* dulu. Dua, tiga atau lebih kabupaten atau dua, tiga keresidenan dulunya satu *Afdeling*.

Selain yang disebutkan di atas kita mengenal juga tiga buah sekolah rendah Belanda, yaitu *Europesche Lagere School* (ELS) seperti *Eerste School* (Sekolah Belanda I), *Tweede School*

(Sekolah Belanda II) dan *Derde School* (Sekolah Belanda III). Sekolah Belanda I (*Eerste School*) hanya terdapat di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Jakarta, Bandung, Manado dan beberapa kota lainnya.

Pada Sekolah Belanda I ini yang diterima sebagai murid terutama anak-anak Belanda totok dan anak-anak dari keluarga Sri Mangunegoro. Jika masih ada tempat, maka yang diterima anak-anak dari Indo-Belanda, anak-anak pegawai menengah. Sekolah Belanda II dan III ini dapat diterima anak-anak pegawai menengah.

Pada tahun 1913 Koentjoro berhasil memasuki Sekolah Belanda II (*Tweede ELS*) di Ponorogo. Di Ponorogo pada waktu itu *Tweede ELS* termasuk sekolah yang tertinggi kepunyaan Pemerintah Belanda. Ada juga *HIS (Hollandsch Inlandsche School)* dengan mata pelajaran bahasa Belanda yang agak kurang dari ELS.

Belajar di Sekolah Belanda harus penuh disiplin. Murid yang nakal akan mendapat peringatan keras, dan kalau ia berbuat lagi tentu saja dikeluarkan dari sekolah. Demikianlah Koentjoro dan kawan-kawannya dapat menikmati pendidikan pada awal abad ke-20 sebagai perwujudan dari Politik Etis.

Selama Koentjoro belajar di ELS Ponorogo dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir tercatat sebagai murid yang terpandai dan berprestasi baik. Setiap tahun ia selalu menjadi juara kelas dan juara umum dari ELS tersebut. Ia menjadi juara bukannya terbatas di ELS Ponorogo saja, tetapi terbukti sewaktu tes masuk pada *Rechtsschool* di Jakarta ia berhasil pula menyisihkan calon-calon *Eerste ELS* dari tempat lain yang kebanyakan terdiri dari anak-anak orang Belanda dan anak-anak Eropa lainnya. Karena itulah Koentjoro selama sekolah di ELS dan *Rechtsschool* mendapat bea siswa (*Beurs leerling*), yang diperkirakan datangnya dari bupati atau Pemerintah Ponorogo sendiri.¹⁰

Menurut tingkatan keturunannya Koentjoro hanya boleh memasuki Sekolah Kelas I (Sekolah Desa 5 tahun atau *Volks-school*). Ayahnya R. Mangunpranoto hanya sekolah sekedar tahu menulis dan membaca. Bekerja sebagai pegawai menengah Mantri Hewan, karena ia disegani oleh Belanda dan mempunyai hubungan baik dengan Bupati Ponorogo. Jadi Koentjoro masuk ke ELS Ponorogo itu bukan atas dasar tingkatan keturunan, tetapi adalah atas bantuan Bupati Ponorogo yang akhirnya mendapat beasiswa karena kepandaiannya yang meyakinkan. Bupati Ponorogo juga melihat Koentjoro dalam gerak langkah dan cara brebicara tambah memperlihatkan gejala kepintarannya. Oleh sebab itulah Bupati Ponorogo sangat menaruh perhatian kepada kemajuan Koentjoro di kemudian hari. Oleh sebab itu pulalah seperti yang dikatakan tadi bahwa Koentjoro bersekolah di ELS mendapat beasiswa (*buers leerling*) yang diperikarakan pasti berasal dari Bupati dan Pemerintah Ponorogo.

Sampai ujian terakhir ELS Ponorogo Koentjoro berhasil dengan amat baik. Inilah yang mengantarkan ia memasuki *Rechtsschool* di Jakarta. Perlu juga kita ketahui bahwa Koentjoro dari ELS tidak masuk ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderijs*) dulu tetapi langsung ke *Rechtsschool* di tingkat persiapan dalam usia 14 pada tahun 1921.¹¹

Rechtsschool (Sekolah Menengah Hukum) didirikan oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz pada tanggal 26 Juli 1909 dengan maksud mendidik anak-anak pribumi menjadi hakim di *Landraad*, yang sekarang dinamakan Pengadilan Negeri.

Rechtsschool yang semula bernama *School Tot Opleiding voor Inlandsche Rechtskundigen* tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu bagian Persiapan (*Voorbereidende Afdeeling*) dan bagian Ilmu Hukum (*Rechtskundige Afdeeling*). Bagian Persiapan terdiri dari tiga kelas, begitu juga bagian Ilmu Hukum. Jadi jumlah pelajaran seluruhnya enam tahun. Bagian persiapan menerima murid dari Sekolah Belanda seperti ELS dan HIS. Sedangkan bagian Ilmu Hukum menerima murid-murid dari

bagian Persiapan, dari MULO (Sekolah Menengah Pertama) dan OSVIA (*Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren*) atau Sekolah Menengah Pamongpraja.

Guru-guru Bagian Persiapan ini bukan *Meester in de rechten* (Mr.), melainkan guru-guru untuk sekolah menengah, umumnya mempunyai ijazah *Hoofd-Acte* untuk mengajar. Mata pelajaran yang diberikan pada Bagian Persiapan antara lain aljabar, ilmu ukur, sejarah, ilmu bumi, ilmu alam, bahasa Belanda dan bahasa Perancis.

Guru-guru pada Bagian Ilmu Hukum semuanya *Meester in de rechten* (MR), Mr. A Heyman memberikan pelajaran Hukum Pidana; Mr. J.J. De Vries memberikan pelajaran Hukum Perdata Eropa; Mr. H.J. Spot memberikan pelajaran Hukum Adat dan Mr. C.C. Helsdingen memberikan Hukum Tata Negara.¹²

Gedung *Rectsschool* tersebut terletak di Jalan Gambir Selatan no. 10 atau sekarang Jalan Medan Merdeka Selatan. Semua murid *Rechtsscholl* itu ditempatkan dalam satu asrama, di belakang gedung sekolah. Disiplin asrama sangat keras, semua murid diawasi oleh salah seorang guru. Hari Minggu dan hari libur, murid-murid diperbolehkan meninggalkan asrama.

Semua murid *Rechtsschool* diwajibkan menjadi anggota perkumpulan *De Gezelligheid*. Tujuan perkumpulan tersebut untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hal pelajaran. Sekali setahun dalam bulan Desember perkumpulan ini menyelenggarakan suatu perayaan dengan berbagai pertunjukan hiburan.

Di samping itu ada perkumpulan yang bernama *De Rederijker* dipimpin oleh salah seorang guru, yaitu Mr. Van Helsdingen. Tujuan perkumpulan ini ialah untuk melatih para anggota berbicara, mengemukakan pendapat dan berdiskusi. Tiap anggota secara bergiliran memberikan ceramah terutama dalam bidang Hukum.¹³

Pada waktu itu di Jakarta di antara murid-murid sekolah

menengah ada perkumpulan yang bernama *Tri Koro Dharmo* yang kemudian menjelma menjadi *Jong Java*. Yang menjadi anggota perkumpulan ini ialah orang-orang yang berasal dari Pulau Jawa dan menduduki sekolah menengah. Pada waktu itu di Indonesia belum ada perguruan tinggi.

STOVIA (*School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) atau Sekolah Dokter Hindia yang didirikan jauh sebelum *Rechtsschool* didirikan. STOVIA ini bertempat di *Weltevreden*, kini Jalan Abdurrahman Saleh no. 26 Jakarta Pusat. Sekolah ini banyak menampung calon dokter yang kelak mengambil bagian penting dalam Pergerakan Nasional setelah mereka mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian didirikan pula NIAS (*Nederlandsch Indische Artsen School*) pada tahun 1933 di Surabaya.

Di samping sekolah-sekolah tersebut di atas, Pemerintah Hindia Belanda mulai memikirkan bagaimana orang-orang bumiputra atau orang pribumi (Indonesia) dididik menjadi hakim sehingga mereka dapat mendalami pikiran dan adat istiadat yang terkandung dalam kalangan bumiputra sendiri waktu mengadili perkara. Terasa bahwa para hakim kolonial dalam mengadili sesuatu perkara, biasanya lepas dari adat istiadat yang melekat pada sesuatu kasus karena perasaan superioritas sebagai bangsa penjajah.

Berdirinya (*Rechtsschool*) tentu tidak berjalan mudah saja, tetapi dilatar-belakangi berbagai peristiwa baik yang mendorong maupun yang menghalanginya. Pada tanggal 15 Januari 1907 Pemerintah Belanda mengajukan sebuah rancangan Anggaran Belanja tahun 1907 untuk Hindia Belanda dengan menambahkan anggaran untuk mendirikan suatu *School Tot Opleiding voor Indlandsche Rechtskundigen*. Usul pendirian Sekolah Hukum ini mendapat tantangan cukup berat dari pihak konservatif dalam *Tweede Kamer*. Setelah mendapat penjelasan yang cukup meyakinkan dari Menteri Jajahan Idenburg maka pada tanggal 13 Nopember 1907 diterimalah rancangan itu

menjadi Undang-Undang oleh *Tweede Kamer* tanpa pemungutan suara. Dengan demikian terbukalah jalan bagi berdirinya *Rechtsschool*.

Dalam sidang *De Eerste Kamer* Menteri Jajahan Idenburg menegaskan bahwa *Rechtsschool* bukanlah menerima siswa dari keluarga *Inlander* biasa melainkan dari keluarga bangsawan. Karena itu dapat dimengerti adanya seleksi yang ketat dalam penerimaan siswa. Untuk pertama kali hanya diterima sebanyak 17 siswa dari 62 calon.¹⁴ Siswa yang diterima hanya berasal dari Jawa dan Madura. Mulai tahun 1915 barulah diterima siswa dari luar Jawa dan Madura.

Koentjoro Poerbopranoto tamat dari ELS Ponorogo dalam *ranking* pertama. Walaupun dites masuk *Rechtsschool* di Jakarta secara ketat, ia dapat melaluinya. Tahun 1921 dengan mudah ia masuk *Rechtsschool*. Koentjoro selama di ELS sudah selalu menjaga disiplin belajar yang teratur, hingga menghadapi *Rechtsschool* bukan menghadapi barang baru. Belajar keras merupakan pekerjaan rutin yang pernah dilakukannya selama ini. Tahun 1927 Koentjoro tamat dari *Rechtsschool* dengan nilai dan prestasi yang cukup baik. Setelah itu ia bekerja sebagai *ambtenaarter beschikking* di *Landraad* Surabaya sampai 1 September 1928.¹⁵

Pada tanggal 28 Oktober 1924, dibuka *Rechts Hoge School* (Sekolah Hakim Tinggi yang disebut juga Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta. Pembukaan sekolah baru ini berpedoman kepada laporan suatu komisi yang sengaja dibentuk untuk menjajaki rencana pembentukan Sekolah Tinggi Hukum tersebut.

Koentjoro Poerbopranoto menyelesaikan *Rechtsschool* pada tahun 1927 setelah tiga tahun dibukanya *Rechts Hoge School* (RHS). Kemudian Koentjoro bekerja selama satu tahun tiga bulan sebagai pegawai pada *Landraad* Surabaya. Kemajuan dan prestasi kerjanya sangat meyakinkan bagi pertumbuhan pengadilan khususnya dan pemerintahan pada umumnya,

karena itu pemerintah memberi tugas belajar kepada pemuda Koentjoro untuk belajar di *Rechts Hoge School* (RHS).

Pada tanggal 1 September 1928 pemuda Koentjoro diberikan cuti tugas belajar ke RHS Jakarta. Tahun 1933 pemuda Koentjoro selesai menggondol gelar *Meester in de rechten* (Mr.) dengan spesialisasi Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan Spesialisasi Ekonomi (menurut reporter Hukum di Surabaya ketika berhasil mewawancarai Prof.Mr. Koentjoro Poerboprano di rumahnya Juli 1965). Sedangkan menurut arsip/catatan almarhum, Malang, 8 Juli 1959 dan salinan Ijazah almarhum, Batavia 29 April 1933 (lihat lampiran skripsinya *Specialisasi Ilmu Hukum Negara*. Apa pula kata Presiden Universitas Airlangga Prof.Mr. A.G. Pringgodigdo melalui buku "Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi" Penerbit Universitas Airlangga Surabaya tahun 1960 gelar *Meester in de rechten* atau Mr. Spesialisasinya adalah Ilmu Hukum Ketatanegaraan.

Setelah bergelar *Meester in de rechten*, Koentjoro tidak kembali bekerja di *Landraad* Surabaya, tetapi bekerja sebagai pegawai bulanan di *Departemen Onderwijs en Eeredienst* (Dept. O & E) atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta sampai tahun 1955. Kemudian ia pindah bekerja sebagai Pegawai Tinggi *Volksraad* (Dewan Rakyat) Jakarta sampai dengan tahun 1941. Sesudah itu diangkat sebagai Wakil Walikota *Gemeente* Semarang. Pada zaman pendudukan Jepang menjadi Ketua Kotapraja Semarang, Pegawai Tinggi Kantor Gubernur Jawa Tengah, disertai tugas Pejabat Sementara Sekretariat BPKNIP di Yogyakarta sampai dengan tahun 1948. Selanjutnya menjadi Pegawai Tinggi Kotapraja Jakarta Raya dan Pegawai Tinggi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Republik Indonesia (RI), keduanya sampai dengan tahun 1955.

Tahun 1955 sampai dengan tahun 1958 Mr. Koentjoro Poerboprano diangkat menjadi Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris (Perancis). Selama

bertugas di Paris Mr. Koentjoro Poerbopranoto masih berkesempatan meneruskan studinya menuntut ilmu pengetahuan dengan belajar di *College European des Science Sociales et Economiques, Universite de Paris*. Studi Mr. Koentjoro Poerbopranoto selesai di Paris pada tahun 1957.

Pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1960 diangkat sebagai Pegawai Tinggi Kementerian P.P dan K diperbantukan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya merangkap sebagai Pejabat Ketua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Airlangga (UNAIR) di Malang. Kemudian mendapat gelar Professor di Malang selaku dekan 13 Oktober 1960 dengan pidato inaugurasi: "*Hubungan Warga Negara dan Pemerintah*".¹⁶

Oleh karena ketekunan, ketabahan, percaya pada diri dan lain-lain perbuatan yang terpuji, Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto telah mendapat pengukuhan Lencana Sátya Bhakti Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pengukuhan dan penyerahan tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. yang disaksikan oleh rektor dan para pimpinan Universitas Airlangga.¹⁷

Dalam keputusan disebutkan, pengukuhan tersebut dikarenakan jasa-jasa Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto telah ikut aktif mengembangkan Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya. Pada tahun 1972 Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto juga telah mendapatkan Lencana Satya Bhakti Fakultas Universitas Airlangga.

Menyinggung pengabdian yang diberikan oleh Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, Dekan Fakultas Hukum itu mengatakan bahwa meskipun sekarang sudah lanjut usia, namun beliau masih terus memberikan pengabdiannya pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Usia itu tidak menjadi halangan bagi beliau untuk terus melakukan pengabdiannya. Berkat pengabdiannya itulah akhirnya Fakultas Hukum Universitas Airlangga dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga yang harus diperhitungkan oleh masyarakat sekelilingnya.

Jadi kalau kita perhatikan Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto dalam menuntut ilmu, sebagai penganut agama Islam tetapi memegang prinsip tuntutan ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Sebagai warganegara yang baik ia menuntut ilmu sesuai dengan prinsip Garis-Garis Dasar Haluan Negara (GBHN) menuntut ilmu seumur hidup. Sebagai manusia yang beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapatlah dikatakan, bahwa Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto sudah mengamalkan ajaran untuk menuntut ilmu sejak dari si jabang bayi dalam perut ibunya sampai ke liang kubur.

Demikian asal-usul dan riwayat pendidikan yang cukup rumit tetapi unik dari Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto. Hal ini sungguh sangat perlu diketahui oleh generasi penerus sebagai bahan perbandingan dan perlu kiranya kita contoh mana yang baik dan kita buang mana yang dianggap tidak baik.

BAB II KEGIATAN SELAMA MASA PELAJAR DAN MAHASISWA

2.1 *Aktif dalam Perhimpunan Kesenian, Organisasi Pelajar dan Pemuda*

Sewaktu masih sekolah di ELS bahkan sebelumnya Koentjoro senang menikmati segala bentuk kesenian, terutama kesenian Jawa seperti seni perwayangan, baik wayang orang maupun wayang kulit. Dalam seni pewayangan ini bukan hanya senang melihat dan mendengar, tetapi juga aktif sebagai pemain yang memegang peranan sebagai dalang dan sebagainya.

Di kala sedang menekuni pelajaran di ELS dan *Rechtsschool* Bagian Persiapan Koentjoro juga penggemar kesenian Jawa *kleningan*. Lagu-lagu kleningan itu merupakan lagu-lagu untuk bersenang-senang saja atau menyenangkan seperti lagu pelepur lara. Lagu-lagu itu diantaranya *Asmorodono*, *Gambirsawit*, *Puspowarno* dan sebagainya.¹

Dalam lingkungan *Rechtsschool* di Jakarta dibentuk perhimpunan kesenian Jawa Krido Yatmoko dan Langen Siswo serta Krawitan sekitar tahun 1910. Sedangkan Koentjoro melibatkan diri menjadi anggota kemudian ketua perhimpunan kesenian Jawa Krido Yatmoko dan anggota Langen Siswo serta Krawitan sekitar tahun 1921 – 1927.²

Krido Yatmoko merupakan perkumpulan gamelan dan wayang orang yang termasuk seni pedalangan. Koentjoro lebih banyak berperan sebagai dalang sesuai dengan kerampingan tubuhnya.

Langen Siswo merupakan tempat pertemuan pelajar-pelajar sekolah menengah yang berasal dari Jawa. Kadangkala juga Langen Siswa tempat untuk mengadakan paduan suara pelajar-pelajar yang berasal dari Jawa. Tempat Langen Siswo di Jalan Kramat Raya sekarang ini.

Krawitan merupakan perkumpulan gamelan, wayang orang, serta joget. Krawitan ini sangat digemari oleh pemuda Supomo yang kemudian kita kenal sebagai Prof.Dr.Mr. R. Supomo ahli Hukum Adat.

Bentuk-bentuk organisasi kesenian ini juga termasuk alat perjuangan dan propaganda secara tidak langsung. Gamelan, wayang orang, paduan suara, joget dan lain-lain merupakan sarana yang dapat menggugah hati sanubari rakyat untuk membangkitkan rasa patriotismenya. Sebagaimana telah kita ketahui dalam sejarah, gamelan dan wayang memegang peranan penting dalam penyiaran dan pengembangan agama Islam di pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya.³

Organisasi kesenian cukup jelas sasarannya sebagai alat perjuangan dan propaganda. Bagaimana

pula peranannya dalam pergerakan nasional melawan penjajah? Perlu kita ketahui bahwa pemuda dalam pergerakan nasional merupakan Angkatan Pelopor, baik para pemuda dari Jawa dan Sumatera, maupun dari daerah lain, Maksud dan tujuan perjuangannya adalah sama hanya mungkin caranya yang berbeda.

Tri Koro Dharmo pada waktu itu dinilai sebagai pelopor kebangkitan organisasi-organisasi pelajar dan pemuda di pulau Jawa. Tri Koro Dharmo didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 oleh dr. Satiman Wiryo-sandjojo, Saudara kandung dr. Sukiman Wiryo-sandjojo. Tri Koro Dharmo atau tiga tujuan mulai, yaitu *Sakti*, *Budi* dan *Bakti*.

Sakti, artinya kekuasaan yang menimbulkan keluhuran dan kesucian dalam langkah organisasi. Kesaktian merupakan jalan langkah kesatriaan yang berwajib menjaga dan meninggikan kebudayaan baik rohani maupun jasmani dan menjunjung tinggi segala hak tanah air dan bangsa.

Budi, artinya akal dan langkah yang suci. Budi merupakan kebijaksanaan yang meluaskan segala pemandangan, menyehatkan pikiran dan menahan hawa nafsu.

Bakti, artinya keteguhan dan kecintaan. Teguh dan cinta menguatkan kepercayaan, membinasakan segala rintangan dan kesusahan. Bakti menimbulkan kekuatan yang tiada dapat diketahui, yang tersembunyi di dalam hati sanubari kita semua.

Ketiga jampe dan mantra: Sakti, Budi dan Bakti, berkumpul menjadi satu dapat menimbulkan kekuatan yang sebesar-besarnya yang dapat mencapai cita-cita yang maha luhur itu.⁴

Itulah kira-kira maksud Tri Koro Dharmo dengan tiga tujuan mulianya sakti, budi dan bakti,

yang merupakan senjata ampuh dalam melaksanakan perjuangan organisasi yang ikut melepaskan rakyat dari penjajahan Belanda.

Tri Koro Dharmo secara sepintas tampak seperti lebih merupakan organisasi yang bersifat kesukuan yaitu suku Jawa saja. Padahal di pulau Jawa bukan hanya terdapat suku Jawa saja, tetapi juga suku lain, seperti suku Sunda, Madura dan suku lain yang datang ke pulau Jawa ini.

Oleh sebab itu pada tahun 1918 Tri Koro Dharmo berubah namanya menjadi Jong Java yang bersifat menyeluruh untuk seluruh pulau Jawa dan Madura. Jong Java berusaha mempertahankan Kebudayaan Jawa secara menyeluruh begitu juga anggotanya tidak terbatas pada suku Jawa saja. Jong Java juga dalam maksud dan tujuannya (pada jangka panjangnya) mencapai kebahagiaan semua suku yang ada di pulau Jawa. Buat sementara kebahagiaan itu masih berpusat pada masyarakat suku Jawa, sambil menunggu anggota dari suku-suku yang lain. Jong Java memang berjuang untuk suatu masyarakat yang bahagia, adil dan makmur seperti zamannya Ratu Adil. Sementara itu para anggota dari Jawa Barat dan Madura merasa perlu untuk menggairahkan kebudayaan daerahnya juga. Para pelajar Jawa Barat lalu mendirikan organisasi *Sekar Rukun* (Pemuda Sunda) dan para pelajar Madura mendirikan *Pemuda Madura*. Mulai tahun 1920 cita-cita Jong Java makin berkembang ke arah cita-cita kebangsaan Indonesia. Jong Java tegas mulai melepaskan kesukumannya.

Koentjoro juga seorang yang aktif dalam Jong Java khususnya sejak tahun 1921. Kemudian pada tahun 1927 - 1929 ia dipilih sebagai Ketua Pengurus Pusat Jong Java di Jakarta. Ternyata kepemimpinan

Koentjoro itu adalah yang terakhir, karena Jong Java meleburkan diri ke dalam Indonesia Muda.

Pedoman Besar identik dengan Pengurus Besar (PB). Sekarang lebih lazim digunakan istilah Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Tingkat I (Propinsi) dan DPD Tingkat II (Kabupaten dan Kotamadya).

Koentjoro pernah duduk dalam Komisi yang akan menyusun Buku Peringatan (*Gedenkboek Jong Java 1915 – 1930*). Pada masa ini Jong Java sudah tidak berdiri lagi, tetapi telah bersatu ke dalam *Indonesia Muda*. Ketika itu dalam hati Koentjoro timbul dua buah perasaan :

1. Keinsyafan bahwa sudah sepatutnya perkumpulan Jong Java yang pernah membuat jasa untuk bangsa dan tanah air Indonesia itu diperingati dengan seluas-luasnya;
2. Kekhawatiran dapatkah dilaksanakan usaha menerbitkan buku yang patut menjadi peringatan yang berguna tentang perjuangan Jong Java yang mulia itu.

Pada akhirnya Koentjoro yakin bahwa keputusan mengeluarkan Buku Peringatan itu cukup bijaksana. Koentjoro juga berpendapat buku ini tidak hanya berguna bagi perkumpulan Jong Java, tetapi berfaedah juga bagi pergerakan pemuda secara keseluruhan di masa yang akan datang. Karena itu ia tak ragu-ragu menerima tugas yang dibebankan kepadanya.⁵

Pada gambar kulit Buku Peringatan itu jelas kelihatan keris terhunus yang bersinar disekelilingnya, bulir padi, cabang kapas, roncean bunga melati dan kembang kantil, serta di bawahnya ada tiga perkataan Sakti, Budi dan Bakti. Gambar tersebut mempunyai

arti walaupun Jong Java sudah tidak ada, namun cita-cita yang suci dan luhur itu akan tetap tidak terlupakan oleh bangsa Indonesia.

Koentjoro Poerbopranoto adalah Ketua Pimpinan Pusat Jong Java pada tahun penghabisan, yaitu tahun 1929. Bagaimana pandangan Koentjoro sehubungan dengan perjuangan Jong Java terhadap Tanah Air Indonesia ?

Koentjoro Poerbopranoto mengatakan bahwa Jong Java telah berkorban terhadap Tanah Air Indonesia. Sejarahnya adalah sebagai berikut.

Bintang baru memancarkan sinarnya menerangi alam Indonesia. Jong Java dilahirkan dari pikiran seorang murid STOVIA yang bijaksana. Jong Java dengan bijaksana dan perlahan-lahan selalu menghindarkan bahaya, serta berhati-hati meraba dalam gelap gulita. Pada mulanya pemuda Satiman bersama-sama dengan kawan-kawannya yang telah bangun pula, melangkahakan kaki menuju hidup pergerakan yang amat sulit itu. Ia mengetahui benar, bahwa pekerjaan ini seolah-olah mustahil, tetapi kepercayaannya tetap teguh, bahwa tidak ada yang akan melarang maksudnya. Satiman bercita-cita akan mengadakan suatu organisasi antara pemuda-pemuda Indonesia yang masih belajar, akan menguntai kembangnya rakyat Indonesia menjadi suatu rangkaian yang teguh dan cantik. Dengan jalan demikian terciptalah dan tersebarlah bibit pemimpin sejati untuk keperluan bangsa dan tanah air.

Pikiran persatuan dalam perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia yang baru didirikan itu memuat tiga asas, yakni :

1. menimbulkan pertalian antara murid-murid bumiputra pada sekolah menengah;

2. menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya;
3. membangkitkan dan mempertajam perasaan untuk segala bahasa dan kebudayaan Indonesia.

Sejalan dengan maksud yang tiga ini, maka pada tanggal 7 Maret 1915 bayi yang baru lahir itu dinamai Tri Koro Dharmo, artinya tiga tujuan mulia, yaitu Sakti, Budi dan Bakti.

Ketika Tri Koro Dharmo lahir bagi Satiman masih belum jelas benar, seberapa dalam dan tingginya pikiran persatuan bangsa Indonesia waktu itu. Namun Satiman sendiri memberi keterangan, Tri Koro Dharmo bukan semata-mata bernafas dan berpola alam Jawa saja. Ternyata kemudian Tri Koro Dharmo bersama perkumpulan pemuda-pemuda lain telah berkembang menjadi suatu perkumpulan buat pemuda-pemuda Indoensia di seluruh Nusantara. Satiman pernah berkata, „ Dengan lahirnya Tri Koro Dharmo haruslah dipikirkan suatu perkara yang penting, yakni mencari pertalian dan persaudaraan dengan pemuda-pemuda selain pulau Jawa untuk memperkokoh perhubungan persaudaraan rakyat Indoensia. Tri Koro Dharmo sangat mengharapkan timbulnya tanda-tanda keinginan dari pihak pemuda-pemuda selain pulau Jawa untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia”.⁶

Sangat disayangkan apa yang dikemukakan oleh Satiman dalam majalah Tri Koro Dharmo nomor 3 untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia waktu itu seakan-akan dilupakan. Setelah beberapa tahun kemudian para pengurus Tri Koro Dharmo terlalu memegang teguh pada pasal 4 Statuten (AD/ART) dari Tri Koro Dharmo yang hanya menyebutkan : „Anggota Tri Koro Dharmo hanya pelajar-pelajar Bumiputra Jawa dan Madura saja”.⁷

Akibatnya pasal 4 Statuten Tri Koro Dharmo membuka peluang bagi berkembangnya paham kedaerahan yang berbahaya bagi semangat persatuan bangsa.

Alam pikiran Tri Koro Dharmo juga bertambah sempit lagi disebabkan adanya peraturan bahwa karangan-karangan dalam bahasa Sunda baru boleh dimuat dalam majalah Tri Koro Dharmo kalau jumlah anggotanya yang berasal dari Pasundan lebih dari 50 orang. Peraturan yang semacam ini tentu saja sangat mempersempit gerak langkah perjuangan Tri Koro Dharmo dan mendatangkan perasaan yang tidak menyenangkan bagi para pemuda Sunda. Maka untunghlah kekurangan ini segera dilenyapkan serta nama Tri Koro Dharmo ditukar dengan Jong Java. Perubahan ini dilakukan dalam kongres yang pertama di Solo pada tahun 1918, yang akibatnya dapat memupuk kerja di antara para pemuda dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Pasundan, Bali dan Lombok.⁸

Setelah Jong Java berumur barulah diketahui dan dirasakan orang betapa besarnya semangat persatuan Indonesia. Juga Jong Java telah mulai bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya serta mempropagandakan persatuan dengan sekuat tenaga. Sebagai hasil usaha ini terjadilah perubahan Pasal 3 dalam Statuten Jong Java pada kongres yang ke VIII di Bandung, sehingga semangat persatuan dimuatkan dalam maksud dan tujuan perkumpulan, yang akhirnya Pasal 3 berbunyi :

„mengoeshakan soepaja anggota-anggota Jong Java nanti tersedia boeat menolong membangoen Jawa Raja dan mengoeatkan perasaan persatoean di antara bangsa-bangsa Indonesia soepaja kelak sampai ke Indonesia Merdeka.”⁹

Perubahan ini pun belumlah mencukupi rasa-rasa yang terkandung dalam hati sanubari anggota-anggota Jong Java, karena pintu Jong Java masih belum terbuka sama sekali untuk menerima pemuda pelajar lain dari luar Jawa atau dari seluruh Indonesia. Maka bekas Ketua Jong Java Sumarto mengajukan usul pada Kongres Pemuda yang pertama di Jakarta pada 30 April 1926, untuk mendirikan suatu perkumpulan yang akan merupakan wadah segala perserikatan pemuda yang pada masa itu berada di Indonesia. Hasil pemikiran baru ini ialah lahirnya organisasi Pemuda Indonesia di Bandung pada tanggal 27 Pebruari 1927. Tujuan organisasi Pemuda Indonesia ini ialah menyebarkan dan memperkuat persatuan di antara putra-putra dan putri-putri Indonesia.

Sementara itu para mahasiswa sekolah tinggi di Jakarta mendirikan organisasi pula, yakni Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) dengan maksud menggalang semangat persatuan Indonesia. Pada zaman itu sebutan untuk mereka yang belajar di sekolah tinggi adalah pelajar (student) istilah mahasiswa belum lahir.

Jadi buat Koentjoro Poerbopranoto dan mereka yang berpikiran sehat dan bertelinga terbuka, serta berhati lapang dan pandai melihat ke depan maka persatuan Indonesia itu sekali-kali bukanlah suatu angan-angan, tetapi suatu barang yang boleh dilihat dan dirasakan. Hal yang konkrit.

Dalam lingkungan Jong Java segala keadaan itu sebagai cemeti rasanya. Para anggota merasa tak puas lagi dalam alam kejawaan yang sempit itu. Mereka bergiat melaksanakan cita-cita Indonesia ini. Karena itu pada Kongres Jong Java yang ke X diajukan suatu usul, untuk mengadakan suatu fusi dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda yang lain.

Dua bulan sesudah Pemuda kedua 27 - 28 Oktober 1928 di Jakarta Pimpinan Pusat Jong Java membuka Kongres yang ke - XI di Mataram (Yogyakarta). Kongres memilih Koentjoro Poerboprano sebagai Ketua Pimpinan Pusat Jong Java. Pada Kongres yang ke XI ini diambil keputusan, Jong Java akan meleburkan dirinya dalam suatu badan persatuan bersama-sama dengan perserikatan-perserikatan pemuda yang lain.

Pemikiran Koentjoro Poerboprano untuk menggalang persatuan dan kesatuan tidak hanya sampai di situ saja. Pada awal tahun 1929 dimulai mendirikan Komisi Persediaan. Atas undangan Pimpinan Pusat Jong Java yang diketuai oleh Koentjoro Poerboprano sebagai Ketua, utusan-utusan Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, dan Jong Java membuka rapat yang pertama di pavilyun XXX *Indonesisch Clubgebouw* Jakarta pada tanggal 23 April 1929. Rapat memutuskan supaya Komisi Persediaan diganti dengan Komisi Besar Indonesia Muda.

Sebagai langkah pertama Komisi Besar Indonesia Muda mengeluarkan Buku Iklan (Buku Siaran). Dalam buku ini diterangkan dengan panjang lebar bagaimana caranya mempersatukan perkumpulan-perkumpulan yang tergabung dalam Komisi Besar Indonesia Muda dan caranya mendirikan perkumpulan baru : Indonesia Muda. Dalam Buku Iklan itu juga memuat Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan Indonesia Muda. Komisi juga menyebarkan beberapa surat siaran berisi anjuran untuk mempersatukan semua organisasi kepanduan bangsa Indonesia.

Itulah sumbangan pemikiran Koentjoro Poerboprano selaku ketua Jong Java untuk membangun

dan membina semangat persatuan pemuda-pemuda Indonesia.

Sekarang bagaimana pula pandangan Koentjoro Poerbopranoto atas kegiatan dan pekerjaan Jong Java selama berdirinya kurang lebih lima belas tahun itu ?

Pertama Koentjoro mengemukakan tentang majalah organisasi yang terbit untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Nopember 1915. Pada mulanya majalah bernama *Tri Koro Dharmo*. Karena terjadi perubahan nama organisasi maka nama majalah ditukar menjadi *Majalah Jong Java*.

Dalam majalah itu semangat organisasi tergambar dengan jelas. Majalah juga merupakan sumber informasi dan alat komunikasi yang mempertalikan Pimpinan Pusat dengan cabang-cabang serta para anggota. Selain itu majalah juga merupakan medan bagi kemajuan anggota-anggotanya untuk menambah ilmu pengetahuan. Jumlah majalah yang dicetak setiap terbitnya berkisar sekitar 3000 eksemplar.

Kemudian Jong Java, juga mendirikan fonds nasional pada tahun 1920. Pengumpulan dana bertujuan untuk menterjemahkan buku-buku yang terkenal dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, umpamanya buku-buku karangan R.A. Kartini. Rupanya fonds nasional itu tidak begitu memenuhi selera seperti yang diharapkan, sehingga Kongres Jong Java yang ke VIII di Bandung mengambil keputusan untuk mengubah nama fonds nasional menjadi Jong Java Studiefonds. Keputusan ini rupanya tepat dan mencapai kemajuan yang besar. Fonds banyak memberikan pertolongan kepada kepentingan rakyat banyak. Melalui usaha pandu-pandu dan pemuda-pemuda lain, serta banyaknya simpati yang diterima oleh Jong Java dari berbagai perkumpulan Indonesia

dan lapisan masyarakat, akhirnya Jong Java Studie-fonds mempunyai modal lebih dari F 3000,00 (tiga ribu gulden) suatu jumlah yang besar bagi organisasi pemuda pada waktu itu. Fonds ini telah sanggup memberi pertolongan kepada 11 orang pemuda-pemuda Indonesia untuk meneruskan pelajarannya.¹⁰

Koentjoro sebagai ketua *Jong Java* juga memasukkan *Kepanduan Jong Java* ke dalam *Nationale Padvinders Organisatie (NPO)*. Kepanduan Jong Java atau *Jong Java Padvinders* ini semakin lama makin besar, sehingga dalam Kongres ke IX masalah kepanduan perlu diatur tersendiri.

Lambang Jong Java Padvinders adalah sebagai berikut : Keris bersinar yang menjadi tanda pandu pada umumnya. Hijau hitam warna pakaian, sedang merah putih warna kebangsaan yang berkibar-kibar sebagai bendera *Jong Java Padvinders (JJP)*. Suatu kenyataan besar bahwa badan kepanduan ini merupakan suatu institut pendidikan yang berguna sekali dalam tubuh Jong Java. Di bawah pimpinan *Centraal Bestuur* (seperti Kwartir Nasional dalam Pramuka) jumlah anggota JJP pada tanggal 31 Mei 1929 tercatat 1030 orang.¹¹

Selama Jong Java dipimpin oleh Koentjoro di samping memikirkan kegiatan rohani, juga tidak lupa pada kegiatan jasmani, seperti olahraga, seni, dan ketrampilan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh putera-putera tetapi juga oleh puteri-puteri Jong Java, Pada tiap Kongres Jong Java selalu dipamerkan hasil kerajinan para putri Jong Java seperti kerajinan tangan dan membatik, serta diperlihatkan ketangkasan berolahraga. Di cabang-cabang Jong Java didirikan berbagai kursus dan sekolah dengan memakai daftar pelajaran yang cukup luas. Sumbangan Jong

Java untuk memberantas tuna aksara (alphabetisme) dan mencerdaskan kehidupan bangsa, cukup besar bagi pemuda-pemuda dan rakyat Indonesia.

Demikianlah sedikit cuplikan sikap Koentjoro dalam menerima benih persatuan. Jong Java selama masa berdirinya yang lima belas tahun itu telah menjalankan darma baktinya dengan gemilang. Pergabungan yang sempurna dengan perserikatan-perserikatan pemuda-pemuda lain akan menumbuhkan dan membuahkannya suatu organisasi yang besar dan kukuh yang mengayomi dan meliputi seluruh pemuda kita di Indonesia. Organisasi yang dibentuk adalah organisasi baru bernama *Indonesia Muda*.

Koentjoro insyaf sekali, bahwa persiapan untuk membangun dan menjunjung tinggi bangsa menghendaki pengorbanan dan jawaban yang cukup memadai rasa setia dan cinta kepada tanah air dan bangsa menghendaki bukti yang nyata. Di sini pulalah kesempatan bagi Jong Java untuk mengucapkan pujian dan terima kasih yang tak terhingga kepada Koentjoro Poerbopranoto pada khususnya dan Komisi Besar Indonesia Muda pada umumnya, yang dengan tekun dan tegas telah bekerja untuk persatuan dan kesatuan bangsa di dalam suatu zaman kolonial yang penuh dengan resiko dan ancaman.

Komisi Besar Indonesia Muda inilah yang telah menjunjung tinggi derajat bangsa Indonesia dan telah memberi paras kepada semangat persatuan Indonesia dengan jalan mengikat organisasi-organisasi pemuda dengan suatu tali pengikat yang kukuh dan kekal. Sudah pada tempatnyalah tiap pencinta tanah air Indonesia menjunjung tinggi pekerjaan Komisi Besar Indonesia Muda yang diketuai oleh Koentjoro serta memelihara semangat Indonesia Muda.

Kongres Jong Java ke XII berlangsung lain dari pada yang lain. Sebagian besar peserta memuji pekerjaan persiapan yang telah ditangani oleh Komisi Besar Indonesia Muda selama setahun. Dengan penuh kegembiraan dan antusiasme para peserta kongres merintis secara aklamasi baik anggaran dasar maupun anggaran Rumah Tangga Indonesia Muda yang telah dipersiapkan oleh Komisi Besar Indonesia Muda di bawah pimpinan Koentjoro. Nyatalah ada persamaan perasaan di antara para pemuda. Pemuda-pemuda Jong Java mengerti benar pada panggilan zamannya dengan organisasi Indonesia Muda, para pemuda bekerja terus dengan hati gembira, melanjutkan perjalanan dengan keyakinan yang tetap, bahwa mereka selamanya siap untuk memeberikan pertolongan kepada tanah air dan bangsanya yang dicintainya.

Kongres Jong Java juga membicarakan hal-hal mengenai pembubarannya. Tidaklah gampang menyelesaikan perkara suatu organisasi seperti Jong Java, yang telah melahirkan bermacam-macam badan selama berdirinya lima belas tahun itu. Koentjoro merasa, bahwa baginya adalah suatu kewajiban buat menyatakan terima kasih kepada sesama anggota Pimpinan Pusat Jong Java yang telah bekerja dengan segala kegembiraan dan keikhlasan untuk organisasi. Menyelesaikan harta benda organisasi adalah suatu tambahan beban kerja bagi setiap anggota pengurus.

Dalam kongres pembubaran ini *Jong Java Studiefonds* diubah namanya menjadi *Studiefonds Untuk Menolong Pelajar-pelajar Indonesia*, dan dipersembahkan kepada putera-putera Indonesia pada umumnya sebagai suatu anugerah kecil dari Jong Java.

Jong Java Padvinders, yang menurut pandangan

Koentjoro sudah cakap berpisah dari induk organisasinya yang akan berpulang itu, memakai nama tua yaitu *Pandu Kebangsaan*, serta menerima amanat dengan selekas-lekasnya untuk mengadakan persatuan dengan kepanduan-kepanduan yang lain.

Sebagai organisasi pandu sejati yang setia memegang perkataannya, pada tanggal 8 Pebruari 1950 di Jakarta telah diadakan pelantikan Pengurus Besar Kepanduan Bangsa Indonesia (PB-KBI) yang terdiri atas kepanduan-kepanduan INPO, PPS dan PK (sebelumnya bernama JJP).

Tugas Kongres ke-XII, boleh disebutkan suatu masalah yang cukup luar biasa, yakni saat yang amat penting pada waktu penyerahan pimpinan organisasi oleh Pimpinan Pusat Jong Java kepada Komisi Besar Indonesia Muda (Pimpinan Pusat Jong Java adalah Koentjoro Poerbopranoto dan Ketua Komisi Besar Indonesia Muda adalah Poerbopranoto juga).

Bacalah siaran di bawah ini :

Semarang, 27 Desember 1929, tengah malam, Jong Java berpulang; seorang kesatria telah meninggal. Jong Java telah mempersembahkan korbannya yang maha besar terhadap kepada tanah air Indonesia yang kita cintai.

Dengan suara bulat kongresisten mengambil keputusan membubarkan organisasi Jong Java pada saat sesudah berhasil mencapai puncak gunung kebesaran dan kemuliaan.

Dalam kesunyian malam di kota Semarang, sedang segala pandu memberi saluut serta sekalian yang hadir mendengarkan sambil berdiri kepada putusan pembubaran yang dibacakan oleh pimpinan dari JJP, yaitu sebagai berikut :

Pertama :

Sejak dari saat ini organisasi Jong Java, dahulu bernama Tri Koro Dharmo, tidak berdiri lagi;

Kedua :

Sejak dari saat ini segala cabang organisasi Jong Java, dahulu bernama Tri Koro Dharmo, diserahkan kepada Komisi Besar Indonesia Muda;

Ketiga :

Sejak dari saat ini segala cabang Jong Java, dahulu bernama Tri Koro Dharmo, berdiri di bawah pemandangan Komisi Besar dan wajib bersatu di dalam organisasi Indonesia Muda.

Beratus-ratus kaum nasionalis Indonesia dapat menyaksikan wafatnya Jong Java pada saat itu. Pada saat itu juga mereka sekaligus menghadiri juga lahirnya anak yang telah lama dinanti-nanti, ialah anak yang cantik manis *Indonesia Muda*. Dengan lahirnya anak ini bermulalah bagi tanah air Indonesia zaman baharu *zaman Indonesia Raya*.¹²

2.2. Aktif dalam Organisasi Mahasiswa dan Pemuda

Setelah lulus dari Rechtschool Jakarta pada tahun 1927 Koentjoro Poerbopranoto bekerja sebagai pegawai di Landraad Surabaya mulai tanggal 1 Juni 1927. Pada tanggal 1 September 1928 ia mendapat beasiswa ke *Rechts Hoge School* (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Pada waktu mahasiswa ia menjadi anggota Club Indonesia di Jakarta (Kramat Raya sekarang) dari tahun 1927 – 1935. Sebagai mahasiswa Koentjoro mempunyai peran yang penting dalam Kongres Pemuda II di Jakarta (27 – 28 Oktober 1928) bersama-sama dengan Muhammad Yamin dan Wongsongoro.¹³

Koentjoro Poerbopranoto berkomentar tentang Kongres Pemuda I dan II di antaranya, "Bahwasanya semangat kesatuan di antara Perhimpunan-perhimpunan Pemuda Indonesia, bahwa mereka menjadi pendorong akan lahirnya satu generasi baru bangsa Indonesia yang besar dan yang tidak terpecah belah, itu sudah lama menjadi idam-idaman para pemuda Indonesia. Akan tetapi suasana kolonial khusus sesudah Perang Dunia ke I selesai, lebih menekan mereka dan mempersempit lagi kesempatan bergerak dan berorganisasi, lebih-lebih di kalangan pemuda pelajar. Maka dengan keadaan pemerintahan tangan besi kolonial Hindia Belanda dewasa itu kemungkinan bagi para pemuda untuk mengorbankan semangat persatuan di kalangan masing-masing maksimal hanya terbatas di kalangan perhimpunan-perhimpunan pemuda pelajar yang berazaskan kedaerahan atau kepulauan, dengan tujuan memajukan pelajaran atau kesenian/kebudayaan. Maklum tujuan politik, bahkan ide kebangsaan yang lebih luas dewasa itu dianggap tabu (pemali) dan dilarang sama sekali, sehingga mengucapkan perkataan "merdeka" di dalam satu rapat pemuda itu saja bagi PID (dinas politik kolonial) sudah cukup alasan untuk menutup dan membubarkan rapat tersebut.

Maka meskipun semangat untuk mencapai persatuan di kalangan pemuda itu sudah mulai timbul, namun secara organisasi belum dapat bangkit, sehingga bentuk perhimpunan pemuda-pemuda Indonesia sementara itu tetap bercorak kedaerahan seperti *Jong Soematanen Bond* (Pemuda Sumatera), *Jong Celebes* (Pemuda Sulawesi), *Sekar Rukun* (Pemuda Sunda), *Jong Java* (Tri Koro Dharmo) dan lain-lain.

Terdorong oleh semangat persatuan yang sedang timbul itu perhimpunan Jong Java dalam kongresnya

ke-8 di Bandung pada akhir tahun 1925 memutuskan untuk memperluas tujuannya, dan dalam pasal tentang maksud tujuan itu dimuatlah ide kesatuan itu sebagai berikut : "menyiapkan anggotanya untuk menghidupkan rasa persatuan di antara semua suku-suku bangsa Indonesia", sehingga kelak mencapai "Indonesia Merdeka". Keputusan Kongres Bandung yang amat progresif pada tahun 1926 disambut oleh tindakan spontan segolongan pemuda-pemuda Indonesia untuk mendirikan suatu perhimpunan baru berdasarkan kesatuan Indonesia, yakni perhimpunan Jong Indonesia (Pemuda Indonesia) di Bandung di bawah pimpinan Joesoepadi.

Pada tahun 1926 itu pergerakan kebangsaan seluruhnya dari kaum tua maupun pemudanya mendapat pukulan yang amat hebat dari pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menjatuhkan hukuman pengasingan dan pembuangan terhadap beratus-ratus bahkan beribu perintis pergerakan ke Merauke (Boven Digul) atau Tanah Merah dan tempat-tempat lain sebagai akibat pemberontakan rakyat di Sumatera Barat, Jawa Barat dan lain-lain yang bermaksud untuk menumbangkan pemerintahan kolonial Belanda. Juga beberapa pemimpin Partai Nasional Indonesia antara lain Bung Karno, telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah dihukum penjara oleh pengadilan kolonial Belanda di Bandung, Bung Karno dibuang ke Ende (Flores), kemudian dipindah ke Bengkulu.

Peristiwa pengasingan dan pembuangan para pemimpin pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan oleh pemerintah kolonial Belanda dewasa itu justru merupakan cambuk bagi para pemuda Indonesia untuk mempergiat usahanya dengan mempercepat

dinamika perjuangannya dan memperkeras pelaksanaan idea kesatuan antara seluruh pemuda Indonesia. Pada bulan Agustus 1926 oleh Jong Java mengusulkan kepada Komite Kongres Pemuda yang ke-I supaya dibentuk satu badan federasi antara semua organisasi pemuda Indonesia, tetapi usul itu belum berhasil. Kongres Pemuda Indonesia yang ke I dihadiri oleh tujuh organisasi pemuda, yaitu Pemuda Sumatera, Pemuda Sunda (Sekar Rukun), Pemuda Batak, Pemuda Minahasa, Pemuda Ambon, Pemuda Islam dan Jong Java, dan dipimpin oleh Mohammad Tabrani (dari Jong Java). Kemudian pada bulan Pebruari dan April 1927 berikutnya Jong Java mengajukan kemblai sebuah rencana kerja yang diperbaiki supaya semua organisasi pemuda mengusahakan sekuat tenaga untuk menyatukan diri dalam satu perhimpunan Pemuda Indonesia dan bersama-sama bergerak ke arah Indonesia merdeka.

Cita-cita serta usaha bersama ke arah kesatuan itu sudah satu tahun lebih direncanakan, tetapi tindak-lanjutnya belum dapat diwujudkan secara nyata. Kemudian atas dorongan kuat dari PPI (Persatuan Pelajar Pelajar Indonesia) untuk kedua kalinya semua top organisasi pemuda di Jakarta dikumpulkan. Dan diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia II di bawah pimpinan Soegondo Djojopoespito (Ketua PPI). Kecuali tujuh perhimpunan pemuda daerah pada Kongres Pemuda ke II, ikut pula PPI dan organisasi pemuda Kaum Betawi, jadi sebenarnya berjumlah sembilan buah organisasi pemuda.

Pada Kongres Pemuda Indonesia yang kedua itu Muhammad Yamin mewakili Pemuda Sumatera dan Koentjoro Poerbopranoto mewakili Jong Java. Rupanya Tuhan Yang Maha Kuasa telah mentakdir-

kan jatuhnya wahyu persatuan Indonesia pada saat itu kepada generasi muda kita untuk menjadi motor yang sanggup mendobrak jalan ke arah kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Pada akhir Kongres Pemuda Indonesia ke dua itu oleh sebuah panitia dirumuskan formula *Sumpah Pemuda* untuk pertama kalinya, ikut dalam perumusan itu ialah Muhammad Yamin waktu itu mewakili Pemuda Indonesia dan Joesoepadi juga mewakili Pemuda Indonesia, Rusmali dari Pemuda Sumatera, Mokoginta dari Pemuda Minahasa dan Koentjoro Poerbopranoto dari Jong Java.¹⁴ Formula Sumpah Pemuda dengan suara bulat diterima oleh kongres dan diikrarkan bersama secara khidmat pada tengah malam untuk dilaksanakan dalam organisasi dan kalangan pemuda kita masing-masing.

Pada Kongres Pemuda Indonesia kedua, 28 Oktober 1928 itu W.R. Supratman telah dikaruniakan sebuah ilham nasional yang gemilang dengan ciptaannya lagu Indonesia Raya, yang disumbangkannya kepada Kongres Pemuda Indonesia kedua. Lagu Indonesia Raya dalam naskah dan nada aslinya agak berlainan dengan naskah dan nada irama yang sekarang, karena telah disempurnakan. Untuk pertama kali Supratman membawakan lagunya dengan biolanya. Karena kerasnya kata-kata lagu itu maka pada malam itu hanya dilagukan secara instrumentalia saja.

Bagaimana peranan perhimpunan-perhimpunan mahasiswa dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua itu? Di atas telah disinggung betapa besar peranan PPPI di Jakarta selama berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia kedua pada 27 - 28 Oktober 1928. Tetapi wakil-wakil perhimpunan pemuda lain-lainnya juga berperan dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua itu, di antaranya adalah Muhammad

Yamin, Joesoepadi, Wongsonegoro, A.K. Gani, Soeharto, Soegiono, Koentjoro, Roesmali, Mokoginta, dan lain-lain.

Secara kebetulan segala pembicaraan dan persiapan lahirnya badan fusi antara semua pemuda Indonesia itu berlangsung di gedung pertemuan mahasiswa Indonesia atau Club Indonesia (Kramat Raya 106), yang sungguh mempunyai peranan historis.

Juga Perhimpunan mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda yang bernama *Perhimpunan Indonesia* (PI) telah melakukan peranan yang positif dalam mendorong generasi muda Indonesia ke arah kesatuan, baik moril maupun politik. Porses Politik terhadap mahasiswa Ali Sastroamidjojo dan Mohammad Hatta tahun 1926 di Den Haag bagi seluruh pemuda kita di Indonesia merupakan cambuk yang hebat untuk bangkit sebagai satu front pemuda yang kuat. Di bidang politik PI di luar negeri mengadakan kongresnya dengan pemuda-pemuda pelajar internasional di Brussel, Paris dan lain-lain. Wakil Indonesia antara lain Soedjarwo, yang pernah berperan penting dalam perjuangan Irian Barat di kemudian hari.

Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto di Malang pada tanggal 18 Desember 1962 telah membuat catatan tentang sekitar lahirnya Indonesia Muda terutama tentang prosedur, pembentukan kader, fusi dan persiapannya, sebagai berikut :

"Pada tanggal 23 April 1927 dalam satu sidang bersama antara wakil Pengurus Besar (Pengurus Pusat): *Jong Soematanen Bond*, (Pemuda Sumatera), *Jong Bataknen Bond* (Pemuda Batak), *Jong Ambon* (Pemuda Ambon), *Jong Minahasa* (Pemuda Minahasa), PPPI (mahasiswa), Pemuda Indonesia dan Jong Java

untuk membicarakan lebih lanjut usul Jong Java tentang rencana kerja dan rapat memutuskan :

- a. Indonesia merdeka harus menjadi ideal segala anak Indonesia.
- b. Segala perserikatan-perserikatan pemuda harus berdaya upaya menuju mempersatukan diri dalam satu perkumpulan.

Kemudian ada usul Jong Java (Tri Koro Dharmo) untuk melancarkan satu cara kerja dan prosedur fusi yang lebih tegas, lebih terperinci dan melalui satu masa peralihan yang singkat. Dalam Kongres Jong Java ke XI di Mataram diambil satu putusan prosedur dalam 15 pasal-pasal yang ternyata kemudian diterima juga oleh perhimpunan-perhimpunan pemuda lainnya yang inti sarinya adalah sebagai berikut :

- a. Agar membentuk satu badan fusi total antara semua perhimpunan-perhimpunan pemuda Indonesia melalui satu masa peralihan singkat guna peleburan dan pembentukan fusi itu.
- b. Akan dibentuk sebuah Komisi Persiapan. Tiap-tiap perhimpunan pemuda mengirimkan dua orang wakil dalam komisi.
- c. Tugas komisi ialah merencanakan segala persiapan untuk melancarkan peleburan perhimpunan-perhimpunan pemuda dan membentuk badan fusi. Untuk itu Komisi merencanakan satu program kerja dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga, mengatur hal badan-badan/ organisasi seazas seperti kepanduan, keputrian, dan lain-lain.
- d. Komisi menyampaikan segala rencana persiapan itu kepada Pengurus Besar masing-masing perhimpunan, yang setelah menyetujui segera mengadakan Kongres pembubarannya masing-masing.

Kemudian setelah ternyata rencana kerja dan prosedur itu disetujui oleh perhimpunan masing-masing dibentuklah "Komisi Besar Indonesia Muda", yang pimpinan sehari-hari diserahkan kepada tiga organisasi Pemuda terbesar yaitu : Jong Java/Tri Koro Dharmo, Pemuda Sumatera dan Pemuda Indonesia, yang masing-masing mengirimkan tiga orang wakil dalam Komisi.

Susunan Komisi Besar Indonesia Muda adalah sebagai berikut :

K e t u a	: Koentjoro Poerbopranoto (Jong Java)
Wakil Ketua	: Muhammad Yamin (Pemuda Sumatera)
Sekretaris Umum	: Joesoepadi Danudiningrat (Pemuda Indonesia)
Bendahara	: Assaat Datuk Mudo (Pemuda Sumatera)
A n g g o t a	: M.H. Thamrin (Pemuda Indonesia)
	Wongsonegoro (Jong Java)
	Adnan Kapau Gani (Pemuda Sumatera)
	Soediman (Jong Java)
	Amin Krung Raba Nasution (Pemuda Indonesia). ¹⁵

Dalam setahun kerja keras (1929 – 1930) Komisi Besar Indonesia Muda berhasil mengeluarkan sebuah risalah yang disebut *Pamphlet Komisi Besar Indonesia Muda*, yang memuat anjuran prosedur peleburan fusi, rencana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Indonesia Muda dengan penjelasan seperlunya.

Kecuali itu Komisi Besar merencanakan sebuah lomba Indonesia Muda berbentuk perisai dan ber-

warnakan biru tua dengan simbol emas "Garuda Muka", yaitu sayap Garuda mendukung sebuah keris terhunus yang berdiri di atas tiga landasan bunga teratai. Lambang menyimbolkan maksud suci Indonesia Muda untuk secara perjuangan (keris) menuju ke arah Indonesia Raya (Sayap Garuda) berdasarkan ideologi kesatuan bangsa, tanah air dan budaya (tiga teratai).

Bagaimana pula lahirnya Indonesia Muda? Setelah prosedur fusi serta rencana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disetujui oleh perhimpunan-perhimpunan pemuda dalam kongres Pembubarannya masing-masing menurut anjuran dan petunjuk-petunjuk dalam "Pamflet Komisi Besar Indonesia Muda", maka pada akhir tahun 1950 dapatlah diadakan Kongres Indonesia Muda di Solo (Gedung Habiprojo) yang berlangsung sampai tanggal 2 Januari 1931. Pada malam penutupan Kongres Indonesia Muda yang pertama itu dapatlah dinyatakan secara resmi lahirnya Kesatriya Muda dalam gelanggang perjuangan persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia Muda yang sudah dihiasi dengan segala alat perlengkapannya, pun pula sekaligus mempunyai lambang perhimpunan Garuda Muka dengan warna benderanya Merah Putih.

Sebagai Ketua Pengurus Besar Indonesia Muda dipilih Suwadi Prawirohardjo. Pada upacara kelahiran Indonesia Muda itu partai-partai politik PPPKI sebagai tanda pengakuan menyampaikan satu perisai perak beserta palu pimpinan juga dari perak oleh dua orang wakilnya yakni Mr. Singgih dan Mr. Soejoedi.¹⁶

Pada kongres lahirnya Indonesia Muda yang bersejarah itu ikut pula melakukan peranan penuh

antara lain Ibu Bintang Sudibjo (Ibu Soed), Mr. Wongsonegoro, Soedarjo Tjokrosisworo, dr. Soemali, dr. Adnan Kapau Gani dan lain-lain. Pada kongres tersebut dipentaskan untuk pertama kalinya karya Muhammad Yamin "*Kalau Dewi Tara Berkata*".

Demikianlah aktifitas, ide-ide, pemikiran, kegiatan dan lain-lain yang dilakukan oleh Koentjoro Poerbopranoto dalam rangka kegiatannya selama masa pelajar dan mahasiswa serta masa pemuda yang selalu memikirkan persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia di seluruh Indonesia dengan tidak memandang suku dan daerahnya dalam melakukan perjuangan ke arah Indonesia Merdeka.

BAB III KEGIATAN SOSIAL POLITIK DALAM MASYARAKAT

3.1 *Dalam Bidang Sosial Politik*

Kegiatan Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto dalam bidang sosial politik, sebenarnya sudah dirintis sejak masa pelajar dan mahasiswa, seperti kegiatan dalam Krido. Yatmoko, Karawitan, Tri Koro Dharmo, *Jong Java*, Kongres Pemuda Indonesia I dan II, Komisi Besar Indonesia Muda. Ia bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai pemegang peranan pelaku dalam semua kegiatan sosial dan politik seperti disebutkan di atas.

Setelah lulus dari *Rechts Hoge School* (RHS) Jakarta dengan mendapat gelar *Meester in de rechten* (Mr) pada tahun 1933, secara resmi ia terjun ke dunia politik. Pada tahun itu juga ia menjadi anggota Budi Utomo. Semua kita pasti tahu bahwa *Budi Utomo* ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Nama Budi Utomo itu berasal dari dr. Sutomo yang artinya budi tinggi atau keluhuran budi. Budi Utomo adalah organisasi bumiputera yang memenuhi syarat-syarat organisasi modern dan pengaruhnya bagi pergerakan nasional besar sekali.

Pendiri-pendiri Budi Utomo ialah Raden Sutomo, M. Gunawan Mangunkusumo, RM Gumbrek, Suradji dan M. Saleh yang semuanya berumur sekitar 18 – 20 tahun. Berdirinya Budi Utomo antara lain atas dorongan Dr Wahidin Sudirohusodo,

yang kemudian hari dianggap sebagai pelopor Kebangkitan Nasional.

Beberapa ciri khas Budi Utomo ialah :

1. Didukung oleh golongan priyayi.
2. Mempertahankan kebudayaan Jawa.
3. Keanggotaannya dan tujuannya berpusat kepada Jawa.
4. Tidak memihak kepada salah satu agama tertentu.
5. Sikapnya yang lunak terhadap Belanda dan semula belum bergerak di bidang politik. Di kalangan pengurus dinyalakan usaha-usaha untuk mendidik rakyat bumiputra (Jawa) lebih banyak dengan membentuk *fonds* (dana) untuk para pelajar.
6. Sebagai organisasi pelopor yang mendahului kelahiran organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya.¹

Meskipun semula pemuda-pemuda yang mendirikan Budi Utomo, namun lambat laun kepemimpinan Budi Utomo jatuh ke tangan kaum dewasa. Kaum mudanya mendirikan organisasi pemuda yang pertama ialah Tri Koro Dharmo yang didirikan pada tahun 1915 oleh Satiman. Apabila Budi Utomo dianggap pelopor kebangkitan organisasi dewasa, Tri Koro Dharmo dinilai sebagai pelopor kebangkitan organisasi-organisasi pemuda.²

Sewaktu Mr. Koentjoro Poerbopranoto memasuki Budi Utomo pada tahun 1933, Budi Utomo di samping bergerak di bidang sosial juga bergerak dalam bidang politik, walaupun semula secara diam-diam.

Koentjoro memasuki organisasi Budi Utomo, di kala ia telah bekerja sebagai pegawai bulanan pada *Departement Onderwijs an Eesediens* (sekarang departemen Pendidikan dan Kebudayaan) di Jakarta. Waktu itu ia belum begitu penuh bergerak dalam kegiatan politik, tetapi hanya sekedar belajar politik. Di samping itu ia lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan sosial seperti dalam kegiatan organisasi sosial, kursus, sekolah sebagai guru atau sebagai pengurus.

Budi Utomo dalam pergerakan dan perkembangannya menjadi partai politik, yakni Parindra (Partai I Raya) Selama menjadi anggota Parindra Koentjoro san dalam segala kegiatan. Parindra tidak menutup mata p atan dan aktivitas Koentjoro yang menonjol itu. Ia kandungannya Sarwoko Sarwopranoto aktif melakukan k atas nama Parindra untuk merebut kursi dalam *Stad teraad Batavia* (Seperti DPRD DKI sekarang) ³

Koentjoro termasuk salah seorang calon Parind Fraksi Nasional sebagai anggota *Stadsgemeenteraad* (1935–1936) Pada akhirnya Koentjoro berhasil dipili anggota *Standsgemeenteraad Batavia*, mewakili Parindra

Pada tahun 1936 Koentjoro bukannya menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) seperti yang kita ba catatan Koentjoro sendiri. *Biografi Nasional Daerah Jav* pada halaman 60, hasil wawancara seorang wartawan Surabaya dan lain-lain, tetapi pada tahun 1936 itu ia anggota Partai Indonesia (Partindo)

Kita tentu mengetahui semua bahwa Partai Nasio nesia (PNI) didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Band Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr Sartono, Mr. Budiart atmodjo, Mr. Sunario, dr. Samsi Sastrowidagdo (k bekas anggota Perhimpunan Indonesia di negeri Bel Sukarno, Ir. Anwari, Jan Tilaar dan Sudjadi.⁵

Pengurus Besar Partai Nasional Indonesia (PB–P pertama terdiri dari :

- | | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| 1. | K e t u a | : | Ir. Sukarno |
| 2. | Sekretaris/Bendahara | : | Mr. Iskaq Thokrohadisu |
| 3. | A n g g o t a | : | dr. Samsi Sastrowidagdo |
| 4. | A n g g o t a | : | Mr Sartono |
| 5. | A n g g o t a | : | Mr. Sunario |
| 6. | A n g g o t a | : | Ir Anwari. |

Kegiatan politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI) sangat tajam dan menentang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Desember 1929 tokoh-tokoh PNI seperti Ir. Sukarno, Gatot Mangkupradja, Maskun dan Supria ditangkap oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, kemudian dipenjarakan. Setelah divonis atas diri mereka masing-masing dijatuhi hukuman 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun 8 bulan dan 3 bulan.⁶

Atas kebijaksanaan Mr. Sartono, segera diadakan Kongres Luar Biasa PNI pada tanggal 25 April 1931 dihadiri oleh perwakilan dari cabang-cabang PNI dan pada tanggal itu juga atas keputusan kongres luar biasa, PNI membubarkan diri yang ditandatangani oleh orang-orang wakil-wakil PNI dari Pengurus Besar dan cabang-cabangnya.

Kemudian pada tanggal 26 April 1931 keesokan harinya bertempat di Kramat 97 Pavilyun (Kramat Raya 97 Paviliun sekarang) telah berkumpul Mr. Sartono, Manadi, Sukemi, Ron Sudirdjo dan Suwirjo (semuanya ikut menandatangani pembubaran PNI), untuk merencanakan pendirian partai politik baru. Tanggal 29 April 1931 berhasil didirikan Partai Indonesia (Partindo). Yang duduk dalam Pengurus Besar (Pengurus Besar) ialah semua anggota dewan pendiri, yaitu :

1. Pemuka/Ketua : Mr. Sartono
2. Penulis : Suwirjo
3. Bendahari : Angron Sudirdjo
4. Pembantu : Manadi
5. Pembantu : Sukemi.⁷

Jadi cukup jelas Koentjoro pada tahun 1936 bukan menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) tetapi menjadi anggota Partai Indonesia (Partindo) kelanjutan dari PNI karena membubarkan diri pada tanggal 25 April 1931. Selanjutnya semua partai termasuk PNI menjelang Proklamasi dan seterusnya belum dapat ikut aktif dalam kegiatannya.

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) kemudian mengusulkan agar dibentuk partai-partai sebagai wadah demokrasi. Usul itu ditanggapi secara positif oleh Pemerintah dalam Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang ditanda tangani oleh Bung Hatta selaku Wakil presiden Republik Indonesia. Dalam Diktumnya dinyatakan bahwa KNIP sebelum terbentuk MPR dan DPR disertai kekuasaan legeslatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Selanjutnya Maklumat No. X menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan pentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada KNIP

Dengan keputusan Maklumat Wakil Presiden No. X tersebut sesungguhnya berlangsung perubahan besar pada sistem kenegaraan kita, khususnya sistem pemerintahannya. Sifat pemerintahan presidensiil sekaligus berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Penjelasan tindakan pemerintah yang radikal itu diterangkan di dalam Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945. Maklumat tersebut memuat susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri dan mengemukakan bahwa saatnya sudah tepat untuk menjalankan tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha Negara kepada susunan demokrasi. Lebih lanjut Maklumat Pemerintah ini menyatakan, yang terpenting dalam perubahan susunan kabinet baru ialah, tanggung jawab berada di tangan Menteri.

Sejalan dengan usul BP KNIP supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita, mempertahankan kemerdekaan, menjamin keamanan masyarakat, maka Pemerintah dalam Maklumat tanggal 3 Nopember 1945 yang ditandatangani oleh Bung Hatta selaku Wakil Presiden, menegaskan pendiriannya sebagai berikut :

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai partai itulah dapat dipimpin ke

jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelum dilangsungkan pemilihan anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946, yakni sesuai dengan batas waktu 6 (enam) bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya yang ditetapkan dalam Aturan Tambahan Undang Undang Dasar 1945.⁸

Jadi partai-partai di Indonesia baru melakukan kegiatan setelah ada Maklumat tanggal 3 Nopember 1945 tepatnya pada bulan Januari 1946. Pada waktu itu Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai besar bersama partai-partai lainnya muncul kembali. Kalau tidak salah Koentjoro Poerbopranoto sebagai Ketua KNI Kota Semarang dan BP KNIP Yogyakarta mewakili PNI, atau ditunjuk oleh tokoh-tokoh PNI dari pusat.

Kalau kira tahun 1946 Koentjoro Poerbopranoto masuk menjadi anggota PNI mungkin lebih tepat. Tetapi kalau tahun 1936 lebih tepat masuk menjadi anggota Partindo atau selain PNI.

Koentjoro Poerbopranoto sebagai anggota *Stadsgemeenteraad* dalam usia 28 tahun, ternyata tidak begitu lama. Pada tahun 1936 itu *Volksraad* atau Dewan Rakyat (DPR sekarang) membutuhkan anggota bumiputera baru. Atas dorongan Mohammad Husni Thamrin tawaran untuk menjadi anggota *Volksraad* diterimanya. Tetapi Mr. Koentjoro Poerbopranoto menjadi tidak enak, karena ternyata hanya ditempatkan di bagian Sekretariat. Itu berarti Koentjoro yang *Inlander* tidak dapat lagi bergerak pada bidang politik. Ia lebih banyak dibebani pekerjaan administrasi. Maklumlah siapakah Koentjoro itu yang juga pencetus Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.⁹

Di samping giat di bidang politik Koentjoro juga besar perhatiannya di bidang olahraga mulai tahun 1928. Ia mendirikan Ikatan Sport Indonesia (ISI) yakni organisasi pelopor dari Pekan Olah Raga Nasional (PON) bersama dengan Soetardjo Karto-

hadikoesoemo. ISI adalah suatu kegiatan sebagai wadah untuk mempersatukan pemuda-pemuda melalui olahraga, karena yang ikut dalam pertandingan ini adalah olahragawan-olahragawan pemuda Indonesia dari daerah-daerah di Indonesia. Adik kandung Koentjoro sendiri yang bernama Sarwoko Sarwopranoto peserta ISI merupakan utusan dari daerah Jakarta dari anggota ISV (*Indonesische Sport Vereniging*) Jakarta. Pengurus ISV adalah Pak Karbol (Abdurahman Saleh perintis penerbangan Indonesia dan Pahlawan Nasional).¹⁰

Dalam ISI Koentjoro Poerbopranoto duduk sebagai Sekretaris Pusat. Jadi jelas sentral kegiatan ISI ada di tangan sekretaris, yaitu Mr. Koentjoro Poerbopranoto. Kegiatannya sebagai Sekretariat *Volksraad*, merangkap sebagai Sekretaris ISI berlangsung sampai tahun 1941.

Dengan pecahnya Perang Dunia ke II maka *Volksraad* di pindah ke Bandung. Sesudah pasukan Jepang menggulung Hindia Belanda Mr. Koentjoro meloncat ke Jawa Tengah dan menetap di Semarang selama masa pendudukan Jepang.

Tanggal 14 Agustus 1945 tentara Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Mr. Koentjoro terjun ke dunia politik lagi. Ia memangku jabatan Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Kotapraja Semarang, hingga ditangkap oleh Pemerintah Militer Jepang selama pertempuran lima hari di Semarang. Kemudian setelah Inggris memasuki Semarang Koentjoro dilepaskan dan diajak berunding.

Dalam bidang kebudayaan bersama teman-temannya, salah satu di antaranya Mr. Wongsonegoro, ia mendirikan dan memimpin organisasi Kongres Kebudayaan Indonesia. Kongres yang pertama dilangsungkan di Magelang pada tahun 1947. Kongres yang kedua di Jakarta pada tahun 1950 dan Kongres yang keempat di Bandung pada tahun 1952.

Selama Koentjoro Poerbopranoto berada di Semarang tidak lama kemudian ia diminta oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berkedudukan di Purworejo (Jawa Te-

ngah) untuk menangani kegiatan-kegiatan sekretariat. Selanjutnya bersama dengan KNIP ia pindah ke Yogyakarta. Di Yogyakarta ia duduk sebagai pejabat sementara Sekretaris Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Selama operasi militer Belanda ke II ia ditangkap oleh tentara pendudukan Belanda (NICA) pada tanggal 19 Desember 1948 karena dianggap sebagai tokoh KNIP dan kemudian dikenakan tahanan rumah sampai tahun 1949. Kemudian dilepaskan kembali setelah ada kawat dari Prof. Mr. Dr. Supomo di Jakarta.¹¹

Di Jakarta Koentjoro pada tahun 1949 itu bekerja pada Sekretariat Kotapraja Jakarta Raya menangani bidang pembangunan yang lebih banyak membantu kepentingan masyarakat dari pada menghalanginya. Selain jabatan tersebut ia juga duduk sebagai anggota Seksi Pendidikan dalam Panitia Persiapan Nasional yang diketuai oleh Suwirjo. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut Mr. Koentjoro tidak mempersulit masyarakat, bahkan cenderung selalu membantu kehidupan rakyat banyak.

Bersama Dr. Sahardjo ia duduk dalam Sekretariat Panitia bersama RIS-RI untuk menyusun Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) Negara Kesatuan Republik Indonesia (KNRI), yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Supomo. Mr. Koentjoro juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Interdepartemental untuk menyusul rancangan Undang Undang Pemilihan Umum pertama (1953-1955).

Kalau kita membaca buku catatan Prof. Mr. Koentjoro dan hasil wawancara wartawan hukum dengan Mr. Koentjoro, maka disebutkan ia menjadi anggota Budi Utomo. Selanjutnya menjadi partai politik Parindra, menjadi anggota PNI (partai) dan lain-lain. Menurut penelitian penulis Mr. Koentjoro hanya aktif sebagai anggota partai di sekitar tahun tiga puluhan dan pada tahun empat puluhan mewakili partai dalam lembaga-lembaga pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Koentjoro sebagai anggota Partindo pada tahun 1936 tidak begitu jelas kegiatannya. Lebih-lebih lagi sekitar tahun lima puluhan dan enam puluhan, Mr. Koentjoro yang juga anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) itu tidak pernah menonjol peranannya sebagai anggota PNI berjiwa konsekuen dan berprinsip. Sebagai pegawai negeri abdi negara dan abdi masyarakat ia bersikap setia. Ketika diadakan pembatasan bagi pegawai negeri golongan F untuk memasuki partai politik, maka Mr. Koentjoro pun membatasi diri kegiatan politiknya sebagai anggota PNI, karena ia adalah pegawai tinggi golongan F. VI.

Kalau kita lihat kepada latar belakang pendidikannya, maka Mr. Koentjoro lebih banyak orientasinya kepada hukum tatanegara, politik pemerintahan serta politik ekonomi. Masalah negara dan pemerintahan itu jelas tidak bisa dilepaskan dengan masalah politik sosial politik ekonomi dan politik kebudayaan.

3.2 *Dalam Bidang Kemasyarakatan*

Koentjoro sejak di sekolah dasar sudah melakukan kegiatan kemasyarakatan secara sadar atau pun tidak. Ia penggemar kesenian rakyat. Ia pun ingin berbaur dengan masyarakat luas. Koentjoro gemar memancing. Selain untuk mencari ilham dan ketenangan jiwa iapun ingin mencari hubungan dengan masyarakat.

Semasa pelajar ia senang bergaul melalui kegiatan kesenian organisasi pemuda dan pelajar serta organisasi kemasyarakatan dalam lingkungannya. Kegiatan dalam bidang kemasyarakatan seperti kegiatan kerja bakti di RT, RK, dan lain-lain. Koentjoro bukan hanya sebagai penonton atau pemberi komando, tetapi aktif turun tangan dan bertanggung jawab. Ia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain perasaan masyarakat itu adalah perasaannya pula. Hidup prihatin, selalu mendekati diri kepada masyarakat dan kepada Tuhan adalah motto hidupnya.

Semasa belajar di ELS ia masih ikut orang tua, namun ia sudah mengadakan pergaulan dengan masyarakat lingkungannya. Ia ikut giat dalam kesenian, olah raga, kegotongroyongan sehingga ia cukup di kenal di lingkungan tetangganya. Karena itu selama duduk di kelas-kelas terakhir ELS ia mendapat beasiswa dari pemerintah Ponorogo. Apalagi orang tuanya Bapak Mngunpranoto, adalah seorang Mantri yang cukup disegani oleh masyarakat dan pemerintah daerah Ponorogo.

Sewaktu belajar di *Rechtsschool* Jakarta, ia tinggal di asrama di jalan Pegangsaan, sekarang Jalan Pegangsaan Timur 17 Jakarta Pusat. Tujuannya supaya dapat berbaur dengan pelajar-pelajar dari daerah lain di Jawa maupun luar Jawa. Di antara sesama teman terjadi tukar informasi dalam adat istiadat dan kebudayaan serta terjadi pula diskusi mengenai berbagai topik, seperti politik lokal, nasional dan internasional.

Sewaktu mengikuti kuliah di *Rechts Hoge School* (RHS), Koentjoro mengontrak rumah bersama rekan-rekannya baik dari Jawa maupun dari luar Jawa, antara lain Soekarno, Bernard Siregar dan Soedarmadji. Semua temannya itu akhirnya selesai studinya dengan mendapat gelar *Meester in de rechten* (Mr). Selama tinggal bersama dengan teman-temannya dari daerah lain itu Koentjoro banyak melakukan diskusi dalam bidang ekonomi, politik, kenegaraan dan pemerintahan. Karena itu skripsinya bukan mengenai *Hukum Adat* seperti Prof. Mr. Dr. Supomo, tetapi berjudul *Hukum Tatanegara, Tata Pemerintahan dan Ekonomi*.^{1 2}

Dalam bidang kesenian di masyarakat Koentjoro aktif sebagai pemain wayang orang. Karena itu ia mempunyai banyak teman dikalangan suku Jawa. Dalam seni bela diri ia pandai pencak silat gaya Minangkabau dan *Yuyitsu*. Dengan jalan ini ia membina persahabatan dengan teman-teman dari luar Jawa. Ia juga gemar main tenis. Dengan bermain tenis ia memelihara pergaulannya dengan kalangan terpelajar. Koentjoro hanya senang melihat pertandingan sepakbola, tetapi tidak ikut

bermain. Di lapangan sepakbola ia memelihara hubungan dengan masyarakat luas.

Dalam keluarga, Koentjoro adalah seorang ayah yang baik, humoris, tetapi dapat tegas bila diperlukan. Kasih sayang terhadap isteri dan putra putrinya tidak pernah diragukan. Koentjoro selalu hormat dan sujud kepada kedua orang tuanya semenjak kecil hingga akhir hayatnya. Sebagai imbalannya yang serupa ditiru pula oleh isteri dan putra dan putrinya semua.

Pada tiap awal pekerjaan yang ia tangani dan dalam segala situasi yang ia hadapi, Koentjoro selalu memulai dengan memohon petunjuk serta bimbingan Tuhan Yang Maha Esa serta mohon perlindunganNya. Koentjoro selalu mengadakan komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa setiap saat dan dimana pun ia berada.

Koentjoro dalam berjuang untuk masyarakat, bangsa dan negaranya memegang prinsip yang khas. Ia akan berjuang dan berperang dengan tanpa senjata. Ia akan menang dalam peperangan tanpa menyalahkan musuh. Dan ia akan merasa kaya tanpa memiliki harta benda. Ia akan menghormati lawannya tetapi tetap lebih menghormati bangsanya sendiri.

Berjuang dalam masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri tanpa meninggalkan kepribadian Indonesia. Ia tidak pernah menuntut jasa. Apa yang ia persembahkan kepada Nusa dan Bangsanya dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya serta sesuai dengan suara hati nuraninya. Dengan rasa penuh *tepo seliro*, adalah sudah kewajibannya sebagai putra bangsa untuk mengabdikan. Keseluruhannya ia laksanakan dengan hati ikhlas dan dalam sifat kesederhanannya.^{1 3}

Kegiatannya sebagai anggota Tri Koro Dharmo, *Jong Java, Club Indonesia*, Kongres Pemuda I/II, Komisi Besar Indonesia Muda dianggapnya sebagai pengabdian.

Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat pernah dilakukan oleh Koentjoro Poerbopranoto melalui Ikatan Sport Indonesia (ISI).

Memasyarakatkan kebudayaan Indonesia dan membudayakan masyarakat Indonesia itu pula yang telah ia lakukan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia ke I, II dan III di Magelang, Jakarta dan Bandung, pada tahun 1947, 1950 dan 1952.

Dipilihnya menjadi Sekretaris kemudian Wakil Ketua II Pengurus Besar Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN) pada tahun 1950–1955 merupakan kegiatan politik dan kemasyarakatan. Kegiatan itu merupakan amal bakti sukarela dalam melaksanakan perjuangan untuk kepentingan masyarakat. Mr. Koentjoro Poerbopranoto juga duduk dalam Redaksi *Majalah Hukum* bersama Prof. Mr. dr. Supomo, yang merupakan sarana bagi masyarakat agar sadar hukum, dan tidak melawan hukum tetapi akan melaksanakan hukum dengan baik.

Mr. Koentjoro juga pernah bertindak sebagai penyanggah dan pemrasaran pada Seminar Hukum Nasional ke I di Jakarta pada tahun 1962. Koentjoro adalah anggota Panitia Saksi Hukum Tata Negara dalam Seminar Hukum Nasional ke II di Semarang tahun 1968. Ia juga duduk sebagai anggota Pengurus Pusat Badan Kongres Kebatinan Indonesia yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro (1960–1965).

Dalam kegiatan pembinaan mental masyarakat pada tahun 1970 Mr. Koentjoro ditunjuk sebagai ketua Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK).

Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia. Mr. Koentjoro mempunyai latar belakang pendidikan Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan. Karena itu ia ditunjuk oleh Koordinator Perguruan Tinggi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara yaitu Prof. Dr. Eri Soedewo, menjadi Anggota Tim Pancasila Kopesti tahun 1970.

Untuk kegiatan sebagai anggota masyarakat Kota Surabaya Mr. Koentjoro diangkat sebagai Anggota Majelis Kehormatan Dewan Kesenian Kotamadya Surabaya tahun 1971, kerana ia termasuk tokoh yang memasyarakatkan kesenian dari mulai di bangku sekolah. Mr. Koentjoro duduk pula dalam *Executive*

Board Lembaga Indonesia — Amerika cabang Surabaya pada tahun 1969—1972.¹⁴

Itulah beberapa kegiatan sosial politik dalam masyarakat yang pernah dilakukan oleh Mr. Koentjoro Poerbopranoto. Sebenarnya kehidupan sosial, politik, kemasyarakatan, pemerintahan dan kenegaraan tidak dapat dipisahkan penguraiannya karena antara satu dengan yang lain selalu ada hubungannya.

BAB IV PENGABDIAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI

Koentjoro Poerbopranoto dalam pengabdianya sebagai pegawai negeri, menjadi anggota Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan dalam masyarakat cukup punya nama besar. Nama besar itu bukan saja dalam bidang akademik, edukatif, non edukatif didalam lingkungan Kotamadya Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, tetapi juga punya nama di seluruh Bumi Nusantara, bahkan di luar negeri sekalipun. Kebesaran itu bisa ditemukan dari kisah perjalanan hidupnya.¹

Ungkapan perjalanan hidupnya bersama ini dilampirkan. Dalam pengabdianya sebagai pegawai negeri diuraikan yang bersifat non edukatif dan dalam lingkungan edukatif. Juga akan disinggung yang mungkin tidak bersifat kegiatan pegawai negeri seperti dalam lingkungan kemasyarakatan dan lain-lain yang mungkin juga ada gunanya.

4.1 *Dalam Bidang Non Edukatif*

Setelah tamat dari *Rechtschool* (Sekolah Menengah Hukum) di Jakarta pada awal tahun 1927, dengan Surat Keputusan Direktur Justitie tanggal 9 Mei 1927 Nomor B. 3/69/1 terhitung mulai tanggal 1 Juni 1927 diangkat sebagai pegawai negeri Hindia Belanda dengan jabatan *Ambtenaar ter beschikking*

(pejabat yang diperbantukan) pada *Landraad* (Pengadilan Negeri) Surabaya.

Setelah Koentjoro Poeropropranoto bekerja sebagai pegawai negeri Hindia Belanda selama satu tahun tiga bulan, telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan profesi dan tugas yang dibebankan kepadanya. Kadang-kadang juga ia dipakai sebagai PANitera pada PENGadilan Negeri Surabaya tersebut untuk sekedar mencoba kemampuannya. Diam-diam para Inspeksi dalam lingkungan PENGadilan selalu pula memperhatikan kemampuannya dan kebanyakan menganggukan kepala tanda persetujuannya dengan kemampuan Koentjoro dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di Pengadilan Negeri Surabaya. Di luar dugaan, Kepala Pengadilan Negeri Surabaya kagum melihat kemampuan Koentjoro Poerbopranoto bekerja di Pengadilan Surabaya melebihi dari yang diharapkan. Memang Koentjoro manusia yang mempunyai kemauan keras dan tekun untuk belajar dan bekerja.²

Ketika pada tanggal 1 September 1928 Koentjoro berumur kurang lebih 22 tahun. Kepala Pengadilan Negeri Surabaya menilai Koentjoro dapat melaksanakan tugasnya dengan prestasi kerja yang cukup baik, untuk masa depannya yang lebih cerah demi pengabdianannya kepada Pemerintah Hindia Belanda. Tapi Koentjoro sebagai pemuda pergerakan sebenarnya ingin mengabdikan untuk kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia di kemudian hari. Pada tanggal 1 September ia mendapat tugas belajar (*studieverlof*) ke *Rechts Hoge School* (Sekolah Hakim Tinggi atau disebut juga Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta.³

Koentjoro di samping menjalankan tugas belajar di *Rechts Hoge School* (RHS) yang kalau tamat mendapat gelar *Meester in rechten* (*Mr*) dan menjadi Hakim di *Landraad* (Pengadilan Negeri) yang ada di Hindia Belanda. Ia juga aktif di *Club Indonèsia*, Panitia Perumus Sumpah Pemuda Indonesia II (28 Oktober 1928), dipilih menjadi Ketua Komisi Besar Indonesia Muda (1928–1930). Bagaimana ia membagi waktunya? *Time is*

money. Bagi Koentjoro *There is no time to be lost* dan *The work makes work to be done* yang artinya Tidak ada waktu untuk dibuang-buang dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi bagi Koentjoro waktu itu betul-betul dipergunakan untuk menuntun ilmu, pengabdian dan perjuangan.

Setelah Koentjoro tamat dari RHS ia memilih tempat kerja di Jakarta. Sesuai dengan Skripsi/Tesisnya yang berjudul "*Hukum Tata Negara, Tata Pemerintah dan Ekonomi*", ia bekerja pada Departemen O & E walaupun sebagai pegawai bulanan dan gaji lebih kecil dibandingkan dengan ketika ia mula-mula tamat dari *Rechtsschool* yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagai pegawai bulanan di Departemen O & E, pengangkatan dengan Surat Keputusan dari Direktur O & E tanggal 14-11-1933 Nomor : 35311/F terhitung mulai tanggal 1-10-1933 sampai dengan 31-10-1955. Pada hal kalau ia kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya minimal menjadi Hakim kepala dengan gaji tentu lebih tinggi dari pada ia bekerja pada Departemen O & E. Bekerja di Departemen O & E gajinya f. 75,- sedangkan di Pengadilan Negeri lima tahun sebelumnya bergaji pokok f. 130,- tamatan *Rechtsschool* kalau tamat RHS tentu lebih tinggi lagi.

Mengapa Mr. Koentjoro Poerbopranoto memilih Departemen O & E Jakarta sebagai pegawai bulanan, bukan sebagai hakim di Surabaya atau tempat lain di luar Jakarta?

Memilih jabatan sebagai Hakim di Surabaya atau di luar Jakarta, di samping tidak dapat meneruskan perjuangan di kalangan pemuda dan politik, juga terikat dengan kode etik sebagai Hakim di Pengadilan Negeri. Sedang memilih bekerja di Jakarta dengan gaji kecil namun hubungan dan kebebasan berjuang masih ada dan tidak terikat dengan kode etik pekerjaan asal dilakukan secara diam apakah secara informal atau dalam bentuk lain. Buktinya semasih kuliah masih bisa bergerak di kalangan pergerakan pemuda. Bukti yang lain pada tahun 1933-1935 ia menjadi anggota Partai Politik Budi Utomo yang kemudian menjel-

ma menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra). Menjadi anggota Parindra tidak menerima gaji, tetapi malah setiap bulan membayar kontribusi (iuran). Selama satu tahun (1935–1936) sebagai wakil Parindra dipilih menjadi anggota *Stadsgemeenteraad* Batavia (DPRD–DKI sekarang) juga tidak diimbangi dengan uang atas pekerjaan tersebut.⁴ Tetapi rupanya kepuasan berjuang terutama di bidang politik tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang.

Karena aktivitas dan kegiatannya dalam Parindra dan Partindo kelanjutan dari PNI (Partai Nasional Indonesia) yang tergabung dalam Fraksi Nasional cukup memperlihatkan titik-titik terang dalam perjuangan selanjutnya, maka atas pencalonan Fraksi Nasional (Pimpinan Mohammad Husni Thamrin) dan dengan Surat Keputusan *Comm. Redactur Volksraad* tanggal 29–10–1936 No. 38) dan tanggal 9–10–1941 No. 19) terhitung mulai 1 Nopember 1936 sampai dengan 28 Februari 1941 diangkat sebagai Pegawai Tinggi Dewan Rakyat diperbantukan menjadi anggota Sekretariat *Volksraad* di Jakarta dan harus menarik diri dari keanggotaan *Stadsgemeenteraad* Jakarta. Pekerjaan ini sebenarnya tidak disenanginya karena bertugas di bidang administrasi, bukan politik. Tetapi karena pencalonan Fraksi Nasional ia konsekuen menerima tugas tersebut demi kepentingan bersama.

Perang Dunia II pecah menyebabkan suatu kesempatan bagi Koentjoro untuk meninggalkan Jakarta dan meninggalkan lapangan pekerjaan di bidang administrasi. *Volksraad* di pindah ke Bandung. Koentjoro tidak mengikuti *Volksraad* tetapi meloncat ke Jawa Tengah dan menetap di Semarang. Ia berusaha akan bergerak kembali dalam bidang politik yang memang saat itu pekerjaan yang disenanginya.

Dengan Surat Keputusan Gol. B & W Semarang tanggal 23 Desember 1941 No. 86/E ia diangkat sebagai Referendaris Kl. II *Gemeente* Semarang terhitung mulai tanggal 1 Maret 1941. Tugas itu dijabatnya sampai dengan tanggal 29 Pebruari

1942. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan *Gunseikan Jepang* (Surat keputusan Pemerintah Balatentara Jepang hilang), pada masa penduduk Jepang di Semarang disertai tugas sebagai Wakil Wali Kota Semarang (*Shi Jojoku*).⁵

Pada tahun 1945 ia diangkat menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia daerah Kotapraja Semarang, hingga ditangkap oleh Pemerintah Militer Jepang selama pertempuran lima hari di Semarang.

Kesan-kesan, motto, dan kata-kata Mutiara Koentjoro selama pertempuran lima hari di Semarang dan selama dalam tahanan yang penulis kutip adalah sebagai berikut :

- I. SEPULUH JAM BERHADAPAN DENGAN MAUT.
MOTTO : JIKA BELUM MENGHADAPI MATI, MUSTAHILLAH AKAN DAPAT MENIMBANG NILAI HIDUP YANG SEBENARNYA.
- II. DISTRIBUSI. HAWA.
MOTTO : DALAM MASA DAMAI ORANG MENGEJAR KESENYAMANAN HIDUP, MENINGKARKAN MATI.
DALAM MASA PERANG ORANG MENGEJAR HIDUP, MENGHINDARI MATI.
- III. PERUNDINGAN INTERNASIONAL TANPA PROTOKOL.
MOTTO : "KITA CINTA DAMAI, TETAPI LEBIH CINTA AKAN KEMERDEKAAN."
DUNIA MERDEKA DAN DAMAI ADALAH CITA-CITA KITA.

Tidak ada perjuangan tanpa melalui pengorbanan. Berliku-liku penderitaan dan perasaan telah dilalui oleh Koentjoro selama pertempuran lima hari di Semarang namun akhirnya selesai juga melalui meja perundingan, dan Koentjoro termasuk juru bicara untuk memberikan pengertian kepada masyarakat.⁶

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Departemen Urusan Dalam Negeri tanggal 16 April 1946 No. P. 37 di angkat sebagai

Pegawai Tinggi (Tingkat III) Kantor Gubernur Jawa Tengah di Magelang, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 sampai dengan tanggal 31 Desember 1946.

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1947 No. 1/2/22 terhitung tanggal 1 Januari 1947 sampai dengan 30 April 1949 diangkat menjadi Pegawai Tinggi (Tingkat III) disertai Kepala Bagian Umum. Kemudian sebagai pejabat sementara sekretaris Badan Pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) yang berkedudukan di Purworejo untuk menangani kegiatan-kegiatan sekretariat. Selanjutnya pindah ke Yogyakarta bersama BP KNIP pula.

Pada waktu agresi militer II ia ditangkap tentara Belanda (NICA) pada tanggal 19 Desember 1948 dan diputuskan mendapat hukuman tahanan rumah sampai tahun 1949 dan dibebaskan setelah ada kawat dari Prof. Mr. Dr. Supomo untuk segera ke Jakarta.

Dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Harien Kota Praja Jakarta Raya tanggal 18 Mei 1948 No. 2.1.24.44 diangkat sebagai Pegawai Tinggi (Referendaris) Kotapraja Jakarta Raya terhitung mulai tanggal 1 Mei 1949 sampai dengan 31 Desember 1949.

Sebagai Pegawai Tinggi Kotapraja Jakarta Raya ditempatkan di bagian pembangunan kota yang sifatnya sama sekali tidak menghalang-halangi kepentingan rakyat dan malah secara tidak langsung membantu rakyat dalam sarana sehari-hari. Kenapa kalimat ini diulang kembali menyebutnya, karena pada waktu itu Koentjoro kooperatif dengan kebijaksanaan Mr. Sastro Mulyono salah seorang pembela Bung Karno dalam Pengadilan Kolonial Belanda di Bandung. Mr. Sastro Mulyono semasa itu dianggap orang banyak adalah kooperatif dengan Pemerintah Hindia Belanda setelah mengadili Bung Karno atau sekitar tahun 1947 dan 1948.⁷

Memperhatikan pula Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RIS tanggal 20 Januari 1950 No. 1.50 ia diangkat sebagai

Pegawai Tinggi (golongan IV/d) Kementerian Dalam Negeri, disertai tugas Kepala Bagian Hukum (Perundang-Undangan) terhitung mulai tanggal 1 Januari 1950 sampai dengan tanggal 31 Desember 1950.

Juga dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Januari 1951 No. UP/1/1/4 diangkat sebagai Pegawai Tinggi dari golongan VI/d sampai dengan golongan IV/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 1951 sampai dengan tanggal 31 Oktober 1953. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 25 September 1953 No 166/II diangkat sebagai Pegawai Tinggi (golongan VI/e) disertai Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi Pada Kementerian Dalam Negeri terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1953 sampai 31 Oktober 1954.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1954 No. 270/H diangkat sebagai Pegawai Tinggi (golongan IV/f) disertai juga Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi pada Kementerian Dalam Negeri terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1954 sampai dengan tanggal 31 Mei 1955.

Selama bekerja di Kementerian Dalam Negeri RIS maupun RI dari tahun 1950 sampai tahun 1955 ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengurus Besar Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri. Ketuanya ialah Sudiro. Ini juga sengaja kami ulangi karena merupakan nostalgia pekerjaan sewaktu aktif semasa pemuda dan supaya ada kesinambungannya.

Mr. Koentjoro Poerbopranoto dan Dr. Suhardjo duduk pula dalam Sekretariat Panitia Bersama RIS—RI untuk menyusun Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Supomo tahun 1950. Koentjoro Poerbopranoto juga ikut pula menyusun UUP Pemerintah Daerah No. 1 tahun 1951.

Pada tahun 1953—1955 Mr. Koentjoro Poerbopranoto ditunjuk sebagai Ketua Panitia Interdepartemental untuk me-

nyusun RUU Pemilihan Umum yang pertama, melahirkan UU No. 7 Pemilihan Umum tahun 1955.

4.2 *Dalam Lingkungan Edukatif*

Bermula Mr. Koentjoro Poerbopranoto diperbantukan dari Kementerian Dalam Negeri RI ke Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Kementerian PP dan K) pada masa Menteri PP dan K Mr. Muhammad Yamin pada tahun 1955. Menteri Yamin cukup mengenal Koentjoro dan Koentjoro tentu juga demikian karena sama-sama berjuang. Yamin adalah aktivitas *Jong Soematanen Bond* dan Koentjoro aktivitas *Jong Java*. Akhirnya bersama ambil bagian dalam kegiatan Sumpah Pemuda ke I dan II, dalam Komisi Besar Indonesia Muda, kemudian dalam kegiatan perjuangan selanjutnya.

Menteri Yamin mengenal, Koentjoro sebagai orang yang sederhana, jujur, kebabakan, sabar, disiplin, ulet, tekun dan teliti dalam berbuat dan bertindak. Ia selalu berpandangan jauh ke masa depan dalam ruang lingkup nasional dalam menggalang persatuan dan kesatuan.⁸

Untuk hal-hal tersebut di atas Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Mr. Muhammad Yamin mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 6 Juni 1955 No. 31422/CIV mengangkat Mr. Koentjoro Poerbopranoto sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan (golongan VI/f) pada Kementerian PP & K terhitung mulai tanggal 1 Juni 1955.

Kemudian Presiden Republik Indonesia yang pertama Ir. Sukarno mengeluarkan pula Surat Keputusan tanggal 14 Desember 1956 No. 515/G mengangkat Mr. Koentjoro Poerbopranoto sebagai Atase (*Counselor*) Kebudayaan Republik Indonesia pada KBRI Paris merangkap sebagai penghubung antara Pemerintah RI (Kementerian PP dan K) dengan Markas Besar UNESCO di Paris terhitung mulai tanggal 1 Juli 1955 sampai tanggal 31 Januari 1959.

Dengan Surat Keputusan Menteri PP & K Republik Indonesia Jakarta tanggal 2 Pebruari 1959 No. 12677/C.III Mr. Koentjoro diangkat sebagai Pegawai Tinggi (golongan F/VI) Kementerian PP dan K diperbantukan pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Airlangga di Surabaya terhitung mulai Pebruari 1959.

Di Malang jauh sebelum itu telah dibuka PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru) semasa Menteri PP dan K Prof. Mr. Muhammad Yamin dengan Pimpinannya ditunjuk Adam Bachtiar. Bersama itu pula dibuka PTPG di Bandung dengan pimpinannya Sadaryun dan PTPG di Batusangkar di pimpin oleh Zainuddin Sutan Kerajaan.⁹

PTPG Malang kemudian dilebur menjadi FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berada di bawah Universitas Airlangga Surabaya. Untuk itu Menteri PP dan K RI dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Mei 1959 No. 47291/C/III, mengangkat Mr. Koentjoro Perbopranoto sebagai Pegawai Tinggi (gol. F/VI) Kementerian PP dan K RI diperbantukan pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Di samping jabatannya pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Airlangga merangkap sebagai acting- Ketua FKIP Universitas Airlangga di Malang terhitung mulai tanggal 1 April 1959. Sekaligus juga dengan Surat Keputusan Menteri PP dan K tanggal 9 Juni 1959 No. 54609/C. III Mr. Koentjoro Poerbopranoto dipindahkan dan diangkat sebagai dosen (golongan F/VI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Airlangga di Malang terhitung mulai tanggal 1 April 1959 itu juga.

Surat Keputusan Menteri PP dan K RI tanggal 2 Maret 1960 No. 19637/C.III, sambil menunggu Keputusan Presiden RI Mr. Koentjoro Perobopranoto diangkat sebagai Guru Besar (golongan F/VI) dalam mata pelajaran Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya dan berkedudukan di Malang terhitung mulai tanggal 1 Pebru-

ari 1960. Kemudian dengan Keputusan Presiden RI tanggal 9 Nopember 1961 No. 463/0/61 Mr. Koentjoro Poerbopranoto diangkat sebagai Guru Besar (Gol. F/VI) dalam mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga merangkap sebagai Ketua FKIP Universitas Airlangga berkedudukan di Malang terhitung mulai tanggal 1 April 1960.

Surat Keputusan Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) tanggal 5 Januari 1963 No. 438/UP/II/63 mengangkat Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto sebagai anggota Presidium Universitas Brawijaya Malang. Tahun 1960–1964 diangkat sebagai Ketua Dewan Kurator APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) Malang.

Menteri PTIP RI mengeluarkan lagi Surat Keputusan tanggal 8 April 1964 No. 3586/UP/II/64 memberikan Kenaikan Tingkat kepada Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto sebagai Guru Besar (Gol. F/VII) dalam mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga merangkap sebagai Dekan FKIP Universitas Airlangga di Malang terhitung mulai tanggal 1 April 1964.¹⁰

Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI tanggal 9 Juli 1961 No. 646/UP/II/64 Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto ditunjuk sebagai Pejabat Rekor UNAIR selama Rektor pergi ke luar negeri.

Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI lagi tanggal 28 Aril 1965 No. SP/244/PI/I/65 Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto sebagai Guru Besar (Gol. F/VII) pada Departemen PTIP diperbantukan sebagai Atase Kebudayaan pada KBRI di Bonn (Jerman). Tugas utamanya sebagai pengawas kemahasiswaan di seluruh Eropa Barat pada Departemen Luar Negeri. Di samping itu aktif pula dalam menyusun kembali organisasi RI di Eropa setelah porak poranda akibat terjadinya G 30 S/PKI tahun 1965.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 29 Nopember 1967 No. 700/I–SP/PT/67 mengangkat

kembali Prof Mr. Koentjoro Poerbopranoto sebagai Guru Besar (Gol. F/VII) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1967.

Dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Surabaya tanggal 18 Pebruari 1970 No. UP/344/10/UA/70, ia diangkat sebagai Pejabat Sementara anggota Presidium Dekan Fakultas Universitas Airlangga dan SK Rektor tanggal 1 Desember ditunjuk sebagai anggota dan Pds. Ketua Dewan Riset UNAIR tahun 1969. Ditunjuk pula sebagai anggota Dewan Sub-Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K tahun 1970. Ditunjuk juga sebagai Ketua Tim UNAIR Penyiap Bahan Sidang MPR 1972/1973.

Tahun 1970 itu pula ia ditunjuk oleh Prof. Dr. Eri Sudewo Koordinator Perguruan Tinggi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara menjadi anggota Tim Pancasila Koperti (Koordinator Perguruan Tinggi), bukan Kopertis seperti sekarang ini.

Selama menjadi Purek I (Pembantu Rektor I) dan Pds. Rektor UNAIR Surabaya 1964-1965. Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto menjadi promotor pemberian gelar *Doctor Honoris Causa* (HC) kepada Menteri Koordinator (Menko) Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani yang mengetengahkan pidato dengan judul *Hukum dalam Revolusi dan Revolusi dalam Hukum*.

Judul pidato Prof. Mr. Koentjoro Perbopranoto pada *Dies Natalis* Universtias Airlangga ke XIV di Surabaya tanggal 10 Nopember 1968 ialah *Segi Kemiliteran dalam Pemerintahan Negara*.

Peranan Ibu Sutowo dalam Perminyakan Nasional merupakan pidato Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto pada pemberian gelar *Doctor Honoris Causa* (HC) dalam Ilmu Ekonomi kepala Letjen TNI dr. H. Ibnu Sutowo, Direktur Utama Pertamina pada tanggal 11 Nopember 1972 di Surabaya.

Itu hanya sekedar garis besarnya saja tentang pengabdian Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto sebagai pegawai negeri di

tiga zaman, yaitu di zaman Hindia Belanda, Pendudukan Jepang dan Indonesia Merdeka. Masih banyak lagi kegiatannya dalam bidang non edukatif dan dalam lingkungan edukatif yang tidak mungkin diuraikan satu per satu secara terperinci di sini.

BAB V GIAT DALAM BIDANG PAGUYUBAN SOSROKARTANAN DAN PENELITIAN HARI JADI KOTA SURABAYA

5.1. *Anggota dan Ketua Paguyuban Sosrokartanan*

Paguyuban Sosrokartanan termasuk salah satu organisasi aliran kebatinan dan aliran kepercayaan. Cita-cita Paguyuban Sosrokartanan untuk dapat menyebarkan segala aliran *Swargi Eyang Sosrokartono*, yang berupa pesan-pesan dalam surat-surat beliau maupun *dawuh-dawuh* yang tersalurkan melalui para sahabat yang terdekat, yakni para *Saderek Monosuko*, ataupun melalui para peminat lain yang sangat besar jumlahnya itu baik di Jawa maupun di Sumatera dan di luar negeri sekalipun Paguyuban Sosrokartanan merupakan wadah penyaluran yang agak sempurna, agar supaya segala peninggalan dan ajaran Swargi Eyang Sosrokartanan dapat dipelihara, diresapi kembali, dipahami serta direnungkan bersama, agar semarak dan tuahnya dapat *dipepetri* dan dinikmati bersama, tidak saja oleh generasi tua yang dulu pernah berkenalan langsung dengan *Swargi* di masa *sugengnya*, namun semoga dapat tersalurkan juga kepada generasi-generasi mendatang.¹

Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto sebelum menjadi anggota dan Ketua Paguyuban Sosrokartanan Surabaya terlebih dahulu telah menjadi anggota Pengurus Pusat Badan Kongres

Kebatinan Indonesia yang diketuai oleh Mr. Wongsohegoro pada tahun 1960–1965. Selanjutnya tahun 1970 ditunjuk oleh Ketua Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK), yaitu Mr. Wongsohegoro, sebagai Anggota SKK Pusat.²

Orang tua Koentjoro R. Mangunpranoto adalah juga penganut aliran kebatinan dan kepercayaan Budi Luhur. Hal ini jelas kelihatan kalau kita baca buku *Tjitrakawatja* karangan almarhum Raden Mangunpranoto (ayah kandung Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto) yang menamakan ini dengan nama sendinya *Rahpinudji* (Raden) *Ngripto* (Mangun) *Guning* (Pra) *Nareswara* (Noto). Buku tersebut telah diterbitkan di Surakarta atas kemurahan bantuan almarhum *KRMT Sarwoko Mangunkusumo*, Bupati-Patih Mangkunegaran pada tahun 1939. Beliau kemudian wafat pada bulan Juni 1963.

Isi buku "Tjitrakawatja" itu adalah penyempurnaan dan perluasan isi buku karangan almarhum Raden Mangunpranoto yang berjudul *Nitisastra Djarwa* yang diterbitkan pada tahun 1937. Penerbitan ini ternyata tidak sesuai dengan kehendak dan cita-cita pengarang, karena ada beberapa hal dalam isi buku itu yang diubah tanpa persetujuannya lagi pula terdapat beberapa salah cetak yang mengecewakan.

Karena apa yang ditulis oleh R. Mangunpranoto dengan huruf Jawa *hanacaraka* sebagai tafsiran dan catatan atas aslinya Serat *Nitisastra* karangan Sri Paduka *Sultan Agung Hanyokrokusumo* Mataram pada abad itu dan yang kebanyakan berdasarkan pengalaman selama hidupnya yang penuh dengan prihatin dan penderitaan itu. Banyak pula yang kiranya ada gunanya bagi generasi sekarang, yang berhasrat menggali bahan-bahan lama guna menyentausakan kepribadian sekarang dan di kemudian hari.³

Seperti sudah dikatakan sebelum ini, Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto mewarisi sifat kedua orang tuanya. Jadi ia aktif duduk sebagai anggota Pengurus Pusat Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) dan sebagai anggota Sekretariat Kerjasama

Kepercayaan (SKK) Pusat dan Paguyuban Sosrokartanan Surabaya seperti melanjutkan kegiatan dan keyakinan dari kegiatan dan keyadinan kedua orang tuanya. Walaupun dalam hal cara penyampaian lebih banyak perbedaan dari persamaannya namun maksud dan tujuannya adalah sama. Variasi boleh saja disesuaikan dengan tuntunan zaman.

Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto pada tahun 1973 sebagai Ketua Umum Paguyuban Sosrokartanan Surabaya menghadap "Sang Alif". Apa arti Sang Alif" itu?

Sebelum kita lanjutkan pembicaraan mengenai Sang Alif, lebih baik kita bicarakan terlebih dahulu tentang "DAR-OES-SALAM". Apa arti "DAR-OES-SALAM" itu?.

Papan kayu besar dengan tulisan "DAR-OES-SALAM" dipasang di atas pintu masuk ke rumah besar kuno, yang ada di jalan yang dulu namanya Poengkoerweg, Bandung waktu masih zaman Belanda. Sekarang sudah diganti dengan nama Jalan Abdul Muis. Setelah wafatnya Drs. Sosrokartono kakak kandung R.A. Kartini, tempat tinggalnya tidak dapat dipertahankan lagi sebagai rumah pusaka oleh para pencinta *Ndara*, (sebutan bagi Drs. Sosrokartono) yang bergabung dalam Yayasan Keluarga Drs. Oes Salam, yang didirikan pada tanggal 2 April 1952 di Bandung. Tempat itu sekarang sudah menjadi pertokoan dan bekas-bekasnya sedikit pun tidak ada lagi.

Nama tersebut sengaja tidak dieja dengan cara sekarang, supaya kita bersama dapat memisahkan antara kata-kata *darus*, *salam* yang dikenal namun dengan *Dar Oes-Salam*, tempat tinggalnya *Oom Sos*, ya *Oom-Dokter*, ya *Ndara Sosro*, ya *Dokter Cai*, yang setelah suatu kejadian menamakan dirinya sebagai MANDOR KLOENGSOE, sebagaimana terpahat pada papan nama yang digantungkan di dinding kamar depan, kamar *Ndara* sendiri.

DAR-OES-SALAM merupakan suatu rumah, lain dari pada yang lain. Seorang dokter Denmark, Dr. Grunecck pernah

berkata dalam bahasa Belanda "*Er is geen plek in de wereld die zo'n aroma heeft als DAR OES "SALAM"*", yang disalin dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah: "Tak ada tempat di dunia, yang punya suasana ayu dan harum seperti "DAR OES – SALAM".⁴ Mungkin kata-kata itu agak berlebih-lebihan, karena kita tidak mengetahui apakah Dr. Grunec sudah pernah menjelajahi seluruh dunia. Walau pun demikian kita sedikit banyak dapat menggambarkan keistimewaannya suasana Dar Oes Salam di mana bertempat tinggal R.M.P. SOSROKARTONO.

Pertama-tama DAR OES–SALAM ada di Poengkoerweg/ Jalan Pungkur No. 7, Bandung milik tuan Hanapi, Cibeureum Cimindi. Rumah yang sebelumnya disohorkan ada mahluk halus yang menjaganya. Dalam tahun dua puluhan gedung itu dipakai sebagai sekolah rakyat dari kaum pergerakan yang dulu dikenal sebagai kaum merah. Setelah perkumpulan itu dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan gedung sekolahnya ditutup, lama sekali rumah itu dosong. Perkumpulan kesenian Jawa. *Mardi Bekso Iromo* mempergunakan gedung itu sebagai *clubhuis*, yang pada tahun 1926 dipakai untuk resepsi Kongres Jong Java, yang mencetuskan "*De eerste Indonesische Eenheidsgedachte*" (Angan-angan pertama mengenai kesatuan Indonesia). Setelah *Mardi Bekso Iromo* dengan kamar bola Jawa, *Mardi Harjo* menjadi satu dan pindah di Pangeran Soemedangweg, gedung itu disewa oleh Taman Siswa, yang baru mendirikan cabangnya di Bandung di bawah pimpinan adik (saudara muda) Ki Hajar Dewantoro, R.M. Soertiman Soerjodipoetro, yang didatangkan dari Yogyakarta. Pembukaan sekolah Taman Siswa ini dapat menampung anak-anak Indonesia yang terlantar, tak dapat meneruskan pelajarannya, karena sekolahan-sekolahan rakyat dari kaum merah ditutup.

Setelah sekolah Taman Siswa pindah ke Cikakak, dan gedung Poengkoerweg No. 7 kosong, Soenodo dengan kawan-kawannya para *pinisepuh*, mendirikan kelompok Monosoeko, dengan usaha untuk menyewa gedung tersebut lengkap dengan

langganan lampu dan air, telepon dan pemeliharaan seluruhnya untuk *Ndaro Sosro*, yang setelah meninggalkan perguruan Taman Siswa sebagai pemimpin *Nationale Middelbare School* telah berpindah dua kali, pertama menumpang di rumah Tomodiwirjo Jalan Saninten No. 37 Bandung dan kedua kalinya di rumah Ibrahim Tirtokoesoemo, yang namanya atas nasehat *Ndara* diubah menjadi Tirtosapetro, di Jalan Dr. Rijpwijk No. 15 Bandung. Di rumah itulah *Ndara* mulai menerima tamu yang mohon pertolongan karena sakit atau susah, dalam berbagai bentuk.

Keajaiban "pengobatan" *Ndara Sosro* mengenal untuk penyembuhan segala jenis sakit dan kesusahan makin dikenal dan makin banyak tamu dari berbagai penjuru datang di rumah pondokan yang kecil dan sempit itu.

Amal dan pengabdian Drs. Sosrokartono kepada sesama hidup, sedikit banyak memberi pengaruh pada masyarakat sekitarnya. Beberapa anggota pengurus Budi Utomo cabang Bandung terdiri dari Soenodo, Soelarjo, Soerjadi dan Asmono Pringodigdo mendekati beliau, Pencita pada Drs. Sosrokartono tidak terbatas pada suku bangsa Jawa saja, akan tetapi banyak juga warga Sunda dan suku-suku bangsa Indonesia lainnya bahkan juga bangsa Tionghoa, Belanda dan Denmark seperti dokter Grunneck yang tersebut di muka. Para pencinta tersebut lalu membentuk kelompok *Monosuko* artinya sukarela, diasuh oleh Bapak Soenodo, dokter hewan dari *Gemeente/Kotamadya* Bandung yang menjadi wakil ketua Budi Utomo cabang Bandung dan Ibnu Soenodo.

Rumah di Poengkoerweg No. 7, yang pada waktu itu menjadi sekolah rakyat dan *Clubgebouw Mardi Bekso Iromo* juga dipakai untuk latihan kependuan *Nationale Padinders Organisatie* (NPO) dipimpin oleh Soediani. Sesudah menjadi sekolah Taman Siswa dipakai untuk latihan kependuan *Indonesische Nationale Padvinder Organisatie* (INPO), dipimpin oleh Abdul Rachim serta disewa dan dilengkapi dengan seperlunya oleh

Monosuko dan dipersemaikan kepada Ndara Sosro. Sejak saat itu 30 April 1930 Ndara Sosro menempati gedung tersebut dan diberi nama DAR OES – SALAM, tempat yang tenang.⁵

Mulai tanggal 30 April 1930 Ndara menempati gedungnya DAR OES – SALAM. Sejak saat itu mulailah sejarah DAR OES – SALAM nya *Pepunden Swargi Bendoro Drs. RMP Sosrokartono*.

Jadi *Sang Alif*, kalau kita masuk dalam pendapa "DAR OES – SALAM", maka yang mengambil perhatian kita adalah gambar huruf Alif, yang digantungkan di atas ambang pintu besar, yang menghubungkan ruang pendapa dengan ruang tengah. Gambar Alif itu dibuatnya dari benang berwarna biru tua di atas kain biru muda.

Menurut Soepardi, yang mendampingi Ndara Sosrokartono lebih dari seperempat abad dan menyaksikan sendiri bagaimana cara Swargi membuat *Sang Alif*, bercerita, bahwa tiap malam setelah para tamu sudah pulang Ndara masuk kamarnya dan dibantu Soepardi membakar menyan sehingga asapnya mengepul memenuhi seluruh ruang kamarnya. Dan dengan menahan napas Ndara menyulam gambar Alif dengan benang berwarna biru tua, satu per satu, sehingga napasnya habis. Tengah malam berikutnya pekerjaan itu diteruskan sampai selesai. Selama mengerjakan penyulaman, tiap hari Ndara membarengi dengan berpuasa.

Itulah *Sang Alif* yang digantungkan di atas ambang pintu besar di pendapa. Pada waktu Drs. Sosrokartono almarhum pertama kali, tanggal 9 Mei – tanggal 21 Mei 1931 pergi ke Sumatera Utara atas undangan para Sultan di sana, para tamu yang tidak mengetahui atas kepergian Swargi, tentu saja merasa kecewa sekali, karena keinginannya akan menghadap Ndara tidak terakbul, terutama mereka yang datang dari jauh dan biasanya untuk keperluan yang bagi mereka penting sekali. Telegram dan telepon yang biasanya dijawab oleh Ndara sendiri, terpaksa dibalas dengan berita, bahwa Drs. Sosrokartono sedang keluar

kota Bandung. Keadaan begitulah yang selalu dihadapi oleh para warga "Monosuko". Mereka yang mendukung DAR OES – SALAM dengan kerelaan hati, kalau Swargi Ndara tidak ada di DAR OES – SALAM.

Ketika Ndara akan mengadakan perjalanan kedua kalinya, tanggal 3 Juli – 18 Juli 1931, ke Sumatera Utara lagi, maka para warga Monosuko kelihatan gelisah.

Ndara Sosrokartono memutuskan untuk mengadakan wakil, kalau sedang tidak ada di DAR OES SALAM. Anehnya, yang ditunjuk oleh Oom Sos/Ndara Sosro sebagai wakil bukan salah satu dari warga atau pinisepuh-pinisepuh, bukan juga salah satu dari para pembantu yang berdekatan. Tidak, Swargi Drs. Sosrokartono membuat gambaran Alif warna hitam di atas kertas putih yang cukup besar dan gambar ini ditempatkan di antara dua pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan ruang belakang dan ditutup pakai kain biru muda seperti gordena, yang dapat dibuka, kalau diperlukan untuk menolong yang memohon *air husada*, dan ditutup lagi kalau sudah selesai.

Yang ditunjuk pertama-tama untuk melayani para tamu yang minta air adalah Parmadi, waktu masih jejaka dan sekolah AMS di Bandung, yang diperkenankan oleh Swargi tinggal DAR OES SALAM dan pemuda ini dibantu oleh para pembantu yang dekat lainnya, terutama Soepardi sendiri.

Keterangan Soepardi tentang cara pembuatannya Sang Alif dengan *tapabrata* itu cocok dengan apa yang tertulis dalam surat Ndara dari Tanjungpura tanggal 26 Oktober 1931, yang berbunyi : "*Masang Alif Poeniko inggih kedah mawi saron lampah. Boten kenging kok ladjeng dipoen tjentelaken kema-won ladjeng dipoen tilar kados mepe rasoekan*". Artinya dalam bahasa Indonesia adalah "Memasang Alif itu seharusnya juga dengan laku. tidak boleh menggantukan itu begitu saja dan ditinggalkan seperti menjemur pakaian".⁶

Dan laku/jalan yang ditempuh Ndara tidak begitu mudah atau ringan sehingga gampang ditiru oleh orang dewasa. Yang

melayani tamu untuk memohon air di depan *Sang Alif* tidak boleh banyak-banyak. Botol dan/atau tempat air lainnya harus ditempatkan oleh pembantu di tengah-tengah meja kecil, yang ditandai dengan titik silang dua garis, tepat di bawah *Sang Alif*. Pemohon berdiri di depan gambar *Sang Alif* dan diminta memanjatkan permohonannya dengan batin. Pembantu menyertai dengan berdiri diam di sampingnya. Setelah beberapa waktu, pemohon diperkenankan mengambil botolnya dengan diberi petunjuk bagaimana cara memakai dan menyimpannya botol air dari Drs. Sosrokartono. Umumnya mereka dipesan agar membawa dan menyimpan botol air tersebut dengan baik-baik, jangan sampai dapat dilangkahi, jadi harus diletakkan di atas. Kalau sudah dapat air harus terus pulang, jangan mampir-mampir di tengah jalan. Mereka yang sakit atau yang susah setiap hari harus minum air paling sedikit tiga kali sehari. Sisa air yang diminum diusapkan pada bagian yang dirasakan sakit. Kalau air dalam botol tinggal sedikit harus diisi dengan air minum penuh kembali dengan ingat kepada Ndara Sosrokartono. Kalau kehabisan sama sekali boleh datang di DAR OES SALAM untuk menghadap Ndara atau *Sang Alif* lagi.

Kalau Ndara kebetulan sakit atau tidak enak badannya, Soepardi disuruh memintakan air kepada *Sang Alif*. Dan Ndara pernah pesan kepada Soepardi, supaya lebih berhati-hati menghadap *Sang Alif* daripada kalau menghadap di depan Oom Sos, karena *Sang Alif* tidak memandang bulu, hanya menjalankan tugas menurut semestinya. Kalau yang minta tidak dengan kepercayaan penuh, tidak jujur, dan dengan hati yang tidak *beres*, botolnya bisa pecah. Ndara sendiri manusia biasa masih punya belas kasihan kepada pasiennya.

Sang Alif merupakan suatu fenomena, menurut Warga Paguyuban Putri/Totilowati, K.R.M.T.A. Poernomo Hadiningrat almarhum menamakannya sesuatu mujijat, umum mengatakan suatu keajaiban.

Sampai hari wafatnya Drs. Sosrokartono tanggal 8 Februari

1952, *Sang Alif* berfungsi sebagai wakil, kalau beliau berhalangan menerima tamu dan menolong ribuan orang yang memerlukan pertolongan, bersih atau *suwung* dari pamrih apa pun. Setelah Drs. Sosrokartono meninggalkan alam fana ini *Sang Alif* yang ditinggalkan di DAR OES SALAM masih berfungsi seperti sedia kala seperti waktu bendaranya masih hidup dan menolong mereka yang memerlukan dengan pelayanan para warga Monosuko yang berdekatan dengan Ndara, siang dan malam.

Pada waktu rumah DAR OES SALAM tidak dapat dipertahankan lagi, tepat setelah memperingati 1000 hari wafatnya Swargi, maka atas persetujuan para ahli waris *Sang Alif* dipindahkan ke Kudus, menyusul Bendaranya dan digantungkan di dinding dalam gedung *sarehan leluhur Hyang Sosrokartono, Kanjeng Kiyai Tjondronegoro*.

Setelah dibuatkan almari kaca oleh para warga dan pengagum Drs. Sosrokartono, *Sang Alif* dipindahkan ke pendapa rumah Kanjeng Poernomo Hadiningrat di Jalan Muria. Sejak meninggalnya Kanjeng Poernomo *Sang Alif* diboyong di Jakarta oleh putranya Ir. RM. Djoko Mintoro Hadiningrat.

Teranglah bahwa yang terkenal sebagai Pepuden kita Bendara Drs. RMP Sosrokartono; ya Oom Sos, ya Oom Dokter, ya Mas Kartono, ya Ndara Sosro, ya Dokter Cai, ya Juragan Dokter Pangeran, dan yang menamakan dirinya sendiri dengan Mandor Klungsu atau Djoko Pring, pada saat itu dengan DAR OES SALAM dan *Sang Alif*nya merupakan Tritunggal, yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sedangkan para warga Monosuko dapat diperlambangkan sebagai galangan, yang mengembani permatanya yang cemerlang cahayanya.

Kiranya jelas bagi kita bagaimana sejarah Sosrokartanan, Dar Oes Salam, dan *Sang Alif* yang merupakan Tritunggal dan merupakan sesuatu yang diyakini oleh Prof Mr. Kontjoro Poer-

bopranoto, di samping ia sebagai penganut agama Islam yang taat. Sejak dari para leluhurnya Prof. Mr. Koentjoro adalah penganut agama Islam walaupun tidak semurni di tempat lain, karena masih ada pengaruh Hindu di lingkungannya.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh Prof. Mr. Koentjoro Perbopranoto selama menjadi Ketua Umum Paguyuban Sosrokartanan Surabaya ialah melakukan ceramah-ceramah dan diskusi, panel yang dilakukannya secara berkala, di antaranya: Ceramah pada tanggal 23 April 1968, 13 Agustus 1969, 2 Januari 1973, 22 Maret 1977 dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini. Ceramah, diskusi, pemikiran itu sekitar : *Laku, Ilmu Kantong Kosong, Interpretasi impian, Ego dan Super Ego, Panembah, Samadi atau Meditasi, Mendekati Hyang Sosrokartono, Ilmu Kebatinan di Tengah-tengah Ilmu Pengetahuan Modern, Serat Babad Diponegaran, Mengapa Kita Perlu Belajar Ilmu Kebatinan, Macam-macam Diam, Manusia dan Alam Semesta, Faham Moral dipelbagai Agama dan Keyakinan*, dan lain-lain lagi. Pendeknya selama Paguyuban Ssrokartanan dipimpin sebagai Ketua Umumnya Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto sangat produktif dalam mengadakan diskusi dengan sekaligus menerbitkan majalah "*Renungan Rabu Paing*". Majalah Renungan Rabu Paing sudah mencapai nomor ke XV dengan tiap nomor berkisar sekitar 100 – 150 halaman dalam bentuk buku setengah folio.

Setelah Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto wafat, untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Paguyuban Sosrokartanan dan selanjutnya dalam usaha menyederhanakan serta menyesuaikan keadaan seksi-seksi dengan kebutuhan dan rencana kerja Pengurus, maka setelah diadakan musyawarah dan dengar pendapat antara pengurus dengan para warga dan sesepuh, akhirnya pada tanggal 5 Juni 1978 telah disusun dan diserahkan Pengurus Paguyuban Sosrokartanan Surabaya, sebagai Ketuanya yang menggantikan Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto, ialah Dr. Triman Prasadio. (Pengurus lengkapnya lihat lampiran).

5.2 Anggota dan Ketua Tim Peneliti Hari Jadi Kota Surabaya

Gagasan untuk berusaha menemukan kembali data-data sejarah tentang usia Surabaya timbul pada Prof. Mr. Koentjoro setelah peringatan HUT Jakarta Raya dilaksanakan berdasarkan hasil penggalian data-data sejarah oleh almarhum Prof. Mr. Dr. Soekanto bekas Kepala Arsip Nasional Jakarta.⁷

Gagasan tersebut untuk pertama kalinya ia utarakan dalam satu tulisan dalam ruang Suara Pembaca di dalam harian *Surabaya Post* tanggal 10 September secara amat singkat dan sederhana, dengan maksud untuk menarik perhatian tokoh-tokoh warga Kota Surabaya terutama dari pihak Pimpinan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya. Tulisannya itu kemudian secara langsung disampaikannya pula kepada Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dalam dua surat masing-masing tertanggal 18 Maret 1973 dan 1 April 1973 berisikan sebuah penjelasan singkat tentang gagasan tersebut, bahwa menurut perkiraan Prof. Mr. Koentjoro usia Surabaya itu ialah sekitar 700 tahun lebih tua daripada Jakarta Raya.

Gagasan tersebut ternyata mendapat perhatian Walikota Kotamadya Surabaya. Pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya yang selama itu diadakan pada tiap tanggal 1 April berdasarkan tanggal berlakunya *Staatsblad Ned. Indie* tahun 1906 No. 149 tentang pembentukan "*Gemeente Soerabaja*" berdasarkan *Decentralisatie-Besluit* 1905, maka pada tanggal Hari Jadi Kota Surabaya tanggal 2 April 1973 di muka apel karyawan Kotamadya Surabaya di Taman Surya Walikota mengatakan bahwa ia tetap tidak *sreg* untuk memperingati ulang tahun Surabaya pada tiap tanggal 1 April, karena sebelum *Gemeente* berdiri kota Surabaya tentunya sudah ada.⁸

Pada pidato peringatan itu Walikota mengungkapkan bahwa ia telah membentuk sebuah panitia (Tim) untuk meneliti data-data sejarah yang benar tentang lahirnya Surabaya.

Pembentukan Tim Penelitian Hari Jadi Kota Surabaya itu akhirnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 2 April 1973 No. 99/WK tanggal 2 April 1973 Juncto No. 109/WK dan tanggal 10 April 1973.⁹ Dasar pemikirannya ialah, bahwa hari ulang tahun kota Surabaya pada tanggal 1 April, adalah saat peresmiannya sebagai *Gemeente* Surabaya yang terjadi pada tanggal 1 April 1906 oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Tanggal hari ulang tahun kota Surabaya tersebut di atas (1 April) selain berbau kolonial juga tidak sesuai dengan kenyataan, karena Surabaya sudah ada jauh sebelum tanggal 1 April 1906 tersebut, yaitu sudah ada pada zaman Pemerintahan Prabu Kartanegara Sekitar abad ke-13.

Susunan Tim Penelitian Harijadi Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Prof. A.G. Pringgodigdo, SH. Pensiunan Rektor Universitas Airlangga selaku Penasehat merangkap Anggota.
2. Prof. Drs. S. Wojowasito, Maha Guru IKIP Malang selaku Ketua I merangkap Anggota.
3. Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto, Maha Guru Fakultas Hukum Universitas Airlangga, selaku Ketua II merangkap Anggota.
4. Drs. Prayogo, Kepala Pembinaan Museum Jawa Timur selaku Ketua III merangkap Anggota.
5. Kolonel Laut Dr. Sugiyarto, Kepala Staf Kekaryaannya Daerah Angkatan Laut 4 Surabaya sebagai Anggota.
6. Drs. M.D. Pakiding, Pegawai Kotamadya Surabaya selaku Sekretaris merangkap Anggota.
7. Drs. Issatrijadi, Dosen pada Fakultas IKIP Surabaya selaku Anggota.
8. Drs. Heru Soekadri K. Dosen pada Fakultas Sosial IKIP Surabaya selaku Anggota.
9. Banoe Iskandar, Pensiunan Kepala Inspeksi Kebudayaan Jawa Timur selaku Anggota.

10. Wiwiek Hidayat, Pimpinan IKBN Antara Cabang Surabaya/ Anggota Dewan Kesenian Surabaya, selaku Anggota.
11. Tajib Ermadi, Redaksi majalah Joyoboyo selaku Anggota.
12. Soenarto Timoer, selaku Anggota.
13. Soeroso, Pensiunan Komisaris Polisi, selaku Anggota.

Kegiatan-kegiatan :

Karena diperlukan data-data faktual, korek, relevan dan valid, maka Tim membentuk tiga Panitia *Ad Hoc*, yaitu :

- a. Proses Historis Surabaya, diketuai oleh Prof. Drs. S. Wojo-wasito.
- b. Mythos Surabaya, diketuai oleh Drs. Heru Soekardi K.
- c. Lokasi Surabaya, diketuai oleh Wiwiek Hidayat.

Ketiga panitia *ad hoc* tersebut dengan secara mendalam mengadakan penelitian. Metode penelitian adalah sebagaimana lazim dilakukan dalam penelitian ilmiah, *library research*, *field research*, dan *interview* (penelitian perpustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara).

Tim Peneliti bertugas merumuskan tanggal yang tepat berdasarkan sejarah tentang Hari Jadi Kota Surabaya, dan bertugas kurang lebih selama enam bulan terhitung mulai tanggal 6 April 1973 sampai dengan bulan September 1973.

Setelah mengadakan penelitian dengan secermat mungkin selama kurang lebih enam bulan, maka Tim telah sampai kepada kesimpulan, bahwa ada tiga tanggal yang dapat diajukan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya cq Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya sebagai tanggal Hari Jadi Kota Surabaya. Ketiga tanggal tersebut mempunyai peristiwa dan riwayat sendiri-sendiri, tetapi satu sama lain masih ada pertautan dan kaitannya. Selain itu diajukan pula satu *minderheids nota* yang berisi pendapat dari Soeroso.

Perlu diketahui bahwa tanggal yang pasti sebagaimana halnya tanggal kelahiran atau Hari Jadi seorang bayi bagi tim-

bulnya kota Surabaya tidak mungkin ditemukan, karena kota Surabaya dalam perkembangannya adalah *multinuclear* dan terdiri atas beberapa *settlements* yang prosesnya lama dan bersifat evolusi.

Tanggal-tanggal yang diajukan tadi adalah:

1. *Tanggal 31 Mei 1293 Masehi*, yaitu saat kemenangan tentara Raden Wijaya atas tentara Tartar, berdasarkan laporan ilmiah Drs. Heru Sukadri, Kolonel Laut Dr. Sugiyarto, dan Wiwiek Hidayat.^{1 1}
2. *Tanggal 11 September 1294 Masehi*, yaitu saat penganugerahan tanda jasa kepada kepala desa dan rakyat desa Kudadu atas jasanya menyelamatkan Raden Wijaya, berdasarkan laporan ilmiah Prof. Mr. Koentjoro Poerboprano.

Lebih lengkapnya laporan ilmiah dari Prof. Mr. Koentjoro Poerboprano adalah sebagai berikut : Sebetulnya penyebutan nama *Curabhaya* itu untuk pertama kalinya secara resmi dan tertulis ialah dalam *Prasasti Trowulan* yang ditetapkan oleh Prabu Hayam Wuruk Rajasanegara dari Majapahit tahun 1358 M. Kemudian menyebutkan nama Surabaya hingga dua kali dalam kekawin Empu Prapanca *Negarakratagama* (tahun 1365 M). Namun *G.H. Von Faber*, dahulu kepala yayasan kebudayaan di Surabaya dalam bukunya "*Er is een stad geboren*" (tahun 1953) berkeyakinan bahwa kota Surabaya telah dibentuk oleh Prabu Kartanegara dari Singasari pada tahun 1270, di waktu mana menurut pendapatnya telah terdapat Kampung Surabaya di dekat Tegalsari sekarang. Dari penyelidikan lain diperoleh bahwa nama *Curabhaya* itu ialah perubahan nama *Hujung Galuh* (atau *Sugalu/Janggala*), nama-nama sudah dikenal sejak tahun 905 M. yakni dalam satu Prasasti kuno *Prasasti Balitung*.^{1 2}

Di samping itu ada pendapat pula bahwa nama *Surabaya* itu ialah perubahan dari nama *Ampeldhenta* di zaman kekuasaan Raden Rachmat atau Sunan Ngampel (tahun 1486 M). data-data sejarah itu kesemuanya perlu diselidiki lebih jauh untuk

dapat menentukan hari jadi Surabaya secara lebih mantap dan dapat dipertanggung jawabkan menurut sejarah. Dalam hal ini kita harus merasa lebih beruntung dapat mengumpulkan beberapa sumber tertulis mengenai sejarah Jawa Timur baik berupa buku-buku kuno seperti *Pararaton*, *Nagarakratagama* dan lain-lain namun terutama prasasti-prasasti kuno yang sebagian besar ditemukan kembali, meskipun tidak semua secara lengkap.

Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto, berhubung ia tidak memiliki keahlian profesional dalam bidang sejarah, maka metode yang digunakannya dalam mengadakan pendekatan data-data historis tentang terbentuknya Kota Surabaya hanyalah merupakan metode umum yang deduktif.

Periode pertama itu Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto memulai dengan tahun munculnya Ujung Galuh pada tahun 905 M hingga sekarang. Pendekatan secara penggalan periode pertama itu ia mulai dari belakang, yakni dari saat Kotamadya Surabaya ada sekarang dan berangsur-angsur mundur hingga batas kemungkinan yang paling tua, yakni tahun 905 M (Ujung Galuh). Sejarah Surabaya ini kemudian ia bagi ke dalam enam periode, yakni :

- I. periode *Kemerdekaan*;
- II. periode *Kolonial*;
- III. periode *Ampeldhenta*;
- IV. periode *Majapahit*;
- V. periode *Kartanegara*;
- VI. periode *Hujung Galuh*.

Periode pendudukan Balatentara Jepang yang hanya 3½ tahun lamanya, di mana *Stadsgemeente* Surabaya disebut *Surabaya - Shi*, dari sudut sejarah bagi keperluan penelitian hari jadi Kota Surabaya dapat diabaikan.¹³

Dalam periode I : *Kemerdekaan* terdapat tiga tonggak mengenai pembentukan Surabaya sebagai : a. *Kotamadya* yakni berdasarkan pasal peralihan (Pasal 88 ayat (1) Sub c) UU tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Tahun 1965 No. 18

tanggal 1 September 1965; b. *Kotapraja* berdasarkan UU No. 2 tahun 1965 mulai tanggal 6 Pebruari 1965 dan c. *Kota Besar* berdasarkan UU Pembentukan tahun 1950 No. 16, mulai tanggal 15 Agustus 1950 sebagai pelaksanaan UU Pokok Pemerintahan Daerah tahun 1948 No. 22.

Dalam periode II : *Kolonial* terdapat dua tonggak mengenai pembentukan Surabaya (ejaan dulu Surabaja); d. Sebagai *Stadsgemeente*, yakni dengan *Instelling ordonansi* berdasarkan *Bestuurshervorningswet* 1925 yang dimuat dalam *Staatsblad N.I.* No. 504 tahun 1928, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929 sebagai *Gemeente Surabaya* berdasarkan *Desentralisatie-Besluit* 1905 dengan *Instellingsbashuit* yang dimuat dalam *Staatsblad* 1906 No. 149 mulai 1 April 1906, sebagaimana telah disinggung di atas, hari bulan inilah yang sampai tahun 1974 diperingati Pemerintah Kotamadya Surabaya sebagai HUT Kotamadya Surabaya, hal mana dalam pidatonya peringatan HUT Kotamadya Surabaya yang ke 67 tanggal 2 April 1973 itu oleh Walikota sendiri dianggapnya masih berbau kolonial.

Periode ke III meliputi pendapat 1), bahwa Surabaya itu ialah perubahan nama *Ampeldhenta*. a. Di bawah kekuasaan Raden Rahmat atau Sunan Ngampel ditandai tahun 1486 (tanggal 3 Nopember) menurut datering Prasasti Jiyu.

Dalam Periode ke IV : *Majapahit* terdapat empat tonggak sejarah yang mempunyai hubungan erat dengan sejarah pembentukan Surabaya: I. penyebutan nama *Curabhaja* dalam Prasasti Trowulan (tahun 1358) sebagai *naditiradeca* dalam deretan nama-nama desa penyeberangan yang lain-lain; Prasasti ini ditetapkan dalam Pemerintahan Prabu Hayam Wuruk Rajasana-gara pada tanggal 7 Juli 1358; d. Penetapan *wilayah (wanwe) Kudadu* sebagai wilayah perdikan oleh Raden Wijaya selaku raja pertama Negara Majapahit. Sebagai tanda jasa bagi Kepala Desa dan rakyat Kudadu yang dianggap sangat berjasa dalam memberikan pertolongan dan perlindungan yang efektif kepada Raden Wijaya serta para perwira pengiringnya, untuk menyu-

sun kekuatan tempur baru dengan bantuan Adipati Wiraraja Sumenep (Madura). Pernyataan Prabu Wijaya ini dituliskan secara resmi dalam Prasasti Gunung Butak yang bertanggal 11 September 1294. 3) Dalam periode *Majapahit* ini (oleh Drs. Heru Soekadri) dimajukan sebagai hari bersejarah yang mungkin berhubungan dengan penggantian nama *Hujung Galuh* menjadi *Cürabhaya* ialah hari pengusiran tentara/armada Tartar oleh pasukan-pasukan Raden Wijaya dari Hujunggaluh yang diperkirakan pada hari bulan 31 Mei 1293.

Periode berikutnya (V) ialah : *Periode Kartanegara* yang ditandai oleh arca Djoko Dolok di Taman Apsari-Simpang. Dalam Prasasti yang berhubungan dengan berhasilnya ekspedisi Pamalayu serta penyatuan seluruh Nusantara oleh Prabu Kartanegara (Singosari) itu didapati tanggal 14 September 1293 M.

Periode VI *Hajunggaluh* hanya memberikan pembatasan munculnya nama Ujung Galuh sekitar tahun 905 dalam satu Prasasti Balitung. Sementara ini tidak diselidiki lebih jauh kemungkinan terbentuknya Surabaya sebelum tonggak sejarah tersebut.

Untuk menjelaskan secara skematis adanya tonggak-tonggak sejarah yang mungkin ada hubungannya dengan terbentuknya kota Surabaya melalui enam periode sejarah dari periode Kemerdekaan hingga periode Hujunggaluh itu, maka bersama ini dilampirkan sebuah *Skema* tentang periodisasi itu.

Pengusulan data-data yang merupakan kesimpulan yang diajukan oleh Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto adalah sebagai berikut :

Mengambil langkah jauh penggalian data-data itu ke belakang, maka dengan alasan seperti tersebut di atas kita dapat tinggalkan periode I : Kemerdekaan dan periode II : Kolonial, karena sudah terang terbentuknya Surabaya sudah terjadi dalam suatu masa sejarah jauh sebelum itu.

Dengan alasan bahwa nama *Curabhaya* sudah tertulis dalam kekawin Prapanca *Nagarakertagama* (tahun 1365 M) bahkan sudah sebelum itu di dalam Prasasti Trowulan (tahun 1358 M), data-data yang membuktikan bahwa Surabaya sudah terbentuk sebelum tahun-tahun tersebut, maka periode III Ampeldhenta (tahun 1486 M) dapat kita lampau pula.

Maka perhatian kita untuk menemukan data-data yang sesuai dengan sejarah pembentukan Surabaya itu, kita pusatkan pada periode IV : Majapahit seperti telah dicatat tadi, maka nama *Curabhaya* tertulis untuk pertama kalinya dalam Prasasti Trowulan yang bertanggal 7 Juli 1358. Nama *Curabhaya* itu disebut dalam satu deretan dengan nama 24 desa lainnya yang ditunjuk pemerintah Kerajaan Hayam Wuruk Majapahit sebagai *naditira* atau pos penyeberangan sungai Bengawan yang diberi hak/kewajiban memungut bea penyeberangan. Maka boleh ditarik kesimpulan bahwa *naditiradesa Curabhaya* dan lainnya yang disebut di dalam Prasasti Trowulan itu, dewasa itu (tahun 1358 M) sudah merupakan desa yang maju perekonomiannya, sehingga ditetapkan menjadi desa pemungutan pajak penyeberangan. Maka dapat dikatakan dewasa itu desa *Curabhaya* sudah merupakan kota kecil-kecilan. Berhubung dengan hal-hal tersebut kita condong menggali lebih jauh ke belakang untuk menemukan data-data yang lebih tua tentang terbentuknya Surabaya itu.

Mengingat nama Surabaya itu mengandung arti kepahlawanan atau *keberanian dalam menghadapi bahaya*, maka seperti disinggung di atas ada alasan bagi Von Faber untuk menganggap Prabu Kartanegara sebagai raja Singasari yang membetuk kota Surabaya itu, yakni setelah keamanan sekitar Tegalsari – Simpang dapat dipulihkannya kembali di tahun 1270. Namun data-data yang ditemukan Von Faber itu tidak dapat diperkuat dengan penulisan-penulisan sejarah yang diakui kebenarannya, sehingga perlu diperoleh data-data lain yang lebih mantap dan lebih dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu sejarah.

Maka peristiwa besar yang mengandung unsur kepahlawanan di sekitar peristiwa yang ditandai dengan patung Djoko Dolok dalam penulisan Kartanegara itu ialah dihalaunya tentara Tartar oleh pasukan Raden Wijaya tahun 1293 M. Dengan mengakui peristiwa sejarah yang terjadi dalam tahun tersebut di Ujung Galuh sebagai latar belakang historis yang dapat menetapkan satu perubahan besar dalam perkembangan kota pelabuhan Hujung Galuh itu menjadi Surabaya, yang tentunya tidak terjadi dalam satu detik sejarah yang dapat dipastikan tanggal dan harinya, maka Prof. Mr. Koentjoro lebih condong untuk mengambil satu data konkrit sesudah peristiwa Hujung Galuh itu yang paling dekat, yakni tanggal resmi penulisan Prasasti Gunung Butak, *11 September 1294 M.* tentang pemberian penghargaan oleh Prabu Wijaya Kertarajasa kepada Kepala desa dan rakyat Kudadu untuk segala jasanya menurut sejarah telah memungkinkan terbentuknya negara kesatuan Majapahit dalam tahun 1294 M itu. Tanpa kemenangan Raden Wijaya berkat bantuan *Wanwe Kudadu* itu niscaya kerajaan Majapahit tidak terbentuk dan perkembangan sejarah Surabaya tentu akan berlainan adanya. Maka usia Surabaya dihitung sejak tahun 1294 M itu sampai bulan September 1973 ialah genap 679 tahun.¹⁴

Demikian laporan ilmiah Prof. Mr. Koentjoro Poerbopronoto sehubungan dengan hasil penelitiannya terhadap usia Surabaya dalam rangka mencari Hari Jadi Kota Surabaya yang sebenarnya.

3. *Tanggal 7 Juli 1358 M*, yaitu suatu tanggal pada Prasasti Trowulan yang menyebutkan untuk pertama kalinya (dalam Prasasti itu) nama Surabaya sebagai salah satu tempat penambangan kepulauan-pulau Nusantara (pelabuhan interinsuler). Laporan ilmiahnya dikemukakan oleh Drs. Issatriadi dan Sunarto Timur.¹⁵

Adipati Surabaya menurut Pakem melakukan pemerintahan. Ini hasil laporan Soeroso, yang oleh Tim diadjudkan sebagai *minderheids nota* karena dianggap terlalu muda.

Hasil penelitian itu diajukan kepada Walikota Kotamadya Surabaya pada tanggal 27 September 1973, dengan surat nomor 36-II-73-TP. HJKS. Pada akhir surat itu tertulis kalimat sebagai berikut : "Akhirnya Tim mengusulkan supaya, setelah Bapak Walikota menetapkan pilihannya pada satu alternatif tersebut tadi, Tim Penelitian Hari Jadi Kota Surabaya serentak mendukung pilihan tersebut". Dan dengan surat keputusan Walikota No. 301-Wk tanggal 16 Oktober 1973, Tim Penelitian Hari Jadi Kota Surabaya secara resmi dibubarkan.

Berdasarkan pula Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 113/Wk/75, tanggal 18 Maret 1975, membentuk Tim Penyusun Buku Hari Jadi Kota Surabaya yang terdiri dari komposisi personalianya adalah sebagai berikut :

Penasihat	: 1. Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto 2. R. Soetopo Danoesobroto, SH.
K e t u a	: Wiwek Hidayat
Wakil Ketua I	: Kol. Laut Dr. Sugiyarto Tirtoatmojo.
Wakil Ketua II	: Drs. Heru Soekadri K.
Wakil Ketua III	: Kaptijono.
Sekretaris	: Drs. Alie Prayitno
Wakil Sekretaris	: Suparto Brata
Anggota-anggota	: Drs. M.D. Pakiding Hasan Ibrahim HS, SH. Let. Kol. Moenahir, Drs. J. Karmeni, H. Anas Tohi Syamsuddin, R. Soemono HS, BSc.
Pembantu	: Farid Dimiyati, BA.
Pelaksana	: Soenarto Timoer, Bambang Pramutih, Ir. Pribadi Soetadji. ¹⁶

Isi buku tersebut selain berisi sejarah hasil penelitian mencari Hari Jadinya Kota Surabaya, juga berisi antara lain :

1. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, persetujuan HJKS tanggal 31 Mei.
2. Penjelasan atas Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 02/DPRD/Kep./75 Tanggal 6 Maret 1975.
3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 64/WK/75, tentang penetapan Hari Jadi Kota Surabaya.
4. Sambutan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
5. Sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
6. Prakata oleh Penasihat Tim Penyusun Buku Hari Jadi Kota Surabaya oleh Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto di antaranya diucapkan demikian :

Sasanti : "Telah berdiri tegak teguh Baginda di Jawa dan daerah lain yang tunduk Di Sripalatikta tempatnya bersemajam, raja memerintah, menggerakkan jagat
Jika tidak, pergilah beliau berbakti kehadapan Hjang Atjalapati; ;jikalau di Djagala, tinggal di Surabaya, t'rus ke Bawun. (dikutip dari Drs. Slametmulyana : "Prapantja, NAGARAKERTAGAMA", Saloka XVII, pupuh 1 dan 5).^{1 7}

Buku Hari Jadi Kota Surabaya yang telah disusun oleh sebuah tim yang dibentuk dan bekerja berdasarkan SK Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, No. 113/WK/75, tanggal 18 Maret 1975. Surat Keputusan Walikotamadya ini adalah kelanjutan daripada S.K. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 6 Maret 1975 No. 02/DPRD/Kep/'75 yang menetapkan menyetujui usul Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya untuk menetapkan Hari Jadi Kota Surabaya pada tanggal 31 Mei 1293 M. Jadi akan diperingati setiap tahun tiap tanggal 31 Mei, yang penuh me-

ngandung kepribadian dan kepahlawanan Nasional. Sedang biasanya diperingati tiap tanggal 1 April yang berbau kolonial.

Dengan selesainya masalah Hari Jadi Kota Surabaya dengan pertimbangan :

1. Kemenangan pasukan Raden Wijaya yang dibantu oleh rakyatnya atas pengusiran tentara Tartar merupakan suatu kebanggaan rakyat Surabaya.
2. Kepahlawanan Raden Wijaya dengan rakyatnya juga menjiwai semangat rakyat Surabaya enam setengah abad kemudian pada peristiwa 10 Nopember 1945, suatu bukti bahwa sejak dahulu rakyat Surabaya dan bangsa Indonesia umumnya bertekad idak mau dijajah, seolah-olah telah ditakdirkan Surabaya memang dilahirkan sebagai Kota Pahlawan.^{1 8}

Itulah kegiatan Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto sebagai anggota, Ketua Tim Peneliti Hari Jadi Kota Surabaya dan Penasehat Tim Penulisan Buku Hari Jadi Kota Surabaya telah berusaha sedemikian rupa, walaupun belum merupakan hasil yang final seperti yang diharapkan, tetapi malah lebih baik daripada sebelumnya dilaksanakan tiap tanggal 1 April merupakan Hari Ulang Tahun Hari Jadi Kota Surabaya (HUT HJKS) yang penuh berbau kolonial dan non kepahlawanan.

BAB VI KARYA DAN PEMIKIRAN

Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan dan Ekonomi itulah judul skripsi/Tesis yang diajukan Koentjoro Poerbopranoto dalam ujian terakhir *Rechts Hoge School* (RHS) Jakarta tahun 1933 untuk mencapai gelar "*Meester in de rechten* (Mr)". Ia termasuk manusia yang tekun dan produktif dalam berorganisasi (sosial politik) maupun berkarya. Selama hidupnya telah menghasilkan sejumlah buku, kertas kerja, karya tulis dan artikel dalam berbagai majalah serta surat kabar, harian maupun mingguan. Selain itu menggalang persatuan dan kesatuan di negara ini. Hasil karya dan pemikirannya antara lain adalah :

1. "The Position and Organisation of the Working Committee (KNIP)", yang diterbitkan oleh Ministry of Information RI Yogyakarta, tahun 1948. Sifatnya terjemahan sedangkan karangan aslinya dalam *Mimbar Indonesia* tahun 1948 No. 49.
2. "Towards the Realization of a real Parliament", yang diterbitkan oleh Ministry of Information RI Yogyakarta, tahun 1948. Sifatnya terjemahan, karangan aslinya dalam *Mimbar Indonesia* tahun 1948 No. 49.

3. "Membentuk satu Sistem Pemerintahan bulat dalam Negara Kesatuan nanti". Dimuat dalam *Majalah Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri*, tahun 1951 (Tahun I No. 1). Merupakan pemikiran beliau cara-cara sistem Pemerintahan dalam suatu Negara Kesatuan.
4. "Pemilihan Umum di Perancis dan Belgia". Artikel dimuat dalam *Majalah Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri*, tahun 1955 – (Tahun II No. 2). Sifatnya suatu perbandingan sistem Pemilihan umum di negara yang berdasarkan demokrasi.
5. "Dasar-dasar Demokrasi dalam Tata Negara Kita". Artikel dimuat dalam *Majalah Hukum Persahi*, tahun 1952 No. 3. Sifatnya sebuah pemikiran tentang demokrasi yang paling cocok di Negara kita ialah Demokrasi Pancasila.
6. *Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara RI*. Buku diterbitkan oleh J.B. Wolters Jakarta – Groningen. Cetakan ke 1 tahun 1953 dan cetakan ke 2 tahun 1960. Sebuah pemikiran apakah hak warga negara dalam Negara Demokrasi yang dasar negaranya Pancasila.
7. "Hak-hak Dasar Manusia Pancasila dan Damai". Artikel dimuat dalam *Majalah Hukum Persahi*, terbitan tahun 1953 No. 2 dan 3 atau sebuah pemikiran Manusia Pancasila adalah untuk damai bukan mengundang pertengkar.
8. "Hak-hak Bebas Diri dan Dasar-dasar Kemasyarakatan". Artikel dimuat dalam *Majalah Indonesia* Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) tahun ke VI No. 1 tahun 1953.
9. "Hak Bebas Pikir dan Bebas Ibadat." Artikel dimuat dalam *Majalah Indonesia* Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) terbitan tahun 1954. Sifatnya cetak ulang *Majalah Hukum* tahun 1954 No. I – III.
10. "Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan dan Administrasi." Artikel dimuat dalam *Majalah Hukum Persahi*,

terbitan tahun 1954 tahun ke V No. 10. Pemikiran Preadvies untuk Kongres Bahasa Indonesia di Medan tanggal 28 Oktober 1954.

11. *Sedikit Tentang Pemerintahan Demokrasi*. Diterbitkan oleh Penerbitan Universitas, Surabaya 1960. Suatu pemikiran Tentang Pemerintahan Demokrasi yang sekaligus mendapat kata pengantar dari Prof.Dr. A.G. Pringgodigdo bekas Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
12. *Dasar-dasar Hubungan Warganegara dengan Pemerintah*. Diterbitkan oleh Penerbitan Universitas Airlangga tahun 1960. Sifatnya pidato pengukuhan guru Fakultas Hukum dan FKIP Universitas Airlangga berkedudukan di Malang.
13. *Kebudayaan Indonesia dan Manifestasinya dalam Hukum*. Diterbitkan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) Jakarta, 1963. Sifatnya merupakan sanggahan Dalam Seminar Hukum Nasional ke I, 1962.
14. *Musyawahrah untuk Mufakat*. Diterbitkan oleh Sekretariat MPR (Stensilan) Bandung tanggal 25 September 1963. Merupakan ceramah di muka rapat gabungan Komisi-komisi MPRS.
15. *Revolusi dalam Hukum dan Hukum dalam Revolusi*. Pidato Promotor promosi HC.Dr. H. Roeslan Abdulgani pada tanggal 10 Nopember 1964 di Universitas Airlangga Surabaya. Diterbitkan dalam bentuk cetak ulang oleh B.P. Prapantja, Jakarta, tahun 1965.
16. *Einiges Uber das hogere Bildungsweten in Indonesia*. Diterbitkan oleh Duetsche Indonesische Gesellschaft (DIG). Ceramah dimuat dalam *Mitteilunga blatt D.I.G.*, Holn, 8 Desember 1965.
17. "Beberapa Teori di Bidang Hukum Tata Pemerintahan." Diterbitkan oleh *Majalah Hukum Nasional* (PPHN), tahun 1969 No. 4. Merupakan Refesing Course Lustrum III Universitas Airlangga Surabaya.

18. "Segi Kemeliteran dalam Pemerintahan Negara." Diterbitkan melalui *Majalah Hukum Nasional* (LPHN), tahun 1969 No. 6 Merupakan Pidato Dies Natalis Universitas Airlangga tanggal 10 Nopember 1968.
19. *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*. Diterbitkan oleh P.N. Pradnya Paramita Jakarta. Cetakan pertama tahun 1953, cetakan kedua pada tahun 1959, cetakan ketiga tahun 1968, cetakan keempat tahun 1974 dan cetakan kelima tidak disebutkan, tetapi langsung pada cetakan keenam pada tahun 1979. Isi buku itu pernah diuraikan dalam sidang pleno General Assembly ke V UNESCO di Paris tahun 1951 oleh Ketua Delegasi Indonesia Prof.Dr. Sardjito di hadapan para utusan negara-negara merdeka seluruh dunia, lima dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Penjelasan Ketua Delegasi Indonesia Prof.Dr. Sardjito ternyata menarik perhatian kalangan internasional.¹

Dengan senang hati pula buku tersebut diterima oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Prof. Bahder Djohan dengan memberikan sambutan pada terbitan buku tersebut dengan mengatakan, "Buku telah memberikan gubahan mengenai Hak-hak Dasar Manusia dipandang dari sudut sikap hidup, yang diwujudkan dalam cita-cita Negara Republik Indonesia".²

Dilanjutkan oleh Prof. Bahder Djohan mengenai buku tersebut di antaranya, "Tidak dapat saya melepaskan diri daripada perasaan bangga dan bersyukur kepada Tuhan, bahwa cita-cita yang tinggi dan mulia terhadap Hak-hak Dasar Manusia dalam hakekatnya telah berurat berakar di dalam filsafah Negara Republik Indonesia.

Ada pula komentar buku itu oleh Mr. Wongsonegoro, Wakil Perdana Menteri I (bekas Menteri PP dan K) yang mengatakan, "Dari buku itu saya ingin menyatakan penghargaan atas isi buku tersebut, yang saya yakin sangat berharga terutama bagi para pemimpin Indonesia; dengan

kata-kata yang mudah untuk dimengerti. Pengarang telah berhasil menjelaskan materi yang berat-berat”.

Buku itu di samping dipergunakan dalam perpustakaan UNESCO di Paris, juga dipakai di Perguruan Tinggi seperti FKIP Universitas Pajajaran, khalayak ramai dan buku itu akhirnya dapat dipergunakan untuk pelajar-pelajar SMP dan SMA serta sebelumnya dengan catatan menambah satu sub paragraf pada Bab 6 yakni tentang ”Demokrasi” Pancasila” satu materi yang relevan sekali dengan bidang Pembangunan Nasional dewasa ini.⁴

20. ”Suatu Perubahan Radikal Dalam Sistem Demokrasi Perancis.” Diterbitkan oleh *Majalah Hukum Nasional* (LPHN) tahun 1971 No. 9 merupakan suatu perbandingan dalam perubahan demokrasi dalam satu negara seperti di Perancis itu.
21. *Beberapa Aspek Persoalan Otonomi Daerah*. Diterbitkan oleh Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tahun 1971 No. 7.
22. ”Sistem Otonomi Daerah yang Riil dan Seluas-luasnya.” Diterbitkan oleh *Majalah Hukum Nasional* (LPHN), tahun 1971 No. 3.
23. ”Tinjauan Umum tentang Hukum.” diterbitkan oleh *Majalah Hukum Nasional* (LPHN) tahun 1971 No. 4 merupakan Pidato pengarahan Moderator Panel Discussion UPAYA.
24. ”Bung Hatta dan Demokrasi Kita.” Diangkat dalam *Kumpulan Karangan-karangan Bung Hatta 70 tahun*. Koentjoro memberikan tanggapan apa yang dimaksud dengan Bung Hatta dengan ”Demokrasi Kita itu? Dijelaskan bahwa Demokrasi yang dikehendaki oleh Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Indonesia itu bukanlah Demokrasi Liberal, melainkan Demokrasi Sosial yang meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yang berdasarkan koperasi dalam hubungan moril keagamaan, hal-hal yang tersimpul juga dalam Pancasila.

25. *Minyak untuk Pembangunan Bangsa*. Diterbitkan oleh Universitas Airlangga Surabaya, 11 Nopember 1972. Diucapkan dalam Pidato Promotor Promosi H.C. Dr. Ibnu Sutowo, Direktur Utama Pertamina.
26. *Pancasila Ditinjau dari Segi Hukum Tata Negara*. Diterbitkan oleh Santiaji Pancasila FKIP Malang tahun 1973 merupakan Pidato Ilmiah.
27. *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*. Diterbitkan oleh Santiaji Pancasila FKIP Malang tahun 1973 merupakan Pidato Ilmiah.
28. "Perkembangan Mata Kuliah Hukum Tata Pemerintahan." Dimuat dan diterbitkan dalam *Majalah Hukum Universitas Airlangga Surabaya* edisi istimewa no. 07 tahun I 1973.
29. "Beberapa Catatan tentang Hukum Tata Pemerintahan." Pada mulanya diterbitkan oleh *Majalah Hukum Nasional (PPHN)* tahun 1973 No. 19 Kemudian setelah isinya diperluas menyajikan materi setelah memperbanding-bandingkan (comparative), pada tahun 1975 diterbitkan oleh Penerbit Alumni Bandung. Isinya diperluas bukan saja di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, melainkan bidang yang lebih luas yang meliputi sub bidang tersebut yakni bidang Hukum Tata Pemerintahan dan/atau Hukum Administrasi Negara.⁵ Judul buku juga berubah menjadi *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*.
30. *Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Pembangunan Nasional*. Diterbitkan oleh Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tahun 1974 merupakan Prasaran dalam Seminar Hukum Nasional yang berlangsung di Surabaya dari tanggal 11 – 15 Maret 1974.
31. *Sumber Manusia (ditinjau dari sudut Hukum dan Ideologi Pancasila)*. Diterbitkan oleh Dewan HANKAMNAS tahun 1974. Hal ini diucapkan dalam Prasaran Simposium Dewan Hankamnas tentang Sumber Manusia.

32. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Diterbitkan oleh Penerbit Alumni Bandung tahun 1975 (lihat keterangan nomor 29).
33. *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. Diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum (BPHN) tahun 1976 melalui Proyek Penulisan karya ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Tahun 1981 diterbitkan oleh Binacipta Bandung dan dicetak oleh Angkasa Offset Bandung.

Kata Pengantar Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional J.C.T. Simorangkir, S.H. dalam buku tersebut adalah sebagai berikut :

"Dalam rangka Pembinaan Hukum Nasional, kegiatan yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah adalah merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari kegiatan-kegiatan perencanaan naskah draft RUU, penelitian, dokumentasi dan perpustakaan hukum.

Ditinjau dari segi edukasi dalam masa pembangunan, karya-karya ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan oleh bangsa Indonesia sangat diperlukan dalam ikut mengusahakan kecerdasan rakyat pada umumnya, sebagai salah satu perwujudan usaha-usaha mengisi kemerdekaan bangsa.

Pada kesempatan ini Badan Pembinaan Hukum Nasional telah bekerjasama dengan salah seorang ahli yang telah cukup berpengalaman di bidangnya untuk menyumbangkan pikirannya dalam bidang hukum administrasi.⁷

Penulisan karya ilmiah ini merupakan suatu keuntungan besar dan tinggi-nilainya bagi dunia ilmu hukum dan pembaharuan serta pembinaan hukum nasional pada umumnya, dan sekaligus berarti menambah kepustakaan hukum yang amat diperlukan oleh para profesi di bidang hukum, mahasiswa, peminat lainnya.

Kepada saudara Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto yang telah membantu Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Kehakiman dengan hasil karyanya yang berjudul "Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia." Pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak lupa mengucapkan terima kasih."

34. *Penerapan Hak-hak Azasi Manusia (ditinjau dari Segi Hukum Tata Negara Indonesia)*. Diterbitkan oleh Panitia Kompendium Indonesia – Belanda tahun 1976 yang dipergunakan untuk Proyek penulisan Kompendium Hukum Indonesia – Belanda tahun 1976.
35. "Teori Kesaktian Muh. Yamin dalam Tatanegara Mojopahit." Diterbitkan oleh *Majalah Hukum*, Yayasan Penulisan & Pengembangan Hukum (Law center) tahun 1976 No. 3.

Sedikit tambahan sehubungan dengan hasil karya pada nomor 11 yaitu *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi* oleh Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto yang diterbitkan oleh Penerbit Universitas Airlangga Surabaya.

Komentar Prof.Mr. A.G. Pringgodigdo (Presiden Universitas Airlangga Surabaya) adalah sebagai berikut :

"Patut dihargai kesediaan Saudara Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto untuk menyusun karangan buku tersebut pada waktu beliau bertugas di luar negeri di dalam bidang lain daripada bidang hukum tatanegara/tata pemerintahan."

Prof.Mr. A.G. Pringgodigdo mengenal Prof.Mr. Koentjoro sejak tahun 1928, waktu ia sebagai pegawai muda yang baru meninggalkan bangku sekolah bekerja pada *Landraad* di Surabaya. Selanjutnya Prof.Mr. A.G. Pringgodigdo berkomentar, Pada masa itu sudah nampak, bahwa Saudara Koentjoro bukan orang lekas puas dengan apa yang telah dicapai, tetapi sebaliknya menyala-nyala semangatnya untuk lebih maju, menambah ilmu pengetahuan. Semangat dan kehendak keras untuk maju itulah yang mendorong beliau untuk meninggalkan bidang

kepegawaian dan kembali pada lingkungan Ilmu pengetahuan, yaitu di *Rechts Hooge School* (RHS) di Jakarta.

Tepat pada waktunya Saudara Koentjoro berhasil untuk menempuh ujian Doktoral dalam Ilmu Hukum, sehingga pada saat itu (tahun 1933) beliau berhak memakai gelar *Meester in de rechten* (Mr) Specialisasinya adalah Ketatanegaraan.”

Di samping itu Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto sering mengeluarkan buah pikirannya berupa karangan-karangan antara lain *Hak Berkumpul dan Bersidang, Dua Tahun Badan Pekerja KNIP, Sendi-sendi Demokrasi, Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia* dan lain-lain.

Itulah sekedar hasil karya dan pemikiran Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto yang kami tampilkan dalam penulisan biografi ini, sebenarnya masih banyak lagi yang tidak mungkin kita tulis-satu persatu di sini. Mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya bagi yang membaca dan berusaha lebih banyak meneliti dan mencotoh mana-mana yang baik yang perlu kita contoh dalam tulisan ini.

PENUTUP

Setelah menelusuri secara singkat riwayat hidup, hasil karya dan pengabdian Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto dapatlah kita petik beberapa sifat pribadi dan karakter akan ketokohnya. Ternyata ia seorang Guru Besar dalam Ilmu Ketatanegaraan terutama Ketatanegaraan Indonesia. Riwayat hidupnya tidak dapat dipisahkan dalam bidang keahliannya seperti yang disebutkan di atas.

Ia bukan orang-orang yang lekas puas dengan apa yang telah dicapai, tetapi sebaliknya menyala-nyala semangatnya untuk lebih maju, menambah ilmu pengetahuan, bukannya dari ayunan sampai keliang kubur, seumur hidup, dan malah menuntut ilmu itu menurutnya mulai dari si jabang bayi dalam perut ibunya sampai lahir dan sampai meninggal lagi. Sehingga ilmu yang diperolehnya semasa hidup dapat dimanfaatkan oleh orang lain sehingga lebih berkembang di kalangan masyarakat bangsa sendiri dan bangsa lain.

Keberhasilannya sebagai ahli Ketatanegaraan itu dapat meningkatkan derajat dan harkat bangsa serta negara Indonesia yang sedang membangun. Sudah barang tentu semuanya itu berkat sumbangan pikirannya yang banyak, baik berupa tenaga,

waktu, maupun moril untuk mengembangkan dan memajukan pertumbuhan dan perkembangan demokrasi, terutama dalam pemerintahan dan pendidikan.

Keteladanan yang dapat dicontoh dan dimanfaatkan dari guru besar ahli tatanegara itu adalah keuletannya dalam berjuang yang tidak kenal menyerah, penuh dedikasi, bertanggung jawab, dan tanpa pamrih. Di samping itu, kejujuran dan sifat tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesederhanaannya dalam bertindak maupun penampilannya menjadikan ia seorang yang disegani kawan-kawan ataupun lawan-lawannya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Rupanya figur seperti Koentjoro inilah yang sangat kita butuhkan sebagai salah satu modal dasar dalam perjuangan bangsa untuk mengisi kemerdekaan. Untuk itu, teladan yang ia sumbangkan kepada bangsa dan negara perlu diresapi, dihayati dan dilaksanakan.

Sudah sewajarnya bila kita semua mengucapkan terima kasih kepadanya karena ia telah berbuat banyak untuk kita semua. Oleh sebab itu, apa yang telah ia perbuat perlu dicontoh dan ditiru dalam perjuangan mencapai cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun.

Akhirnya, penulis mengajak generasi muda/penerus, pewaris jiwa Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 untuk melanjutkan perjuangan guna mengisi kemerdekaan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal serta informal.

Landasan pokok yang kita butuhkan adalah kejujuran, disiplin, kesetiaan dan tanggung jawab atas kewajiban kita semua. Sebab hanya Tuhan yang akan menentukan berhasil tidaknya perjuangan kita itu.

DAFTAR CATATAN

Bab I

1. *Wawancara* dengan R. Sarwoko Sarwopranoto (70 tahun), (Bandung : 23 September 1984).
2. Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, *Silsilah Keluarga Winisuda : KRMH Poerbokoesoemo*, (Solo : 19 Juli 1977).
3. Drs. Nyak Wali AT, *Mr. Sartono, Hasil Karya dan Pengabdiannya*, ((Jakarta : Ditjerahnitro, Proyek IDSN, naskah ketikan, 1981/1982), hal. 4.
4. *Wawancara* dengan R. Sarwoko Sarwopranoto (70 tahun), (Jakarta : 15 Oktober 1984).
5. *Wawancara* dengan BRA Ny. Prof. Dr. Mr. R. Supomo (72 tahun), (Jakarta : 20 Oktober 1984).
6. Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, *op.cit.*, 19 Juli 1977.
7. *Wawancara* dengan R. Sarwoko Sarwopranoto (70 tahun), (Bandung : 23 September 1984).
8. R. Sarwoko Sarwopranoto, *No. 1/5 Data Almarhum Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto*, (Bandung : 14 Oktober 1984), hal. 5/13.
9. Mr. Koentjoro Poerbopranoto, *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, cetakan ke I, (Surabaya : Penerbit Universitas Airlangga, 1960), hal. 4.

10. *Wawancara* dengan R.A. Koemarni (72 tahun), (Madiun : 30 September 1984).
11. R.A. Koemarni, *op.cit.*, 30 September 1984.
12. *Wawancara* dengan Prof.Mr. Sunario (82 tahun), (Jakarta : 5 Oktober 1984).
13. Pro.Mr. Sunario *op.cit.*, 5 Oktober 1984.
14. *Wawancara* dengan Mr. Ratmoko (70 tahun), (Jakarta : 27 September 1984).
15. R.A. Koemarni, *op.cit.*, 30 September 1984.
16. *Surat Kabar Surabaya Post*, (Surabaya : 4 April 1978).
17. (Surabaya : 8 Nopember 1977).
18. Drs. Nyak Wali AT., *Prof.Dr. R. Soegarda Poerbakawatja, profil seorang pendidik*, (Jakarta : naskah ke-tikan, 1982), hal. 12.

Bab II

1. *Wawancara* dengan Prof.Mr. Sunario (82 tahun), (Jakarta : 5 Oktober 1984).
2. *Arsip/catatan* Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, alm. (Surabaya : 20 Oktober 1972).
3. Prof.Mr. Sunario, *op.cit.*
4. Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, *Gedenkboek Jong Java*, (Jakarta : 7 Maret 1915 - 7 Maret 1930), hal. 10 - 11.
5. *Gedenkboek Jong Java*, *ibid.*, hal. 5.
6. Satiman, *Majalah Tri Koro Dharmo No. 3*
7. *Gedenkboek op.cit.*, hal. 26
8. , *ibid.*, hal. 27
9. , *loc.cit.*
10. , *ibid.*, hal. 32 - 33.
11. *Arsip/catatan* Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, (Surabaya : 20 Oktober 1972).
12. *Gedengboek, ibid.*, hal. 37 - 38

13. Drs. Bambang Soedarsono Singgih dkk., *Biografi Nasional Jawa Timur*, (Jakarta : Proyek IDSN, 1983/1984), hal. 60.
14. Koentjoro Poerbopranoto, *Sekitar Lahirnya Indonesia Muda*, (Malang : Panitia Pertemuan Besar Indonesia Muda di Yogyakarta, 1962), hal. 3.
15. , *ibid.*, hal. 4
16. , *loc.cit.*

Bab III

1. *Wawancara* dengan Prof.Mr. Sunario (82 tahun), (Jakarta : 8 Oktober 1984).
2. , 8 Oktober 1984.
3. *Wawancara* dengan R. Sarwoko Sarwopranoto (70 tahun), (Jakarta : 15 Oktober 1984).
- 4 Drs. Bambang Soedharsono Singgih dkk., *Biografi Nasional Daerah Jawa Timur*, (Jakarta : Proyek IDSN, 1983/1984), hal. 61.
- 5 Prof.Mr. Sunario, *PNI dan Perjuangannya*, (Jakarta : DPP-PNI, 1972), hal. 7.
6. *Persatuan Indonesia No. 38 dan 39 Tahun III*, tanggal 20 - 30 Januari 1930.
7. *Persatuan Indonesia No. 88 Tahun IV*, tanggal 31 Juni 1931.
8. *SK Sinar Harapan*, (Jakarta : tanggal 19 April 1972).
9. *Surat Kabar Surabaya Post*, (Surabaya : 4 April 1978).
10. R. Sarwoko Sarwopranoto, *No. 1/5 Data Alm. Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto*, (Bandung : 14 Oktober 1984), hal. 10.
11. *Wawancara* dengan Ny. Dedi Suwardi dan Ny. Setiono (putri-putri Koentjoro), (Jakarta : 21 September 1984).
12. *Wawancara* dengan R.A. Koemarni (72 tahun), (Madiun : 30 September 1984).
13. R. Sarwoko Sarwopranoto, *ibid.*, hal. 12.

14. *Arsip/catatan* Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, (Surabaya : 20 Oktober 1972), hal. 3.

Bab IV

1. Abdul Gani SH,-MS (Rektor UNAIR), *Surabaya Post*, (Surabaya : 4 April 1978).
2. *Wawancara* dengan Mr. Ratmoko (70 tahun), (Jakarta : 28 September 1984).
3. *Wawancara* dengan Prof.Mr. Sunario (82 tahun), (Jakarta : 8 Oktober 1984).
4. *Arsip/catatan* perjalanan hidup Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, (Surabaya : 20 Juli 1972).
5. Dikutip dari daftar *Riwayat Pekerjaan* Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, (Surabaya : 9 September 1971).
6. *Gema Angkatan 45 No. 27*, (Surabaya : Maret 1978), hal. 33 - 41.
7. *Wawancara* dengan Ny. Dedi Suwardi dan Ny. Setiono, (Jakarta : 21 September 1984).
8. Max Margono, *SK Surabaya Post*, (Surabaya : 4 April 1978).
9. *Wawancara* dengan Prof.Dr. R. Soegarda Poerbakawatja (85 tahun), (Jakarta : 20 Agustus 1984).
10. Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, *Daftar Riwayat Pekerjaan*, (Surabaya : 9 September 1971). hal. 3.
11. Drs. Bambang Soedharsono Singgih dkk., *Biografi Nasional Daerah Jawa Timur*, (Jakarta : Proyek IDSN, 1983/1984), hal. 66.

Bab V

1. K. Poerbopranoto, *Renungan Rabu Paing ke XIII*, cetakan I, (Surabaya: Paguyuban "Sosrokartanan", 1977), hal. 3.

2. Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, *Riwayat Singkat Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto*, (Surabaya : 20 Oktober 1972), hal. 3.
3. *Wawancara* dengan R. Sarwoko Sarwopranoto (70 tahun), (Bandung : 10 Nopember 1984).
4. *Renungan Rabu Paing ke-XV*, DAR - OES - SALAM, (Surabaya : Si Perantara, 13 Maret 1980), hal. 16.
5. , *ibid.*, hal. 18.
6. *Renungan Rabu Paing ke-XV*, Sang Alif, (Surabaya : Si Perantara, 13 Maret 1980), hal. 26.
7. Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, *Kompilasi Kertas-kertas Kerja Tentang Usia Surabaya*, (Surabaya : 7 September 1973), hal. 1.
8. *SK Surabaya Post*, (Surabaya : 2 April 1973).
9. *Hari Jadi Kota Surabaya : 682 tahun Sura Ing Baya*, (Surabaya : Pemerintah Kodya Tingkat II, 31 Mei 1975), hal. 31.
10. , *ibid.*, hal. 32.
11. Suparto Brata, *SK Surabaya Post*, (Surabaya : 29 Mei 1976).
12. Soeroso, *Majalah Gepura No. 8/9 tahun IV*, (Surabaya : Gapura, 1971).
13. Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, *Kompilasi . . . op.cit.*, hal. 2.
14. , *ibid.*, hal. 5.
15. Suparto Brata, *Kisah ditemukannya Hari Jadi Surabaya*, (Surabaya : SK Surabaya Post, 29 mei 1976).
16. *Hari Jadi Kota Surabaya, op.cit.*, hal. 9.
17. , *ibid.*, hal. 27.
18. *SK Surabaya Post*, (Surabaya : 29 Mei 1976).

Bab VI

1. Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), hal. 5.

2. , *ibid.*, hal. 6.
3. , *ibid.*
4. , *ibid.*, hal. 10.
5. , *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1975), hal. 5.
6. , *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, (Bandung Penerbit Binacipta, 1981), hal. IX.
7. , *ibid.*
8. , *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 1960), hal. 5.
9. *ibid.*

DAFTAR SUMBER

Buku

- Abdoelgani, Roeslan, Prof.Dr. H., *Resapkan dan amalkan Pancasila*, (Jakarta: BP Prapanca).
- , *Sosialisme Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Prapanca, 1965).
- , *Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Hubungan Dengan Semangat Dan Jiwa Kepahlawanan*, Prasaran untuk Rapat Pengarahan Proyek Biografi Pahlawan Nasional, (Cibogo-Bogor, 1977).
- Ahmad Subardjo, *Lahirnya Republik Indonesia*, (Jakarta : PT Kinta, 1977).
- , *Kesadaran Nasional sebuah Otobiografi*, (Jakarta : Gunung Agung, 1978).
- AH. Nasution, Jenderal, Dr., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* sebelas jilid, (Bandung : Angkasa, 1977).
- AK-Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1980).
- Anshari, Endang Saifuddin, H.M.A., *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Pusat Perpustakaan Salman ITB, 1981).

- Anhar Gonggong, Drs, *HOS Cokroaminoto*, (Jakarta : Dep. P. dan K., Proyek BPN, 1975).
 , *Mohammad Husni Thamrin*, (Jakarta : Dep. P. dan K, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN, 1981/1982).
- Bambang Soedharsono Singgih, *Biografi Nasional Daerah Jawa Timur*, (Jakarta: Proyek IDSN, 1983/1984).
- Bambang Sularto, *Wage Rudolf Supratman*, (Jakarta : Dep. P. dan K, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek IDSN, 1980/1981).
- Empat Puluh Lima Tahun, *Sumpah Pemuda*, (Jakarta : Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, 1974).
- Garoeda Gentayoe, *Sejarah Pergerakan Indonesia 1929 - 1930 : Berisi Surat tuduhan dan Pembelaan Perkara PNI oleh MR. Sartono, Mr. Sastromulyono dan R. Idih Prawiradiputra*, (Jakarta : Fonds Nasional PPPKI, tanpa tahun).
 , *Sejarah Pergerakan Indonesia 1929 - 1930*, Jilid I Fonds Nasional PPPKI, Desember 1930).
 , *Sejarah Pergerakan Indonesia 1929 - 1930*, Jilid II Fonds Nasional PPPKI, Desember 1930).
 , *Sejarah Pergerakan Indonesia 1929 - 1930*, Jilid III Fonds Nasional PPPKI, Desember 1930). Berisi Pembelaan Ir. Sukarno di muka Landraad Bandung.
- Hatta Mohammad, Dr., *Kumpulan Karangan*, (Jakarta-Surabaya: Balai Buku Indonesia, 1953).
 , *Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Idayu, 1976).
 , *Menuju Negara Hukum*, (Jakarta : Yayasan Idayu, 1975).
 , *Mamoir*, (Jakarta : Tintamas, 1978).
Peranan Pemuda Menuju Indonesai Merdeka

- Indonesia Adil Makmur*, (Bandung : Angkasa, 1966).
- , *Indonesia Merdeka*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).
- Ismaun, Drs., *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, (Bandung : Carya Remaja, 1970).
- Iwa Kusuma Sumantri, Prof.SH., *Sejarah Revolusi Indonesia II*, (Jakarta : Grafika).
- Kansil CST. Drs.SH., *Pancasila dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1973).
- Kempen RI, *Detik dan Peristiwa, 17 Agustus 1945 - 25 Januari 1950*, (Jakarta : Kempen, 1950).
- , *Kabinet-Kabinet RI II*, (Jakarta : Percetakan Negara, 243/B-'58).
- , *Kepartaian di Indonesia*, (Jakarta : Kempen, 1951).
- Kartodirdjo, Sartono - dkk., *Sejarah Nasional Indonesia*, enam jilid edisi kedua, (Jakarta : Dep. P. dan K, Balai Pustaka, 1977).
- Koentjoro Poerbopranoto Prof.Mr., *Silsilah Keluarga Winisuda: KRMH Poerbokoesoemo*, (Solo : 19 Juli 1977).
- , *Sedikit Tentang Sistim Pemerintahan Demokrasi*, cetakan ke I, (Surabaya : Penerbit Universitas Airlangga, 1960).
- , *Gedenkboek Jong Java*, (Jakarta : 7 Maret 1915 - 7 Maret 1930).
- , *Arsip/catatan*, (Surabaya : 20 Oktober 1972).
- , *Sekitar Lahirnya Indonesia Muda*, (Malang : Panitia Pertemuan Bear Indonesia Muda, 1962).
- , *Renungan Rabu Paing ke XIII*, Cetakan ke I, (Surabaya : Paguyuban Sosrokartanan, 1977).
- , *Renungan Rabu Paing ke XV*, (Surabaya : Paguyuban Sosrokartanan, 1980).

, *Kompilasi Kertas-kertas Kerja Tentang Usia Surabaya*, (Surabaya : Penelitian HUT KJKS, 1973).

, *Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara RI*, (Jakarta, Groningen: J.B. Wolters, 1953).

, *Dasar-dasar Hubungan Warga Negara dengan Pemerintah*, (Surabaya : UNAIR, 1960).

, *Musyawarah untuk mufakat*, (Bandung : Sekretariat MPR, 1963).

, *Ilmu Hukum dalam Revolusi dan Revolusi dalam Hukum*, (Jakarta : B.P. Prapantja, 1965).

, *Beberapa Aspek Persoalan Otonomi Daerah*, (Surabaya : FH UNAIR, 1971).

, *Minyak untuk Pembangunan Bangsa*, (Surabaya : UNAIR, 1972).

, *Pancasila ditinjau dari segi Hukum Tata Negara*, (Malang : Santiaji Pancasila FKIP, 1973).

, *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*, (Malang : Santiaji FKIP, 1973).

, *Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Pembangunan Nasional*, (Surabaya : BPHN, 1974).

Koentjoro Poerbopranoto, Prof.Mr., *Sumber Manusia*, (ditinjau dari sudut Hukum dan Ideologi Pancasila), (Jakarta: Dewan Hankamnas, 1974).

, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1975).

, *Penerapan Hak-hak Azasi Manusia* (ditinjau dari segi Hukum Tata Negara Indonesia), (Jakarta : Panitia Kompendium Indonesia - Belanda, 1976).

Notosusanto, Nugroho, *Tentara Peta pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1979).

- Nyak Wali AT, Drs., *Mr. Sartono, Hasil Karya dan Pengabdian-nya*, (Jakarta : Proyek IDSN, 1981/1982).
- , *Prof.Dr. R. Soegarda Poerbakawatja, profil seorang pendidik*, (Jakarta : Penerbit Gunung Agung, naskah ketikan, 1982).
- Panitya Penyusun, *Sejarah Pertempuran Lima Hari di Semarang*, (Semarang : Suara Merdeka, 1977).
- Sunario, Prof.Mr., *PNI dan Perjuangannya*, (Jakarta : DPP-PNI, 1972).
- Susanto Tirtoprojo, SH, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, (Jakarta : PT Pembangunan, 1980).
- Suratmin, Drs., *Dr. Sutomo*, (Jakarta : Dep. P. dan K, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN, 1982/1983).
- Slamet Mulyana, Prof.Dr., *Nasionalisme sebagai modal perjuangan Bangsa Indonesia I, dan II*, (Jakarta : PT Balai Pustaka 1981).
- Wiwiek Hidayat dkk, *Hari Jadi Kota Surabaya 682 tahun Surabaya*, (Surabaya : Pemerintah Tingkat II Kotamadya, 1975).
- Yayasan Gedug-Gedung Bersejarah Jakarta, *Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1978).
- Yamin Muhammad, Prof.Mr. H., *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta : Yayasan Penerbit Prapanca, 1959).

Surat Kabar dan Majalah

- Surabaya Post*, (Surabaya : 2 April 1973, 29 mei 1976, 8 Nopember 1977, dan 4 April 1978).
- Sinar harapan*, (Jakarta : 19 April 1972).
- Tri Koro Dharmo* No. 3, (Jakarta : Tahun 1915).

- Persatuan Indonesia* No. 38 dan 39 Th. III, (Jakarta : tanggal 20 - 30 Januari 1930).
 , No. 88 Th. IV, (Jakarta : 31-6-1931).
- Mimbar Indonesia* No. 49, (Jakarta : Tahun 1948).
 No. 49, (Yogyakarta : Tahun 1948 atau artikel berbeda).
- Majalah Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri* Tahun I No. 1 (Jakarta : Tahun 1951).
 Th. II No. 2, (Jakarta : Tahun 1955).
- Majalah Hukum Persahi* No. 3, (Jakarta : Tahun 1952).
 No. 2 dan 3, (Jakarta : Tahun 1953).
- Majalah Indonesia* Th. ke VI No. 1, (Jakarta : Tahun 1953).
- Majalah Gapura* No. 8/9 Th. IV, (Surabaya : Tahun 1971).
- Majalah Indonesia* No. I - III, (Jakarta : Tahun 1954).
- Majalah Hukum Persahi* Th. V No. 10, (Jakarta : Tahun 1954).
- Majalah Hukum Nasional* No. 6, (Jakarta : Tahun 1969).
 No. 3, (Jakarta : Tahun 1971).
 No. 4, dan No. 9 (Jakarta : Tahun 1971).
- Majalah Hukum UNAIR* No. 07 Th. I, (Surabaya : Tahun 1973).
- Majalah Hukum Nasional* No. 19, (Jakarta : Tahun 1973).
- Majalah Gema Angkatan 45* No. 27, (Surabaya : Tahun 1978).

Wawancara

- R, Sarwoko Sarwopranoto (70 tahun), (Bandung : 23 September 1984 dan 10 Nopember 1984) dan (Jakarta : 15 Oktober 1984).
- BRA : Ny. Prof.Mr.Dr. R. Supomo (72 tahun), (Jakarta : 20 Oktober 1984).
- RA. Koemarni (72 tahun), (Madiun : 30 September 1984).
- Prof.Mr. Sunario (82 tahun), (Jakarta : 5 dan 8 Oktober 1984).
- Mr. Ratmoko (70 tahun), (Jakarta : 27 dan 28 September 1984).

Ny. Dedi Suwardi dan Ny. Setiono (putri-putri alm. Koentjoro),
(Jakarta : 21 September 1984).

Prof.Dr. R. Soegarda Poerbakawatja (85 tahun), (Jakarta : 20
Agustus 1984).

Lampiran 1

Riwayat Singkat Prof. Kuntjoro Purbopranoto S.H.

1. Nama : Prof. KUNTJORO PURBO-
PRANOTO S.H.
2. Tanggal dan tempat lahir : 19 Desember 1906 di Pono-
rogo, anak sulung R. Mangoen-
pranoto (almarhum) dulu men-
jabat Menteri Hewan.
3. Alamat sekarang : Jl. Airlangga No. 2, Surabaya.
4. Pangkat dan kedudukan : Guru Besar (Gol. F/VII PGPN-
sekarang : 1961).
5. Pendidikan : a. Rechtsschool Jakarta (ija-
zah 1927).
b. Rechts Hogeschool (R H.
S) Jakarta, (ijazah 1933).
c. College Europeen des Scie-
nces Sociales et Eco-
nomiques, Universie de
Paris (certificat 1957).
6. Riwayat pekerjaan : a. Ambtenar t.b. Landraad
Surabaya (1927).
b. Pegawai (bulanan) Dep. O
& E. Jakarta (1933 -
1935).
c. Pegawai Tinggi (Com. Re-
dactour & Raferendaris)
Dewan Rakyat (Volksraad)
Jakarta (1936 - 1941).
d. Refenderaris II (Wakil Wali-
kota) Gemeente Semarang
(1942 - 1945).

- e. Ketua K N I P Kotapraja Semarang (1945).
- f. Pegawai Tinggi Kantor Gubernur Jawa Tengah (Kep.Bag.Umum), disertai Pds. Sekretaris B P K N I.P. di Yogyakarta (1945 - 1948).
- g. Pegawai Tinggi (Refendaris) Kotapraja Jakarta Raya (1949).
- h. Pegawai Tinggi (Kep.Bag. Hukum. Kep.Bag. Otonomi dan Desentralisasi) Kem. Dalam Negeri R.I.S. dan R I (1950-1955).
- i. Atase Kebudayaan pada K B R I Paris (1955-1958) merangkap sebagai Penghubung Pemerintah R I dengan UNESCO, dan kemudian di Bonn (1965-1967).
- j. Pegawai Tinggi Kem. P.P dan K. d.p. pada Fakultas Hukum UNAIR di Surabaya, merangkap sebagai Pd. Ketua F.K I P UNAIR di Malang (1959-1960).
- k. Guru Besar Fakultas Hukum UNAIR, merangkap Dekan F K I P. UNAIR di Malang (1960-1964).
- l. Ketua Dewan Kurator AP-DN Malang dan Anggota

- Presidium Univ. Brawidja-
ja Malang (1960-1964).
- m. Pembantu Rector I (dan pds.Rector) Univ. Airlangga Surabaya (1964-1965).
 - n. Diangkat kembali menjadi Guru Besar Fakultas Hukum UNAIR (1967 sampai sekarang).
 - o. Diangkat sebagai pds. anggota Presidium Fakultas Hukum UNAIR (1970).
 - p. Ditunjuk sebagai anggota (dan pds. Ketua) Dewan Research UNAIR (1969-hingga sekarang).
 - q. Ditunjuk sebagai Anggota Dewan Sub-Konsorsium Ilmu Hukum Dep.P & K. (1970 hingga sekarang).
 - r. Ditunjuk sebagai Ketua Team UNAIR Penyiap Bahan-bahan Sidang MPR 1972/1973.

7. Riwayat perjuangan :

Sebagai pelajar/mahasiswa :

- a. Menjadi Anggota dan kemudian Ketua Perhimpunan Kesenian Jawa "Krido Yatmoko" dan Anggota "Langen Siswo" di Jakarta (1921-1927).
- b. Menjadi Anggota dan Ketua Cabang perhimpunan pelajar "Jong Java" (dahulu "Tri Koro Darmo") Jakarta (1921-1927) dan kemudian dipilih sebagai Ketua Pengurus Besar Perhimpunan tsb. (1927-1928).

- c. Menjadi Anggota "Club Indonesia" Jakarta (Kramat 106) (1927-1935).
- d. Bersama-sama Sdr. Yamin (alm.) dan Sdr. Jusjadi Danuhadiningrat (alm.) ditunjuk oleh Kongres Pemuda ke-II di Jakarta (1928) dalam Panitia Perumus "SUMPAH PEMUDA" (28/10-1928).
- e. Dipilih menjadi Ketua Komisi Besar INDONESIA MUDA (1928-1930).

Sebagai lulusan Rechtshogeschool :

- f. Menjadi Anggota partai politik "Budi Utomo" yang kemudian menjelma menjadi "PARINDRA" (1933-1935) dan sesudah th. 1936 menjadi anggota "Partai Nasional Indonesia".
- g. Sebagai wakil "PARINDRA" dipilih menjadi Anggota Stadsgemeenteraad Batavia (Jakarta Raya) (1935-1936).
- h. Atas pencalonan Fraksi Nasional (almarhum Bp. Moh. Husni Thamrin) diangkat menjadi anggota Sekretariat "Volksraad" (Dewan Rakyat) di Jakarta dan menarik diri dari keanggotaannya Stadsgemeenteraad (1936-1941).
- i. Bersama-sama Bp. Soetardjo Kartohadikoesoemo, Bp. Moh. Husni Thamrin dll. mendirikan dan memimpin (sebagai Sekrearis pusat) "Ikatan Sport Indonesia" (ISI), yakni organisasi-pelopor dari PON (1938-1941).
- j. Diangkat menjadi Ketua Komite Nasioal Indonesia daerah Kotapraja Semarang, hingga ditangkap oleh Pem. Militer Jepang selama pertempuran 5 hari di Semarang (1945).
- k. Bersama-sama Bp. Mr. Wongsonegoro dll. mendirikan dan memimpin organisasi Kongres Kebudayaan Indonesia (ke-I di Magelang th. 1947, ke-II di Jakarta 1950 dan ke-III di Bandung 1952).

- l. Sebagai Pds. Sekretaris BP-KNIP di Yogyakarta selama Clash ke-II ditangkap oleh Tentara pendudukan Belanda (NICA) tgl. 19-12-1948 dan kemudian diberi hukuman "Huisarrest", hingga dapat panggilan kembali ke Jakarta. (th. 1949).
- m. Duduk sebagai Anggota Seksi Pendidikan dalam Panitia Pemulihan Kedaulatan RIS yang diketuai Bp. Soewirjo.
- n. Dipilih menjadi Sekretaris kemudian Wakil Ketua II Pengurus Besar Serikat Sekerja Kem. Dalam Negeri (SSKDN) yang diketahui Bp. Soediro. (1950-1955).
- o. Bersama-sama Dr. Sahardjo duduk dalam Sekretariat Panitia Bersama RIS - RI untuk menyusun Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan RI. yang diketuai Prof.Mr.Dr. Supomo (1950).
- p. Ditunjuk sebagai Ketua Panitia Interdepartemental untuk menyusun rancangan Undang-undang Pemilihan Umum pertama (1953-1955).
- q. Bersama-sama Prof.Mr.Dr. Supomo dll. duduk dalam Redaksi Majalah "HUKUM" (1950-1955).
- r. Berlaku sebagai Penyanggah-prasaran pada Seminar Hukum Nasional ke-1 di Jakarta (1962).
- s. Duduk sebagai Anggota Perguruan Pusat Badan Kongres Kebatinan Indonesia yang diketuai Bp. Mr. Wongsonegoro (1960-1965).
- t. Dipilih sebagai Anggota Panitia Perumus Seksi Hk. Tata-Negara dalam Seminar Hukum Nasional ke-II di Semarang (1968).
- u. Ditunjuk oleh Ketua Sekretariat Bersama Kerjasama Kepercayaan (SKK) Bp. Mr. Wongsonegoro, sebagai Anggota SKK-Pusat (1970).
- v. Ditunjuk oleh Koordinator Perguruan Tinggi Jatim, Bali dan Nusa Tenggara Prof.Dr. Eri Soedewo, menjadi Anggota Team PANCASILA KOPERTI. (1970).

- w. Diangkat sebagai Anggota Majelis Kehormatan Dewan Kesenian Kotamadya Surabaya (1971).
- x. Duduk dalam Executive Board Lembaga Indonesia - Amerika Cabang Surabaya (1969-1972).

Tanda-tangan yang bersangkutan;

ttd.

(Prof. Kuntjoro Purbopranoto, SH).

Lampiran 2

S a l i n a n

UITTREKSEL UIT DE REGISTERS VAN DE
FACHLTEIT DER RECHTSGELEERDHEJD TE PATAVIA

Heeft met goed gevolg afgelegd het Doctoraalexamen, Staat-
srechtelijke Richting, en wordt mitsdien toegelaten tot de
Promotie
de Heer R. KOENTJORO POERBOPRANOTO
geboren te Ponorogo.

wg.

wg. Dr. L.H.A. Logemann

fg. Secretaris.

Voorzitter.

Batavia, 29 April 1933.

Sesuai dengan aselinja,

Lampiran 3

RIWAYAT PENDEK

1. N a m a : Mr. R. Kuntjoro Purbopranoto
2. Lahir di : Ponorogo (Madiun), tgl. 19 Desember 1906.
3. Agama : Islam.
4. Didikan (Idjazah) : a. R H S Djakarta th. 1933, Doctoral (apecialisasi Ilmu hukum Negara, (Staatsrechtelijkerechting) dengan matakuliah khusus Ekonomi.
b. Rechtschool, Djakarta th. 1927.
c. College Europeen des Sciences Sociales et Economiques, Paris th. 1957.
5. Organisasi : a. P N I (Partai Nasional Indonesia (anggota biasa).
b. Dewan Pertimbangan Kebudajaan Nasional (id.).
c. Ketua Panitia Kerdja I, Pan.AdHoc. Pemilihan Umum.
d. Panitia Istilah Bahasa Indonesia. (Ketua/Anggota Seksi Ilmu Hukum).
e. Anggota Pengurus/Redaksi "KUKUM" (Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia) dan I S H I.
f. Anggota Pengurus Besar Pandu Rakjat (Djakarta).
g. Ketua Kehormatan Studiesclub Malang.
6. Riwayat pekerjaan : a. A t b (ambtenaar ter beschikking) Landraad Surabaja th. 1927-1928.
b. Studieverlof R H S th. 1928-1933.

- c. Comm. Redacteur Departement O.en E. Djakarta, th. 1933–1935.
- d. Redacteur/Adjunct Referendaris Dewan Rakjat (Volksraad th. 1935-1941).
- e. Referendaris kl. II Gemoente-sekretarie Semarang th. 1941 (14 bulan).
- f. Wakil Walikota Semarang 1942 – 1945.
- g. Pegawai Tinggi (tingkat II) Kantor Gubernur Djawa Tengah, Magelang th. 1946 – 1947.
- h. Pd. Sekretaris KNIP Jogjakarta, th. 1947 – 1949.
- i. Referendaris/Adj. Sekretaris Kota-pradja Djakarta th. 1949.
- j. Ketua Panitia Pembentukan Perguruan Tinggi Kem. P.P. dan K.
- k. Pegawai Tinggi (Gol. VI f) Kementerian Dalam Negeri (th. 1950 s/d 1955 (diserahi tugas Kepala Urusan Otonomi/Desentralisasi).
- l. Atase Kebudayaan RI merangkap penghubung antara Pemerintah (Kem. P P dan K.) dengan Markas Besar UNESCO di Paris th. 1955 s/d 1958.
- m. Pegawai Tinggi Kem. P.P dan K. dan Dosen pada Fak. Hukum Univ. Airlangga Surabaya (Gol. F.VI, th. 1959).
- n. Pd. Ketua Fak. K.I.P. Univ. Airlangga, Malang (Gol. F.VI mulai 1 April 1959).
- o. Ketua Dewan Kurator A.P.D.N. Malang.

7. Sekedar karangan/penerbitan :

- a. "Hak Berkumpul dan Bersidang", th. 1930, Djakarta.
- b. "Dua tahun Badan Pekerdja KNIP", th. 1948, Jogja.
- c. "Kekusutan dlm perundang-undangan Negara" (dlm Madjalah Pemerintahan 1951).
- d. "Sendi-sendi demokrasi" dalam "HUKUM" th. 1952.
- e. "Hak-hak dasar manusia dan Pantjasila Negara R.I." th. 1953, Djakarta.
- f. "Hak bebas diri dan sendi-sendi masjarakat" dalam HUKUM th. 1954.
- g. "Sistim Pemerintahan Demokrasi" (skripsi untuk Un. Gadjah Mada, 1958).

Malang, 8 Djuli 1959

Dibuat dengan sesungguhnya
Jang berkepentingan,

ttd.

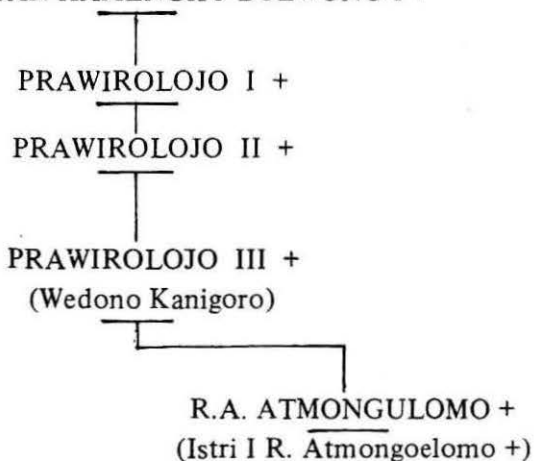
(Mr. Kuntjoro Purbopranoto).

"HU-

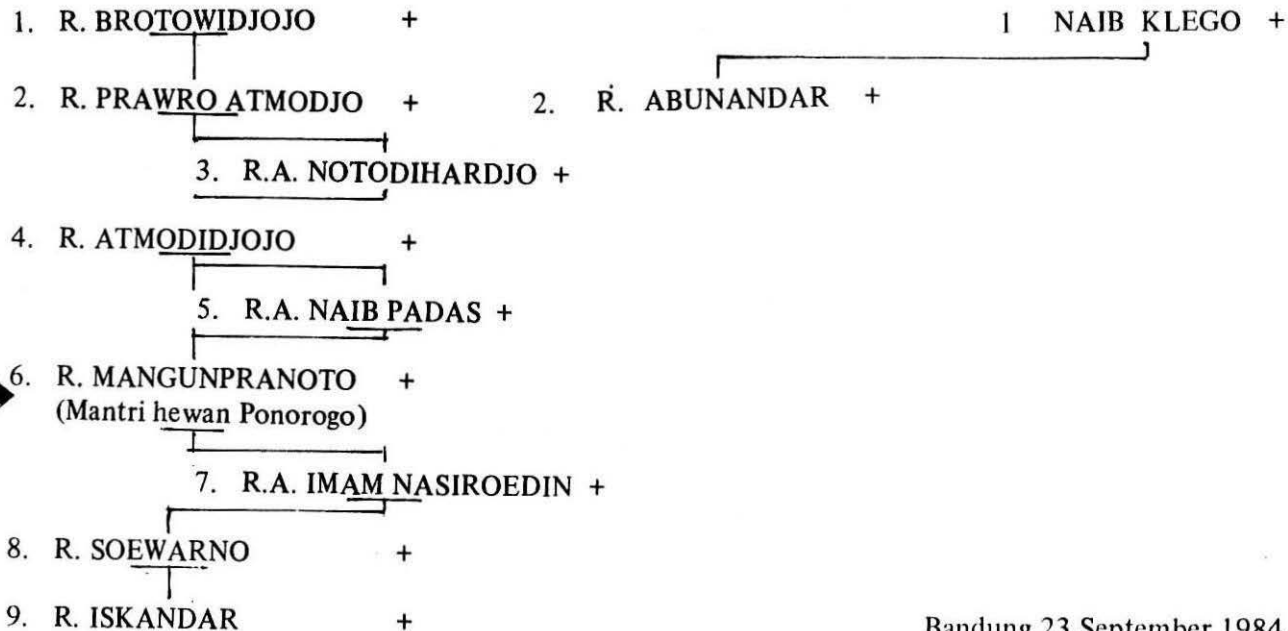
Lampiran 4

ASAL USUL R. MANGOENRANOTO AYAH KANDUNG
 PROF. MR. KOENTJORO POERBOPRANOTO

SRI SULTAN HAMENGGU BOEWONO I +



R.A. ATMONGULOMO + R.A. ATMONGULOMO + R.A. ATMONGULOMO +
Istri I (Naib Maospati) Istri II



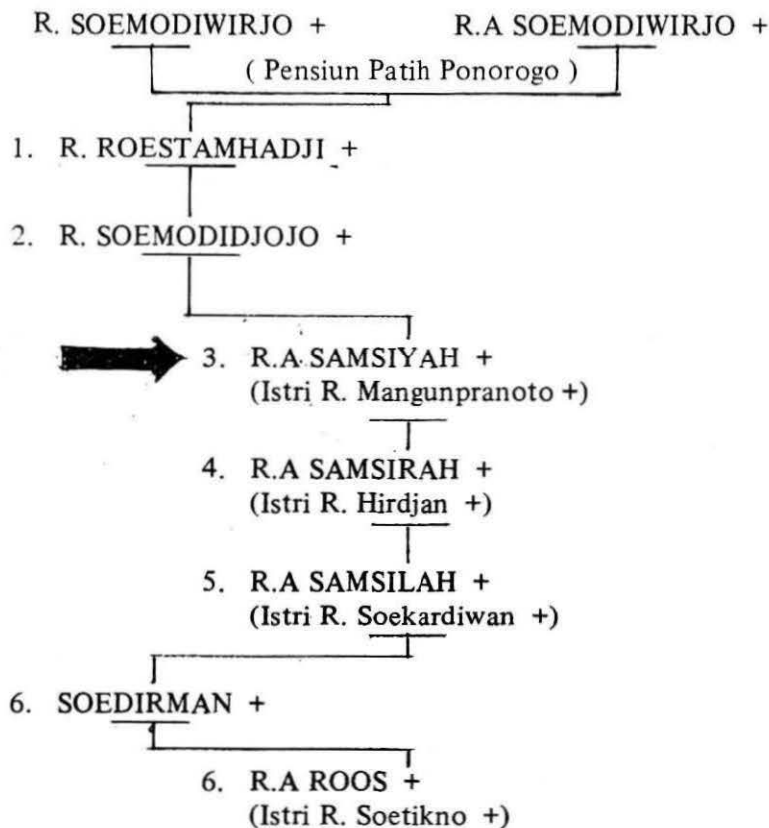
Bandung 23 September 1984
 Yang membuat

ttd.

(Sarwoko. S)

Lampiran 5

ASAL USUL R.A MANGUNPRANOTO IBU KANDUNG
 PROF. MR. KOENTJORO POERBOPRANOTO



Bandung 23 September 1984

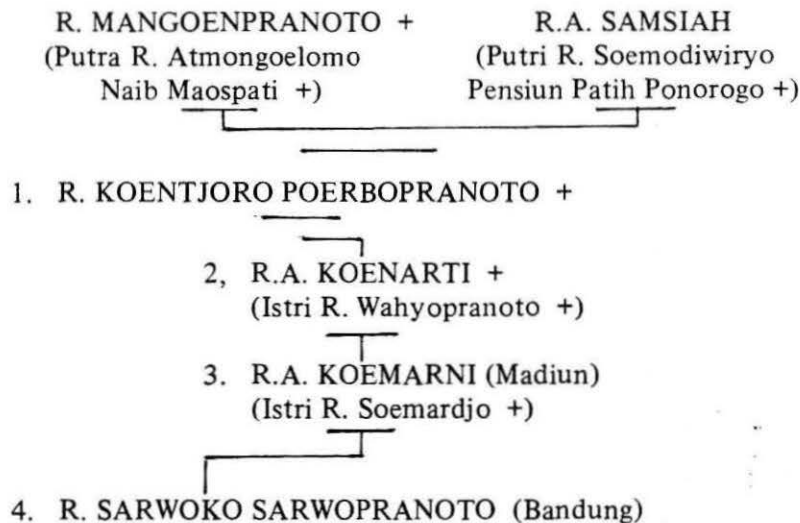
Yang membuat

ttd.

(Sarwoko. S.)

Lampiran 6

ASAL USUL PROF. MR. KOENTJORO POERBOPRANOTO



Bandung 23 September 1984
 Yang membuat

ttd.

(Sarwoko. S.)

Lampiran 7

angka : 253B. CAP ASNO

T E T E D A K A N

Sasampune salam-taklim Kula, dumatenga Panggedening Putra-santana Kula, rama K.G.P.H. Koeseomobroto.

Kapareng Kula, benjing Tingalan Kula Jumenengan ngajeng puniki :

1. K.R.M.H. Poerwokoesoemo, abdi Kula santana Riyo Nginggil, Kula karsakake dados abdi Kula Pangeran Santana, Kula paringi sesebutan sarta nama : B.P.H. Poerwokoesoemo.
2. K.R.M.H. Warsokoesoemo, abdi Kula santana Riyo Nginggil, Kula karsakake dados abdi Kula Pangeran Santana, Kula paringi sesebutan sarta nama : B.P.H. Warsokoesoemo.
Sadaya wahu saderenge tapi papancen saking Parentah, kangge sawatawis wekdal papancene Kula lastarekake rumiyin.
3. B.R.M. Tegoeh Sayid Soedjono, anak titilarane raka handika rama G.P.H. Soeryobroto, Kula karsakake dados abdi Kula Pangeran Santana, Kula paringi sesebutan sarta nama : B.P.H. Soeryoatmodjo.
4. Drs. B.R.M. Soerio Baswondro, anak titilarane rayi handika rama G.P.H. Soerio Hamidjoyo, Kula karsakake dados abdi Kula santana Riyo Nginggil, Kula paringi sesebutan sarta nama : Drs. K.R.M.H. Soerio Beswohamidjoyo.
5. B.R.M. Djoko Kanapi, anak titilarane rayi handika ibu G.R.Ay. Tjokrokoesoemo, Kula karsakake dados abdi Kula santana Riyo Nginggil, Kula paringi sesebutan sarta nama : K.R.M.H. Dowokoesoemo.
6. B.R.M. Ontoredjo, anake putra-handika embokayu G. Ratu Bondoro, Kula karsakake dados abdi Kula santana

- Riyo Nginggil, Kula paringi sesebutan sarta nama : K. R.M.H. Djoyohadikoesoemo.
7. K.R.T. Koeseomaningrat, S.H. abdi Kula Bupati Anon-anon, Kula karsakake dados abdi Kula santana Riyo Nginggil, Kula paringi sesebutan sarta nama : K.R.H. Koeseomaningrat, S.H.
 8. Brig.Jendr. Soeradji, anak mantu titilarane rayi handika ibu G.R.Ay. Sartono Hardjosarwono, Kula karsakake dados abdi Kula santana Riyo Nginggil, Kula paringi sesebutan sarta nama : K.R.H. Aryadiningrat.
 9. Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, anak mantu titilarane embokayu handika ibu G.K. Ratu, Alit, Kula karsakake dados abdi Kula santana Riyo Nginggil, Kula paringi sesebutan sarta nama : K.R.H. Prof.Mr. Poerbokoesoemo.
 10. R.M.P. Koesoemosapoetro, abdi Kula santana Panji-Wayah, Kula karsakake dados abdi Kula santana Riyo Nginggil, Kula paringi sesebutan sarta nama : R.M.R.H. Yoedokoesoemo.

Sadaya wahu saderenge tampi papancen saking Parentah kangge sawatawis wekdal dereng Kula paringi papancen rumiyin.

Sami anglampahna rupana gawa gawene abdi Kula Pangeran Santara, abdi Kula Riyo Nginggil sarta abdi Kula santana Riyo Ngandap.

Angetaken sabarang parentah kang sampun sarta kang hade didawuhake. Lajeng kadawuhan sarta katindakna saperlunen.

Karaton Surakarta, tanggal kaping sambilan wulan Saban, tahun Jimawal angka : 1909.

: Utami kaping 18 wulan Juli, tahun 1977.

Sampun cocog kaliyan luguni pun.
Panitradalem.

Lampiran 8

Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua, sehubungan dengan wafatnya Swargi Bapak Prof. Koentjoro Poerbopranoto SH., dan selanjutnya dalam usaha menyederhanakan serta menyesuaikan keadaan seksi-seksi dengan kebutuhan dan rencana kerja Pengurus dewasa ini, maka setelah diadakan musyawarah dan dengar pendapat antara pengurus dengan para warga dan Sesepuh, akhirnya pada tanggal 9 Juni 1978 telah disusun dan disahkan Pengurus Paguyuban Sosrokartanan Surabaya sebagai berikut :

SUSUNAN PENGURUS
(Disahkan pada tanggal 9 Juni 1978)

BADAN PENASEHAT :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ibu. R.A Djoewito | — Jl. Biliton no. 16 |
| 2. Bpk. Prof. Dr. Moh. Toha | — Jl. Raya Dipenogoro
no. 41 |
| 3. Bpk. R. Hartono | — Jl. Sumbawa no. 5. |

PENGURUS INTI :

- | | |
|----------------|--|
| K e t u a | : Bpk. Dr. Triman Prasadio — Jl. Biliton no. 53 |
| Wakil Ketua I | : Bpk. Soediani — Jl. Tumapel no. 47 |
| Wakil Ketua II | : Bpk. R. Soetarto — Jl. Musi no. 10 |
| Sekretaris I | : Bpk. K.H. Norokoesoemo — Jl. Raya Dipenogoro
no. 60 |
| Sekretaris II | : Bpk. Drs. Djoko Soeharjo — Jl. Cimanuk no. 7 |
| Bendahara I | : Bpk. R. Soekardi — Jl. Kalibokor no. 17 |
| Bendahara II | : Bpk. R. Moesdi — Jl. Tales V/no. 6 |

PEMBANTU-PEMBANTU :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Bpk. M. NG. Oesman | — Jl. Bogowonto no. 21 |
| 2. Bpk. R. Soenarmo | — Jl. Pucangrinenggo
no. 61 |
| 3. Bpk. R. Parnadi | — Jl. Asem I/no. 1.
Asemrowo |

SEKSI-SEKSI :

I. Sosial :

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Ibu Samijono | – Jl. Kapaskrampung
no. 67 |
| 2. Ibu Triman Prasadio | – Jl. Biliton no. 53 |
| 3. Ibu Djoko Soeharjo | – Jl. Cimanuk no. 7 |

II. Penerbitan :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Bpk Tajib Ermadi | – Jl. Ubi V/no. 1 |
| 2. Bpk. R. Wawardi | – Jl. Asahan no. 9 |
| 3. Bpk. KI Soewarno | – Jl. Jendr. Basuki Rach-
mad III/no. 109-D |
| 4. Bpk. R. Soepardi | – Jl. Gunungsari I
Gg. V/no. 29 |

III. Perpustakaan :

- | | |
|---------------|-----------------------|
| Bpk. Soediani | – Jl. Tumapel no. 47. |
|---------------|-----------------------|

Surabaya, 15 Juni 1978.

PENGURUS PAGUYUBAN SOSROKARTANAN SURABAYA
(Dahulu Yayasan Sosrokartono Cabang Surabaya)

Sekretaris I,

t t d.

K.H. NOROKOESOEMO.

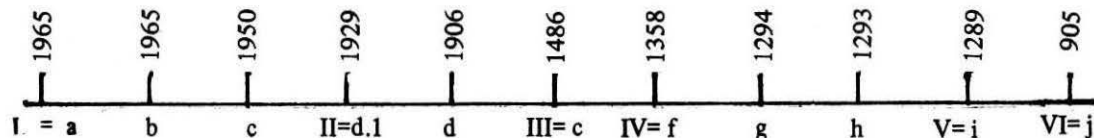
Mengetahui :

Ketua,

t t d.

Dr. TRIMAN PRASADIO.

Skema : PERIODE PENGGALIAN USIA SURABAYA
KOMPILASI KERTAS-KERTAS KERJA PROF. KOENTJORO POERBOPRANOTO S.H.



KETERANGAN :

- I = Periode Kemerdekaan :**
- a. th. 1965 (1 September) = Kotamadya Surabaya (U.U. No. 18/1965).
 - b. th. 1965 (6 Februari) = Kotapradja " (U.U. No. 2/1965).
 - c. th. 1950 (15 Agustus) = Kota Besar " (U.U. No. 16/1950).
- II. = Periode Kolonial :**
- d.1. th. 1928 (1 Januari 1929) = Stadsgemeente Surabaya (St.Bl. 1928 No. 504).
 - d. th. 1950 (1 April) = Gemeente " (St.Bl. 1906 No. 149).
- III. = e. th. 1486 (3 Nopember) = Ampeldhenta/Surabaya (Prasasti Jiyu).**
- IV = Periode Majapahit**
- f. th. 1358 (7 Juli) = (naditiradesa) Curabhaya (Prasasti Trawulan).
 - g. th. 1294 (11 September) = Wanwe Kudadu (dekat Surabaya) (dekat Surabaya) (Prasasti Gunung Butak).
 - h. th. 1293 (+ 31 Mei) = Tentara Tartar meninggalkan Hujunggaluh (penggalian Drs. Soekadri).
- V. = Periode Kertanegara :**
- i. th. 1289 (15 September) = Arca "Djoko Dolok" (Taman Apsari/Simpang) (Prasasti Kertanegara).
- VI. Periode Hujunggaluh :**
- j. th. 905 (permulaan disebut) = (Prasasti Balitung).

Lampiran 10



Rahpinudji Ngripto Gunging Narisworo.

Duk kalanipun pepenggihan kaliyan satunggiling warni, sami mangunpranataningrat, narbukani suraossing weda, kawrat hing serat NITI SASTRA.

Akan kami coba untuk meterjemahkan menurut kata-katanya (latterlijk): Nama samaran penulis;

Rahpinuji = Raden, Ngripto = Mangun, Gunging = Pra, Narisworo = Noto bila dirangkai adalah nama penulisnya = Raden Mangunpranoto.

Semasa bertemu muka dengan makhluk sama rupa (menggambarkan badan "kasar" dan badan "halusnya" pribadi penulis), yang bersama-sama mendiskusikan makna dari buku induk NITI SASTRA.

Lebih mendalam penulis menggambarkan semasa Almarhum Ayah menulis buku CITRA KAWACA tidak ada seorangpun yang membantunya terkecuali memohon petunjuk dan bimbingan TUHAN YME. dan kedua foto yang sama itu adalah menggambarkan diri pribadinya sebagai ya seorang murid ya seorang guru.....

NB. Satu terjemahan dari Bahasa Jawa ke Bahasa lain TIDAK akan dapat menjilmakan JIWA isi tulisan sesungguhnya, kecuali pembaca menguasai Bahasa Jawa.



Foto dari Alm. R. Mangoenpranoto Ayah Alm. Prof.Mr. Koentjoro. Ayahnya dimakamkan di makam keluarga besar R. Atmongulomo di belakang masjid Maospati ± 10 Km. dari Madiun jurusan Solo.

Tidak didapatkan foto Almarhum Ibunya karena semasa hidupnya Ibunya tidak pernah mau difoto, Entah kebetulan atau tidak jika difoto tanpa sepengetahuan Almarhum foto tersebut selalu gagal.

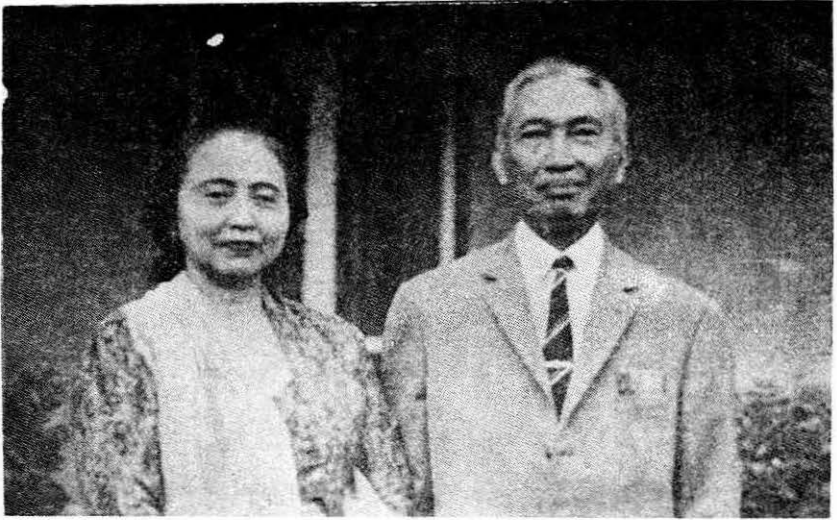


Foto putra-putri R. Mangoenpranoto.

1. Alm. Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto, 2. Alm. Koenarti. Istri Alm. R. Wahyopranoto, 3. R.A. Koemarni Istri Alm. R. Soemardjo sekarang di Madiun, 4. R. Sarwoko sekarang di Jln. Muararajeun Kulon 1 Bandung. Foto tersebut dibuat sewaktu Alm. Prof.Mr. Koentjoro akan berangkat ke Batavia menjadi mahasiswa di Recht Hooge School. Sekitar tahun 1926



Alm. Prof.Mr. Koentjoro sebagai Guru Besar di Universitas Erlangga Surabaya



Alm. Prof.Mr. Kooentjoro Poerbopranoto beserta Ibu, di foto tahun 1970. Ibu Prof.Mr. Koentjoro hingga sekarang bertempat tinggal di Jln. Darmo-husodo 72 di Surabaya.



Foto keluarga Prof.Mr. Koentjoro beserta Ibu dan Putra-putrinya. Difoto sekitar tahun 19



Alm. Prof. Mr. Koentjoro sedang berziarah di makam Ayahnya, sedang Ibu Prof. Mr. Koentjoro di makam Ibu R. A. Mangunpranoto



Foto deretan makam-makam dari keluarga besar R. Atmangoelomo Kakek Alm. Prof. Mr. Koentjoro. Alm. Prof. Mr. Koentjoro sedang menabur bunga di makamnya Alm. R. Soewadji Ayahnya Alm. Dr. Soetomo Surabaya



Alm. Prof.Mr. Koentjoro bersama-sama keluarga besar R. Atmongoelomo memenjatkan puji syukur kepada Tuhan YME. atas Berkah dan Karunianya, terhadap dikabulkannya pemugaran makam keluarga besar R. Atmongoelomo di Maospati



Dimakam R.A. Soemodiwiryo Ibu Alm. R.A. Mangunpranoto Ibunya Prof.Mr. Koentjoro di makam Sidoredjo. Terlihat Ibu Sarwoko sedang sujud, sedang Alm. R.A. Koenarti adik Prof.Mr. Koentjoro bersila disampingnya

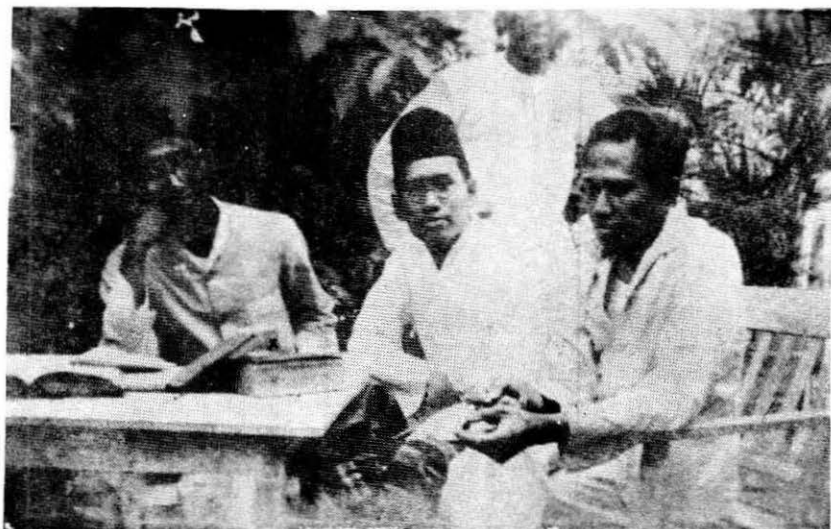
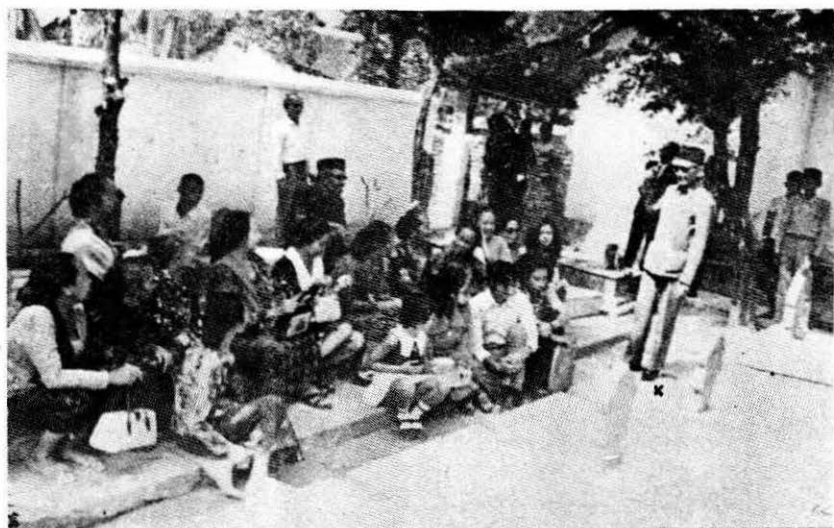


Foto kenangan Alm. Prof.Mr. Koentjoro sewaktu Alm. masih menjadi pelajar di Recht School sekitar tahun 1926. Mereka sedang belajar bersama. Yang memakai kopiah adalah teman sekolah Soekasno yang kemudian juga meraih gelar Mr.



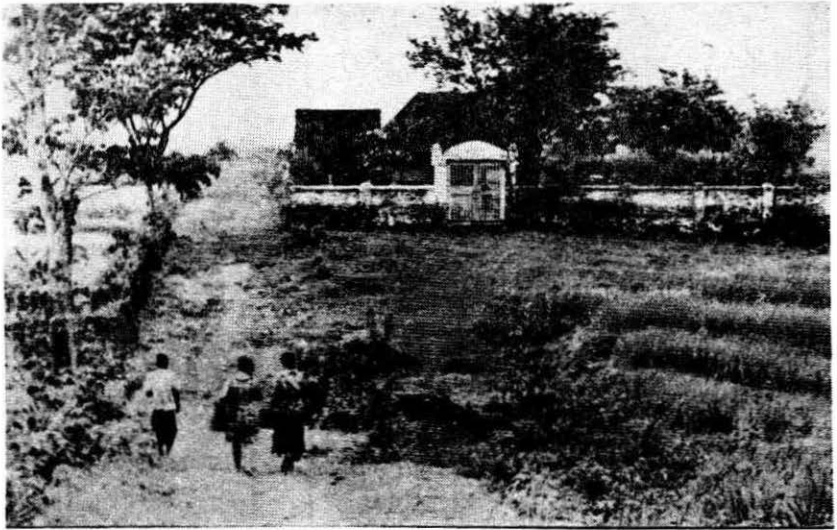
Alm. Prof.Mr. Koentjoro pada saat yang sama sedang relleks dan Alm.



Prof. Mr. Koentjoro sebagai Sesebuah keluarga besar R. Atmongoelomo mengucapkan terima kasihnya kepada para cucu-cucu dan Saudara-saudara keluarga besar R. Atmongoelomo atas kedatangannya, setelah selesainya pemugaran pagar dan halaman makam keluarga besar R. Atmongoelomo



Dimakam R. Soemodiwiryo Ayah Alm. R.A. Mangunpranoto. Terlihat Ibu Sarwoko dan Alm. R.A. Koenarti bersujud dimakam Alm. R. Soemodiwiryo



Terlihat pintu gerbang makam keluarga besar R. Soemodiwiryo Pensiun Patih Ponorogo orang tua dari Alm. Ibunya Prof. Mr. Koentjoro. Makam tersebut berada di tengah-tengah sawah Alm. R. Soemodiwiryo yang terletak di desa Sidoredjo \pm 7 Km. dari Madiun jurusan gunung Lawu. Yang membelakangi lensa adalah Alm. R.A. Koenarti adik kandung Prof. Mr. Koentjoro dan Ibu Sarwoko yang sekarang bertempat tinggal di Jln. Muara Rajeun Kulon 1 Bandung



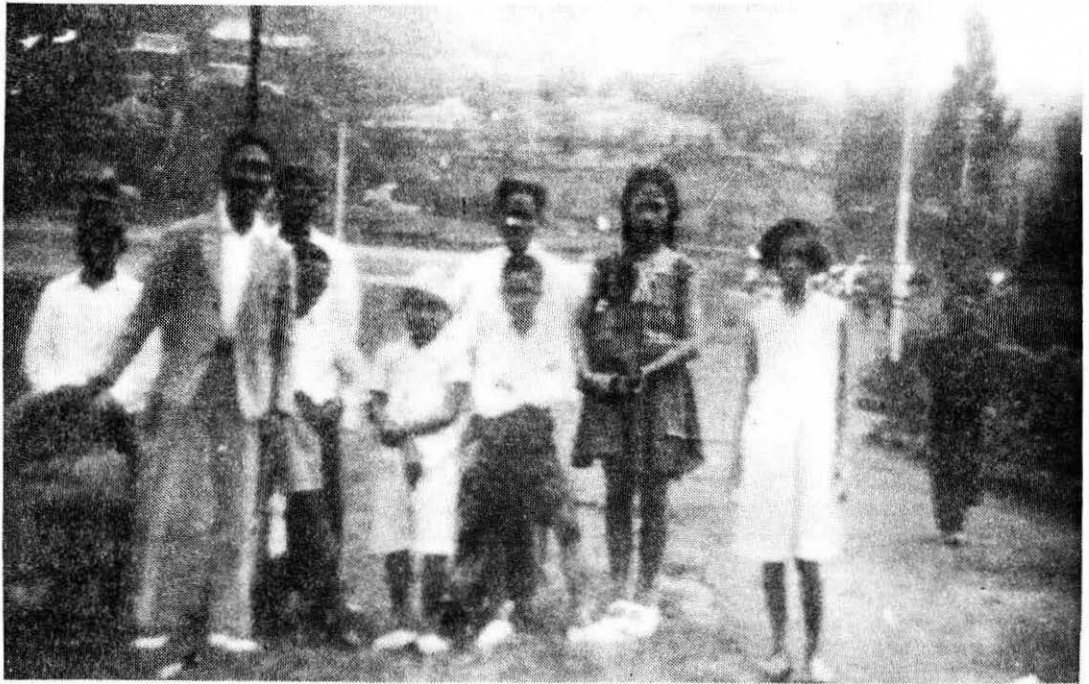
Alm. Prof.Mr. Koentjoro sebagai pecinta alam di salah satu pemandangan di Jawa Barat



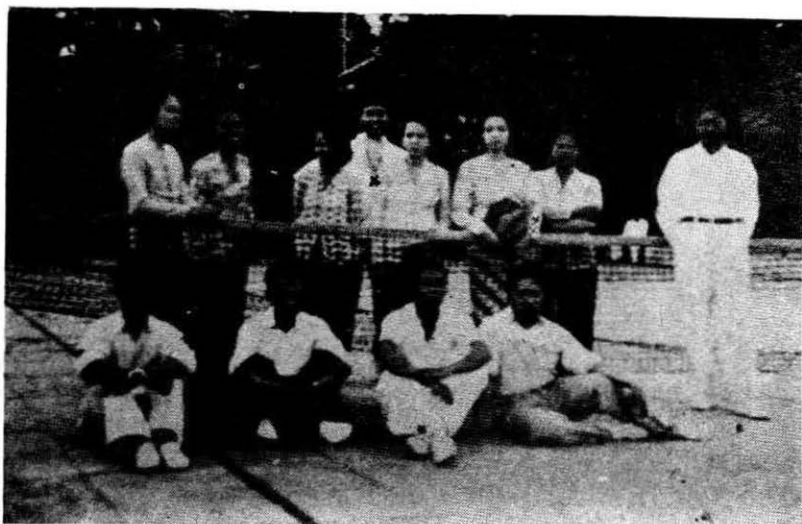
Alm. Pangeran Ario Mataram beserta Ibu Gusti Kanjeng Ratu Alit, orang tuanya Ibu Alm. Prof.Mr. Koentjoro. Beliau berdua telah wafat dan dimakamkan dimakam para Raja-raja di Imogiri



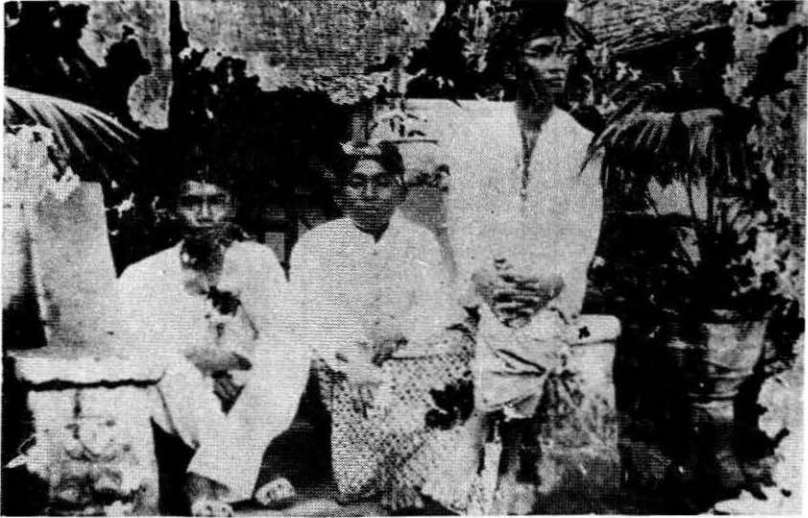
Alm. Prof.Mr. Koentjoro adalah pecinta binatang. Difoto manakala Alm. libur di rumah orang tuanya di Mojokerto sekitar tahun 19266. Anjing kesayangannya sewaktu ditinggalkan wafat, masih selalu setiap jam makan duduk di dekat meja makan, dimana biasanya ia mendapatkan lemparan sekerat daging dari "Tuannya". Ia tidak mengerti mengapa sekian lama "Tuannya" tidak kunjung datang. Dan akhirnya ia puas mendapatkan lemparan sekerat daging dari lain orang.



Lain kali Alm. Prof.Mr. Koentjoro sebagai pecinta alam setiap libur mempergunakan kesempatan untuk menikmati pemandangan-pemandangan yang indah. Terlihat Alm. beserta pengunjung lain di Sarangan Jawa Timur



Berfoto bersama rekan-rekannya, manakala mereka bertenis. Foto tersebut diambil sekitar tahun 1936 - 1937 dimana para Ibu-ibu, juga Ibu Prof. Mr. Koentjoro ikut bertenis, namun Ibu-ibu tersebut bertenis memakai kain panjang. (Jaman kuno sih). Terlihat dalam foto Mr. Hasan, Mr. Soekanto, Bpk. Soewiryo dan lain-lain beserta Ibu. Lapangan tennis tersebut adalah berada di Pasar Rumput Batavia



Alm. Prof. Mr. Koentjoro sewaktu libur sebagai pelajar Recht School sekitar tahun 1925 - 1926 berada di rumah orang tuanya di Mojokerto. Djono yang memakai ikat kepala adalah dahulu pembantu kita yang suka menghantarkan Almarhum kalau lihat wayang. Pada saat itu Djono sempat mengunjungi Almarhum. Foto yang ada di pinggir kiri pegang kucing adalah Sarwoko adik kandung Almarhum yang sekarang beralamat di Jln. Muararajeun Kulon I Bandung



GEDENKBOEK YONG JAVA 1915 - 1930



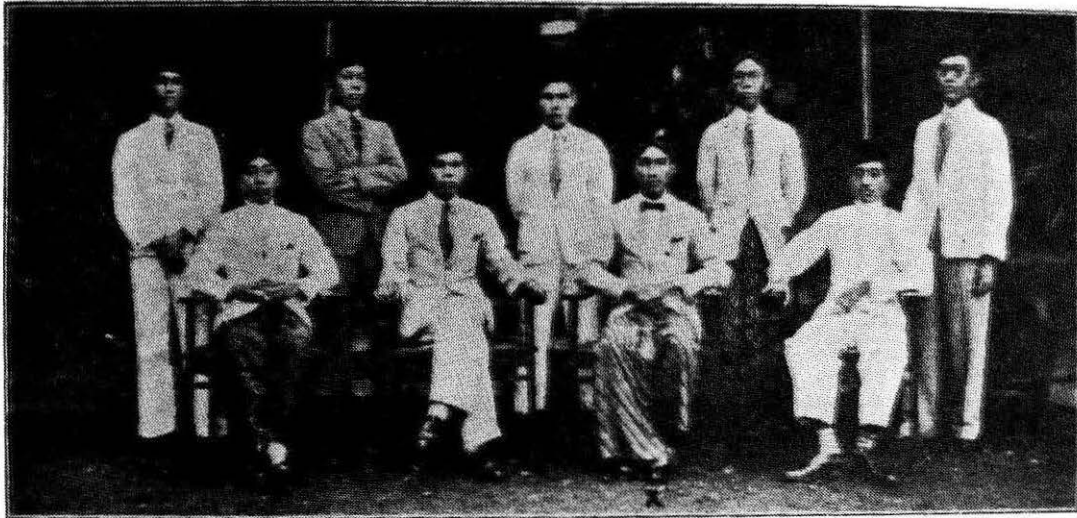
Gambar initial Yong Yava dahulu Tri Koro Dharmo dibuku Gendenkboek Yong Yava halaman no. 2



Sdr. Koentjoro Poerbopranoto dalam buku Gedenkboek Yong Yava 1915 – 1930 halaman 22



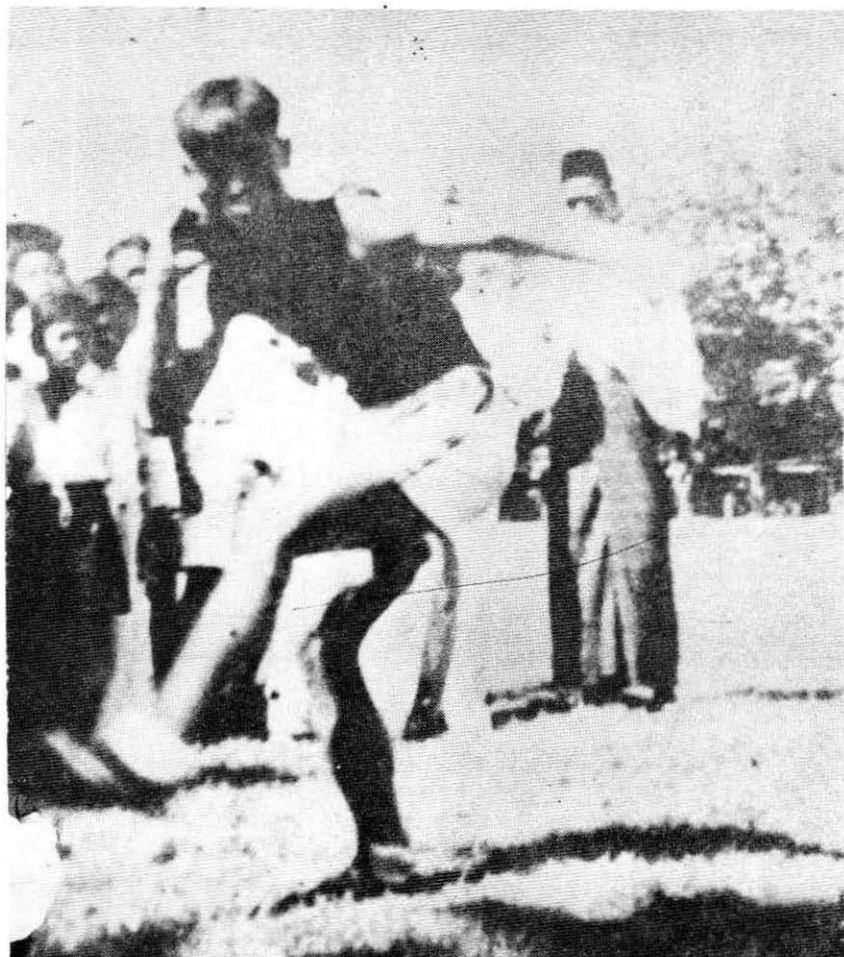
Vandel' Yong Yava di buku Gedenkboek' Yong Yava 1915 - 1930 halaman 8



Komisi Besar INDONESIA MUDA dalam buku Gedenkboek Yong Yava 1915 – 1930 halaman 40



Sdr. Koentjoro Poerbopranoto pada Kongres Jong Yava dalam buku Gedenkboek Jong Yava 1915 – 1930 halaman 52

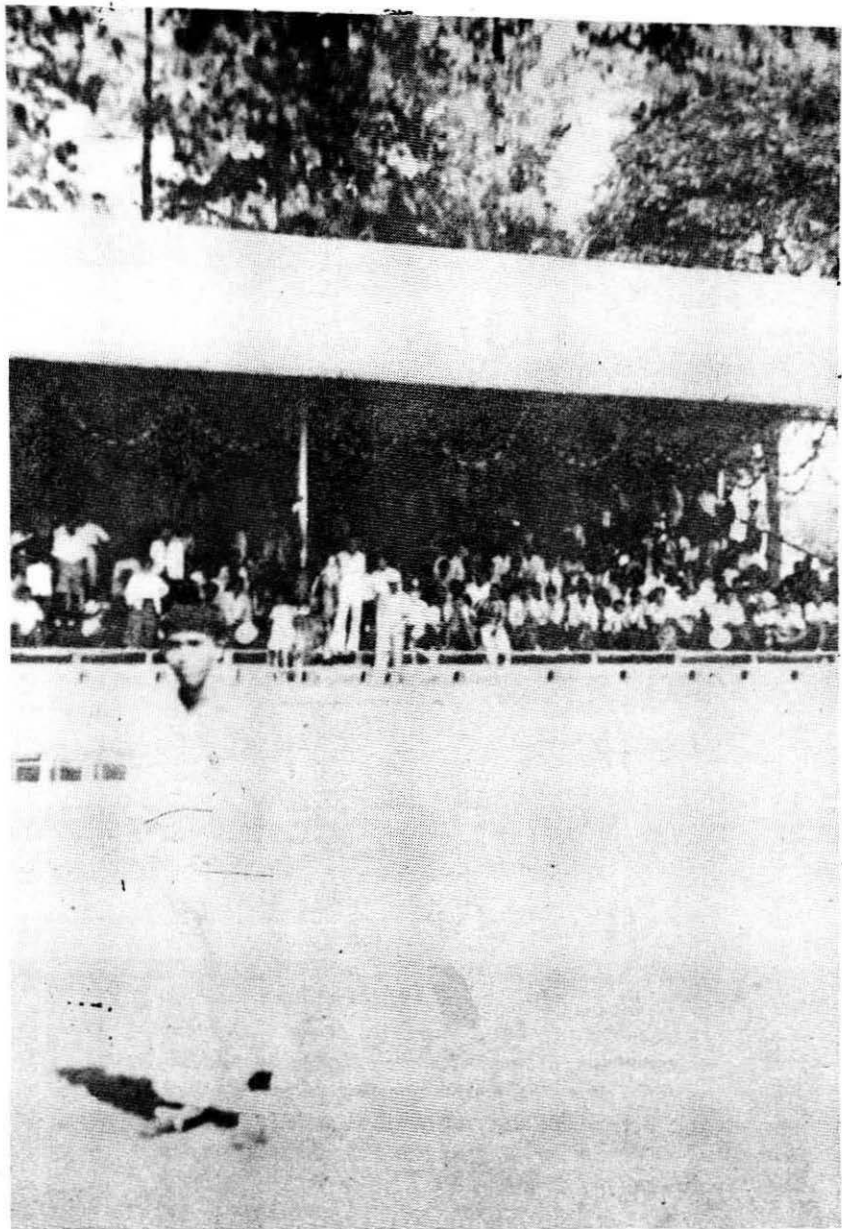


Sarwoko adik kandung Alm. Prof.Mr. Koentjoro sewaktu mengikuti perlombaan Atlitik yang diselenggarakan oleh I.S.I. (Ikatan Sport Indonesia) pada tahun sebelum 1940, I.S.I. adalah semacam P.O.N. sekarang dimana dahulu diarahkan untuk mempersatu Bangsa Indonesia khususnya Pemudaanya melalui olah raga. Kedua foto tersebut memperingatkan kami bahwa Almarhum ikut serta dalam pengurusan penyelenggaraan I.S.I. tersebut.

I.S.I. yang kami maksud dan foto terlampir diambil di lapangan Sriwedari Solo dimana I.S.I. diselenggarakan



Sewaktu Taman Pahlawan tersebut diresmikan oleh Pemerintah kita. Drs. Sumo mewakili Pemerintah kita sedang meletakkan karangan bunga





Motto surat pengantar kami ambil dari prasasti monument taman Pahlawan di Fak Fak Irian Barat, yang dibangun semasa perjuangan merebut kembali Irian Barat. Monument terdiri dari suatu parasut bertali 17 biji, terletak kokoh pada pasangan batu berbentuk segi 8, 4, dan 5. Tiangnya bendera tingginya 17 Mtr, keseluruhannya melambangkan bahwa yang bersemayam dalam Taman Pahlawan tersebut adalah pejuang-pejuang yang diterjunkan dari udara di kota Fak Fak. Perencana dan pelaksana dari Taman Pahlawan tersebut adalah Sarwoko adik kandung Alm. Prof.Mr. Koentjoro (X).



Foto : Wiwiek Hidayat.

Team peneliti Hari Jadi Kota Surabaya.

*Dari kiri ke kanan : Wiwiek Hidayat; Drs. M.D. Pakiding; Tayib Ermadi; Banu Iskandar; R. Suroso; Drs. Heru Soekadri K.; Drs. Issatriyadi; Wali kota Surabaya Sukotyo; Prof.Drs. S. Woyowasito; Prof. Koentjoro Poerbo-
pranoto SH.; Drg. Adi Sukadana; Drs. Prayogo; Sunarto Timur; Kol. Laut Dr. Sugiarto; Tida ada dalam foto
Prof. A.G. Pringgodigdo*





Sepasaran sesudah hari pernikahan tahun 1936 di Solo



Sebagai anggota Kependuan Bangsa Indonesia



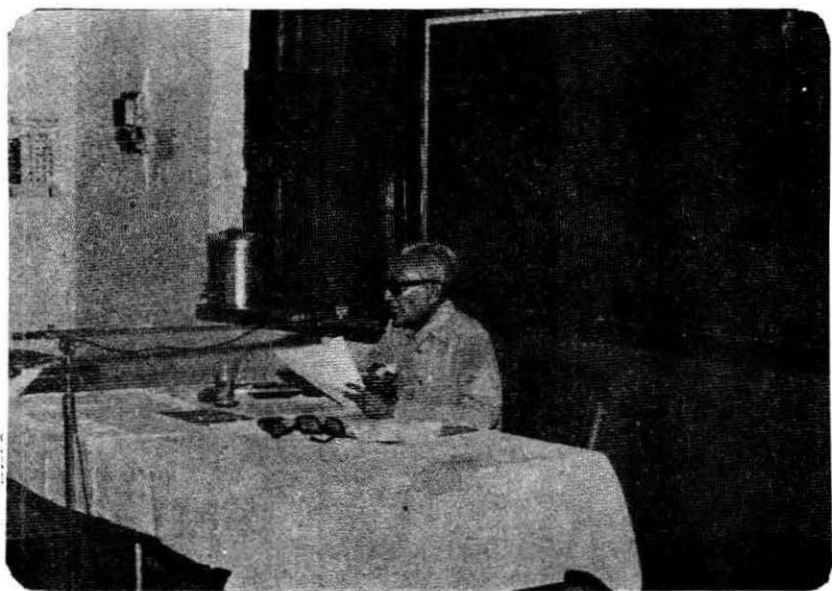
Selesai upacara Ijab Kabul di Kraton Solo tgl. 5 Juli 1936



Menerima Piagam Satya Bhakti



Hari ulang tahun ke 71 Surabaya tgl. 19 Desember 1977

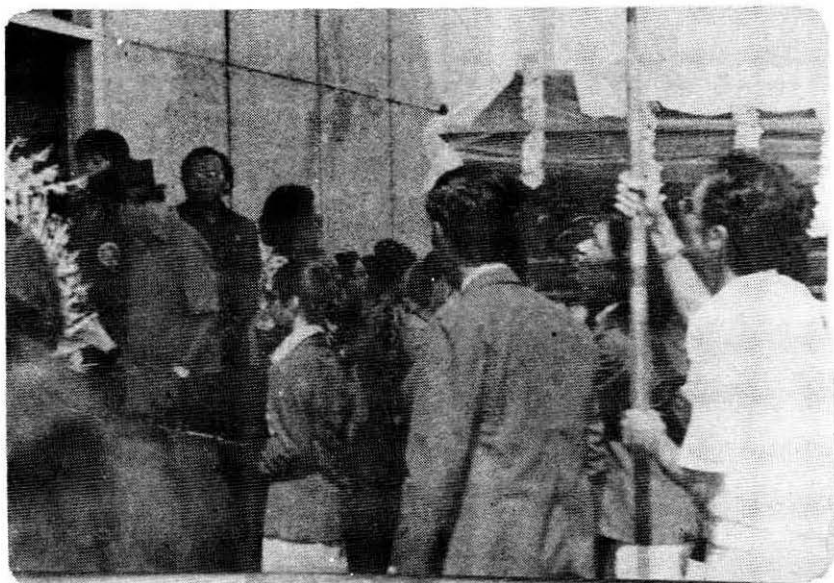


Saat-saat terakhir dari perjalanan hidup; tgl. 17 Maret 1978. Memberi kuliah kepada para calon Dosen Bintal ABRI





Jenazah memasuki ruang Fakultas Hukum Unair untuk disemayamkan.



Jenazah meninggalkan Fakultas Hukum Universitas Airlangga; tahun 1978

Perpustakaan
Jenderal

9